

TERIMA DUBES LIBYA: BAMSOET DORONG PENINGKATAN KERJASAMA EKONOMI

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI

MPR RUMAH KEBANGSAAN



MAJELIS

EDISI NO.10/TH.XV/OKTOBER 2021



MENUJU ADAPTASI KEBIASAAN BARU HIDUP BERDAMPINGAN DENGAN COVID-19



ISSN 0854-6371



06 Refleksi
Kecenderungan Positif
Cegah Gelombang Tiga

19 Nasional
Sepakat Pentingnya
Indonesia Miliki PPHN

39 Selingan
Sejarah Penjara
Mulai Abad XVIII

54 Sosialisasi
Tidak Ada Agenda Perpanjangan
Masa Jabatan Presiden

MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT



Sosialisasi **EMPAT PILAR MPR RI**
MELALUI PAGELARAN SENI BUDAYA

EMPAT PILAR MPR
PANCASILA, ULUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA

INDONESIA
INI BARU
DARI MPR BUNTUK NKRI

INDONESIA
MPR RUMAH KEBANGSAAN PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA DAN KEDAULATAN RAKYAT

Daftar Isi

EDISI NO.10/TH.XV/OKTOBER 2021



08 BERITA UTAMA

Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Pengendalian pandemi ini tidak hanya sebatas obat, vaksin, vitamin, atau kebijakan pemerintah lainnya. Tetapi yang lebih penting adalah perubahan pola hidup dan perilaku. Jadi perlu ada edukasi dan sosialisasi tentang perubahan perilaku hidup masyarakat.



16 Nasional

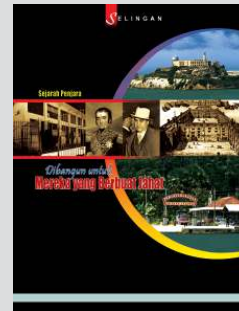
Pimpinan MPR Menerima Duta Besar Libya untuk Indonesia



50 Sosialisasi

Bamsot: Amandemen Terbatas Hasilkan PPHN

MAJELIS EDISI NO.10/TH.XV/OKTOBER 2021



39 SELINGAN

Sejarah Penjara



76 Profil

Illiza Saaduddin Djamal

Pengantar Redaksi	04
Perspektif	06
Kolom	26
Aspirasi Masyarakat	47
Diskusi Mejlis	36
Gema Pancasila	48
Varia MPR	68
Wawancara	70
Figur	72
Ragam	74
Dari Rumah Kebangsaan	78
Rehal	82



COVER

Edisi No.10/TH.XV/Oktober 2021
Kreatif: Jonni Yasrul - Foto: Istimewa



Budi Muliawan
Redaktur Pelaksana

Pengantar Redaksi



PENASEHAT

Pimpinan MPR-RI

PENANGGUNG JAWAB

Ma'ruf Cahyono

PEMIMPIN REDAKSI

Siti Fauziah

DEWAN REDAKSI

Yana Indrawan, Dyastasita,

Heri Herawan, Maifrizal

REDAKTUR PELAKSANA

Budi Muliawan

KOORDINATOR REPORTASE

Ario Setiawan

REDAKTUR FOTO

Oni Arief Benyamin,

Slamet Eko Suprayitno

REPORTER

Bayu Nugroho, Yenita Revi,

Ikhwan Bimo F, Amelia Rubinta

FOTOGRAFER

Ahmad Suryana, Frinda,

Restu, Suprianto, Faridz Rizky,

Wira, Subhan

PENANGGUNG JAWAB/

KOORDINATOR DISTRIBUSI

Cucu Riwayatni

STAF DISTRIBUSI

Ati Oktafia, Amiruddin,

Anggun Permana,

Armansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Djarot Widiarto

TIM AHLI

Syahril Chili, Jonni Yasrul,

Ardi Winangun, Budi Sucahyo,

Derry Irawan, M. Budiono

Menuju Adaptasi Kebiasaan Baru

TREN pertambahan kasus positif Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia mulai melandai. Tanda-tanda penurunan kasus Covid-19 ini terlihat sejak awal Agustus 2021. Merujuk pada data Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 sepanjang Juli sampai September 2021, terlihat adanya tren penurunan kasus positif Covid-19 secara perlahan memasuki Agustus 2021 dan terus berlanjut pada September 2021.

Hingga September 2021 terjadi penurunan angka kasus positif Covid-19 di Indonesia secara signifikan. Angka kasus harian Covid-19 berada di bawah 10.000 kasus, bahkan pada akhir September 2021 angka kasus positif Covid-19 turun hingga kisaran 2.000 kasus. Selain itu, tingkat pasien sembuh mencapai 90%. Rasio keterisian rumah sakit secara nasional berada di angka 19%.

Contohnya, data Satgas Penanganan Covid-19 pada 26 September 2021. Pada hari itu tercatat pertambahan kasus positif Covid-19 sebanyak 1.760 kasus. Penambahan ini lebih rendah dibanding hari sebelumnya yang tercatat 2.137 kasus. Sedangkan kasus meninggal bertambah 86 orang. Pertambahan kasus baru sudah di bawah angka 2.000, sedangkan angka kematian juga terus mengalami penurunan.

Memang, sejak pemerintah mengeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak Juli dan terus diperpanjang hingga saat ini, kasus positif Covid-19 di Indonesia terus melandai. Tentu ini kabar gembira bagi masyarakat. Warga masyarakat seolah euforia dengan penurunan pertambahan kasus positif Covid-19 ini. Masyarakat pun melakukan berbagai aktivitas sosial, budaya, keagamaan, maupun ekonomi, yang selama ini terhenti.

Kementerian Kesehatan menyebutkan, ada dua faktor yang membuat kasus Covid-19 di Indonesia melandai. Pertama, masyarakat secara disiplin menjalankan protokol kesehatan

(prokes). Kedua, berjalannya vaksinasi nasional secara massif. Atas upaya itu, Indonesia mendapat apresiasi dari dunia atas keberhasilan menurunkan jumlah kasus positif Covid-19. Apresiasi itu datang dari WHO, World Bank, dan negara-negara lain.

Pandemi Covid-19 di Indonesia memang mulai terkendali. Epidemiolog menyebut fase ini sebagai fase yang menyenangkan. Namun, pandemi ini belum berakhir. Beberapa negara yang telah berhasil mengendalikan pandemi justru sekarang menghadapi gelombang ketiga dengan kemunculan varian baru virus Corona. Berkaca dari negara-negara itu, Indonesia memang perlu waspada. Sebab, sewaktu-waktu kasus Covid-19 bisa melonjak kembali. Karena itu, meskipun kita berhasil menurunkan angka Covid-19, kita tetap waspada dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan.

Seiring dengan penurunan kasus harian Covid-19 di Indonesia belakangan ini, pemerintah hendaknya juga mulai mempertimbangkan untuk penerapan *new normal* atau adaptasi kebiasaan baru. Masyarakat mesti melakukan adaptasi kebiasaan baru karena harus hidup berdampingan dengan Covid-19. Caranya, dengan menjalankan protokol kesehatan secara disiplin dan ketat. Masyarakat harus membiasakan diri dengan norma-norma baru dalam semua aktifitas, yaitu dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan dan mematuhi berbagai peraturan.

Agar tetap bisa beraktivitas dan hidup berdampingan dengan Covid-19 secara aman dan terkendali, mau tidak mau, masyarakat harus meningkatkan kepatuhan menjalankan protokol kesehatan. Di sisi lain, pemerintah juga harus konsisten dalam kebijakan pengendalian penyebaran virus Corona. Dengan kebijakan yang konsisten, masyarakat pun menjadi terbiasa dengan norma-norma baru yang wajib dipatuhi untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. □

ALAMAT REDAKSI

Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi,

Sekretariat Jenderal MPR-RI

Gedung Nusantara III, Lt. 5

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6,

Senayan, Jakarta 10270.

Telp. (021) 57895237, 57895238,

57895251 Fax.: (021) 57895237

Email: pemberitaan@setjen.mpr.go.id



ILUSTRASI: SUSTHANTO

Pejabat dan Segenap Pegawai
Setjen MPR RI
Mengucapkan Turut Berduka Cita
atas Wafatnya:

Evieta Fadjar Pusporini

Reporter Majalah Majelis

*Semoga Amal Ibadah Almarhumah
Diterima Allah SWT.
dan Keluarga yang ditinggalkan diberi
Ketabahan.*

Kecenderungan Positif untuk Mencegah Gelombang Tiga

SETELAH melalui puncak penularan gelombang kedua, tantangan bersama berikutnya adalah mencegah dan menghindari gelombang ketiga penularan Covid-19. Kecenderungan positif dalam pengendalian pandemi Covid-19 di dalam negeri sekarang ini harus dipertahankan dan dirawat dengan tetap bersikap waspada, berhati-hati dan konsisten mematuhi protokol kesehatan (Prokes).

Penurunan jumlah kasus Covid-19 dan turunnya tingkat keterisian rumah sakit atau BOR (bed occupancy rate) pada rumah sakit rujukan Covid-19 akhir-akhir ini jangan sampai membuat pemerintah dan masyarakat lengah atau ceroboh. Sepanjang tahun kedua ini, perkembangan pandemi masih menghadirkan ketidakpastian. Vaksinasi korona yang telah dilaksanakan di banyak negara memang sangat bermanfaat, tetapi vaksin itu sendiri belum menyelesaikan masalah. Faktanya, penularan virus korona yang menyebabkan lonjakan jumlah pasien masih terjadi di banyak negara.

Data terkini memang memperlihatkan bahwa Indonesia sudah melalui puncak penularan Covid-19 sepanjang gelombang kedua pandemi di dalam negeri. Boleh jadi, pekan ketiga Juli 2021 menggambarkan puncak penularan. Pada 14 Juli 2021, ada 54.517 tambahan kasus baru. Keesokan harinya, 15 Juli 2021, bertambah lagi 56.757 kasus. Dan pada 16 Juli 2021, tambahan kasus baru mencapai 54.000.

Pekan kedua Agustus 2021, tambahan jumlah kasus per hari sudah memasuki level di bawah 30.000-an kasus. Per Sabtu (14/8), data resmi pemerintah melaporkan tambahan 28.598 kasus baru Covid-19 yang tersebar di 34 provinsi. Konsekuensi dari menurunnya jumlah kasus baru adalah berkurangnya tekanan pada sektor jasa layanan kesehatan.

Beberapa hari lalu, Kementerian Kesehatan mengumumkan bahwa BOR untuk ruang isolasi di rumah sakit di seluruh provinsi, per 12 Agustus 2021, tidak ada lagi yang mencapai 80%. Namun, khusus ruang Intensive Care Unit (ICU), BOR rumah sakit pada beberapa provinsi masih di atas 80%. Antara lain, Bali, Kalimantan Timur, Bangka Belitung, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

Kecenderungannya layak disebut positif, karena pulau Jawa yang sebelumnya sempat berstatus sebagai episentrum wabah korona

di dalam negeri mulai menampakkan perubahan yang menjanjikan. Data menunjukkan bahwa angka atau jumlah kasus penularan di Jawa sejak Juli mulai melandai. Karena alasan itulah pemerintah dan Satgas Covid-19 mendorong semua pemerintah daerah di luar Jawa meningkatkan kewaspadaan dan bekerja lebih keras untuk menekan penularan.

Jika saja kecenderungan di pulau Jawa bisa dibuat lebih baik lagi, upaya pemulihan pada sejumlah aspek, terutama aspek ekonomi, bisa dimulai. Produktivitas pulau Jawa masih menjadi kontributor utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Kecenderungan positif dalam pengendalian pandemi Covid-19 di dalam negeri sekarang ini harus dipertahankan dan dirawat, antara lain dengan tetap bersikap waspada, berhati-hati dan konsisten mematuhi protokol kesehatan (Prokes). Kesadaran bersama akan hal ini sangatlah penting, karena semua elemen masyarakat dihadapkan pada tantangan berikutnya, yakni mencegah dan menghindari gelombang ketiga penularan Covid-19.

Hingga kini, pandemi Covid-19 pada tingkat global sekali pun masih menghadirkan ketidakpastian. Durasi pandemi ini belum bisa dihitung. Karena itu, ketidakpastian dan ketidaktentuan itu harus disikapi dengan cerdas dan bijaksana oleh semua elemen masyarakat. Semangat dan tujuan utamanya adalah menghindari dari gelombang ketiga.

Pada puncak penularan gelombang kedua, tersaji dengan gamblang ragam permasalahan dan banyak kisah memilukan. Rumah sakit rujukan tidak mampu menampung dan melayani semua pasien akibat besarnya lonjakan kasus Covid-19. Jumlah dokter dan tenaga kesehatan (Nakes) jauh lebih sedikit dibanding tambahan jumlah pasien.

Akibatnya, tidak sedikit pasien yang tidak tertolong atau terlambat mendapatkan pertolongan dari dokter dan Nakes. Juga di puncak gelombang kedua itu, penanganan pasien Covid-19 diwarnai dengan stok obat-obatan yang menipis dan keluhan banyak manajemen rumah sakit karena kehabisan oksigen.

Siapa pun tentu tidak ingin tragedi serupa terulang lagi. Semua orang harus mau belajar dari puncak penularan Covid-19 pada

H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.
Ketua MPR RI



gelombang kedua yang menghadirkan ragam eksekusi yang nyata itu. Kini, data-data resmi menjelaskan bahwa Indonesia telah melalui puncak penularan gelombang kedua. Akan tetapi, ancaman dari Covid-19 tidak berkurang dengan sendirinya. Virus korona yang terus bermutasi masih menghadirkan ancaman. Ancaman yang tidak terlihat itu memaksa orang lanjut usia, kaum muda, remaja hingga anak bayi sekalipun melindungi diri dengan Prokes.

Benar bahwa ada kegelisahan sebagian publik karena faktor penerapan pembatasan sosial. Bahkan ada yang menuntut pelonggaran atas PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat). Sayangnya, pada saat yang sama, semua pihak harus mengakui dan menerima fakta bahwa pandemi ini belum berakhir. Pada tingkat global, durasi pandemi yang tidak menentu ditunjukkan oleh kurva penularan yang fluktuatif; menurun di kawasan tertentu, tetapi melonjak di kawasan lain.

Bahkan, karena tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, sejumlah negara sudah menyatakan siap berdampingan hidup dengan virus korona. Namun, kesiapan itu harus didukung oleh sistem layanan kesehatan publik yang efektif merespons pasien yang terinfeksi Covid-19. Salah satu tolok ukur kemampuan itu adalah mencegah atau meminimalisir jumlah kematian pasien Covid-19. Jika kematian akibat infeksi Covid-19 masih tinggi, itu pertanda sistem layanan kesehatan publik negara bersangkutan belum efektif.

Karena itu, setiap negara didorong untuk tidak gegabah dalam melonggarkan Prokes atau PPKM. Dalam konteks ini, pengalaman buruk Amerika Serikat (AS), Israel, serta Inggris layak dijadikan contoh kasus pembelajaran. Pekan keempat April 2021, Pusat Pengendalian dan Pencegahan

Penyakit pemerintah AS melonggarkan aturan prokes Covid-19.

Karena sudah banyak warga AS yang menerima vaksinasi, peraturan yang mewajibkan penggunaan masker di luar ruangan tidak lagi diwajibkan. Sebelumnya, Israel juga mengumumkan kebijakan pelonggaran yang sama. Inggris pun cenderung melonggarkan ketentuan Prokes selama berlangsungnya turnamen sepakbola Piala Eropa 2020.

Akibat pelonggaran Prokes itu, AS, Inggris dan Israel kembali mengalami lonjakan kasus Covid-19. Memasuki pekan kedua Agustus 2021, jumlah tambahan kasus baru per hari di AS bisa mencapai 100.000 kasus. Rumah sakit di beberapa negara bagian AS sempat kewalahan karena lonjakan jumlah pasien itu. Di Israel, kendati 80% warga dewasa sudah menerima vaksinasi, pelonggaran Prokes justru menyebabkan terjadinya lonjakan kasus baru Covid-19.

Banyak negara sudah belajar dari pengalaman AS, Israel, dan Inggris itu, dan semuanya tidak ingin gegabah melonggarkan Prokes. Untuk menghindari gelombang ketiga penularan Covid-19, Indonesia pun tidak boleh gegabah melonggarkan Prokes. Apalagi, persentase penduduk yang sudah divaksinasi belum proporsional.

Puncak penularan Covid-19 gelombang kedua di dalam negeri dengan banyak cerita pilu itu hendaknya mendorong semua elemen masyarakat semakin cerdas dan bijaksana menyikapi ancaman virus korona. Pengendalian pandemi sudah menunjukkan kecenderungan positif, dan kecenderungan ini menjadi modal awal bersama untuk mencegah musibah berikutnya. Biasakan mematuhi Prokes agar Indonesia terhindar dari gelombang ketiga penularan Covid-19. □

Menuju Adaptasi Kebiasaan Baru

Hidup Berdampingan dengan Covid-19



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Pengendalian pandemi ini tidak hanya sebatas obat, vaksin, vitamin, atau kebijakan pemerintah lainnya. Tetapi yang lebih penting adalah perubahan pola hidup dan perilaku. Jadi perlu ada edukasi dan sosialisasi tentang perubahan perilaku hidup masyarakat.

PARA penikmat konser musik sudah bisa bergembira. Pasalnya, pemerintah mulai mengizinkan kegiatan berskala besar itu. Alasannya, tren kasus positif Covid-19 menunjukkan tanda-tanda membaik. Kabar ini bukan hanya menggembirakan bagi penggemar konser musik, tetapi juga bagi masyarakat pada umumnya. Pemerintah memberikan izin untuk gelaran hajatan pernikahan, konferensi, pameran dagang, atau festival.

“Pemerintah mempertimbangkan perlunya mewadahi aktivitas masyarakat agar tetap produktif, tetapi juga aman dari Covid-19,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, di Jakarta, Ahad, 26 September 2021. Sebagai bukti, pemerintah pun menggelar kegiatan berskala besar, yakni Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua dan mengizinkan bergulirnya kompetisi sepakbola Liga 1 dan Liga 2.

Belakangan, tren pertambahan kasus positif Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia memang mulai melandai. Tanda-tanda penurunan kasus Covid-19 ini mulai terlihat sejak awal Agustus 2021. Merujuk pada data Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 sepanjang Juli sampai September 2021, terlihat adanya tren penurunan kasus positif Covid-19 secara perlahan memasuki

Agustus 2021, dan terus berlanjut pada September 2021.

Tengok saja data-data ini. Pada periode 1 – 7 Juli, pertambahan jumlah kasus Covid-19 mencapai 201.125 kasus. Kemudian periode 8 – 14 Juli, melonjak menjadi 290.649 kasus. Sepekan kemudian (periode 15 – 21 Juli), melonjak lagi menjadi 313.784 kasus. Jika dihitung rata-rata per hari, terjadi antara 40.000 – 50.000 pertambahan kasus positif Covid-19 setiap hari. Inilah puncak kasus Covid-19 di Indonesia. Ada yang mengatakan puncak ini merupakan gelombang kedua pandemi Covid-19 di Indonesia.

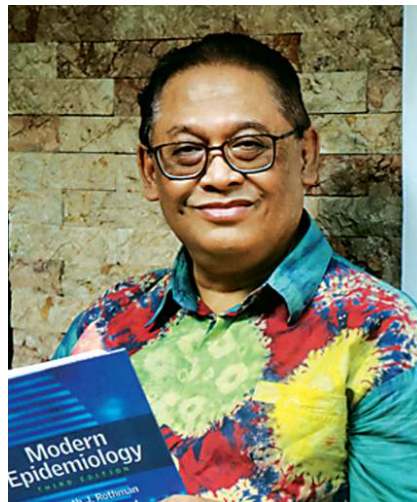
Namun, pada 22 – 28 Juli, tambahan kasus baru mulai menurun menjadi 303.897 kasus. Tren penurunan jumlah kasus baru terus berlanjut. Pada periode 29 Juli – 4 Agustus, kumulatif Covid-19 hanya bertambah 244.480 kasus. Kemudian, pada 5 – 11 Agustus, kasus positif Covid-19 bertambah 216.879 kasus. Sepekan kemudian pertambahan menurun menjadi 158.801 kasus. Setelah itu, pada 19 – 25 Agustus kasus kembali turun menjadi 118.590 kasus. Tren penurunan terlihat konsisten. Tambahan kasus baru pun turun mencapai 100.000 kasus dalam sepekan.

Berlanjut pada periode 26 Agustus – 1 September, pertambahan kasus positif turun menjadi 73.301 kasus. Tren penurunan terus



berlanjut di bulan September. Sekadar contoh, data pada 27 September 2021 pukul 12.00 WIB. Kasus baru Covid-19 di Indonesia bertambah 1.390 kasus. Pertambahan ini lebih rendah dibanding sehari sebelumnya (Ahad, 26 September 2021) yang tercatat 1.760 kasus. Sementara kasus meninggal bertambah 118 kasus. Jadi, tren penurunan pertambahan kasus baru Covid-19 juga diiringi dengan penurunan jumlah kasus kematian.

Jika kita ingat, saat terjadi gelombang kedua pada kurun Juni – Agustus 2021, sepanjang periode tersebut, sistem kesehatan Indonesia berada pada situasi terburuk sejak wabah Covid-19 melanda pada Maret 2020. Inilah pengalaman pahit gelombang kedua: rasio kasus positif harian tembus 20%, fasilitas kesehatan kewalahan menangani pasien Covid-19, oksigen langka, kasus positif Covid-19 mencatat rekor tertinggi di atas 50.000 kasus, demikian pula angka kematian harian melampaui 2.000 orang per hari.



Pandu Riono

Hingga September 2021 terjadi penurunan angka kasus positif Covid-19 di Indonesia secara signifikan. Angka kasus harian Covid-19 berada di bawah 10.000 kasus, bahkan pada akhir September 2021 angka kasus positif Covid-19 turun hingga kisaran 2.000 kasus. Selain itu, tingkat pasien sembuh

mencapai 90%. Rasio keterisian rumah sakit secara nasional berada di angka 19%.

Melihat tren pertambahan jumlah kasus Covid-19 yang menurun diiringi jumlah kematian yang juga ikut turun, Epidemiolog Universitas Indonesia, Pandu Riono, menyebutkan bahwa untuk sementara pandemi Covid-19 di Indonesia terkendali. “Kunci keberhasilan adalah karena satuan gerak secara nasional. Keberhasilan bukan hanya di Jakarta, tetapi di seluruh Indonesia,” katanya dalam rilis hasil Survei Nasional Indikator Politik Indonesia bertajuk “Evaluasi Publik terhadap Penanganan Pandemi Covid-19, Pemulihan Ekonomi, dan Demokrasi,” di Jakarta, Ahad, 26 September 2021.

Saat ini, menurut Pandu Riono, adalah fase yang cukup menyenangkan. Hampir semua orang menyangka pandemi ini telah terkendali. “Tapi ini fase paling berat. Jika situasi ini bisa dipertahankan sampai Januari saja sudah cukup luar biasa karena kita akan menghadapi liburan Natal dan tahun baru nanti,” ujar Pandu.



Jazilul Fawaid

Sementara itu Juru Bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyebutkan, dua faktor yang membuat kasus Covid-19 di Indonesia melandai. Pertama, masyarakat secara disiplin menjalankan protokol kesehatan (*prokes*). Kedua, berjalannya vaksinasi nasional secara masif. Atas upaya itu, Indonesia mendapat apresiasi dari dunia atas keberhasilan menurunkan jumlah kasus positif Covid-19. Apresiasi itu datang dari WHO, World Bank, dan negara-negara lain.

Wakil Ketua MPR Dr. Jazilul Fawaid melihat, pemerintah memang bekerja keras untuk mengendalikan pandemi ini. Upaya itu dilakukan melalui sosialisasi protokol kesehatan (memakai masker, mencuci tangan, minum vitamin, menjaga kesehatan diri, keluarga dan lingkungan), menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), hingga vaksinasi nasional kepada seluruh rakyat Indonesia.

“Alhamdulillah, saat ini kasus positif Covid-19 sudah menunjukkan penurunan. Saya kira kita patut memberikan apresiasi kepada semua pihak. Tren positif tersebut mesti dijaga, jangan sampai melonjak lagi sehingga bangsa ini bisa fokus untuk *me-recovery* dampak pandemi, seperti membangun kembali ekonomi rakyat,” katanya kepada *Majelis*.

Anggota MPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Rahmad Handoyo, juga mengapresiasi pemerintah, presiden dan seluruh jajarannya di pusat dan daerah, serta seluruh rakyat Indonesia, yang dengan penuh kesabaran dan bergandengan tangan, hingga kasus positif Covid-19 dan tingkat kematian bisa melandai. “Hasil ini patut kita syukuri dan

inilah hasil kerja kita bersama,” katanya kepada *Majelis*.

Namun, Rahmad Handoyo mengingatkan masyarakat untuk tidak euforia dengan penurunan kasus positif Covid-19 ini. Sebab, penurunan kasus Covid-19 dan tingkat kematian sebenarnya masih bersifat labil. Artinya, sewaktu-waktu kasus Covid-19 bisa kembali melonjak. Contohnya, beberapa negara yang dianggap sudah berhasil mengendalikan pandemi, seperti Singapura, Malaysia, Cina, Amerika Serikat, Inggris, ternyata mengalami gelombang ketiga kasus Covid-19. Di negara-negara itu, kasus Covid-19 melonjak kembali. (lihat bagian dua, “Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19”)

“Bercermin dari negara-negara itu maka tidak ada negara yang benar-benar bisa mengendalikan Covid-19. Artinya, kasus Covid-19 bisa melandai, tetapi sewaktu-waktu bisa naik kembali. Karena itu, meskipun kita berhasil menurunkan angka Covid-19, kita harus tetap waspada dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan. Kita tidak boleh abai dan tetap mengencangkan ikat pinggang,” ujar anggota Komisi IX DPR yang membidangi masalah kesehatan.

Tidak jauh berbeda, anggota MPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Abidin Fikri, juga mengapresiasi penanganan Covid-19 sehingga jumlah kasus positif Covid-19 bisa melandai. “Saya kira kita harus apresiasi penanganan Covid-19 sekarang. Penanganan Covid-19 di Indonesia juga mendapat apresiasi dari WHO dan lainnya. Secara garis besar penanganan Covid-19 sudah bisa dikatakan menurunkan jumlah kasus

positif Covid-19,” katanya.

Meski kondisi saat ini relatif baik, Abidin Fikri mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 belum berakhir. Masyarakat harus tetap waspada. Apalagi muncul varian-varian baru virus korona. Abidin juga meminta pemerintah menyiapkan langkah-langkah antisipasi jika sewaktu-waktu kasus positif Covid-19 kembali melonjak. “Salah satu langkah antisipasi adalah dengan memperketat kebijakan karantina internasional, termasuk dalam entry dan *exit testing* di bandara-bandara,” tutur anggota Komisi IX ini.

Menurut Abidin, penanganan Covid-19 yang berhasil menurunkan angka kasus positif tidak terlepas dari hasil kerja keras pemerintah, komponen masyarakat, TNI, Polri, dan BIN. “Daerah-daerah melalui prakarsa kepala daerah dalam mengawasi pelaksanaan vaksinasi merupakan indikator terjadinya percepatan penanganan pandemi Covid-19 yang luar biasa,” katanya.

New Normal

Sejalan dengan penurunan kasus positif Covid-19, pemerintah melonggarkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Masyarakat seolah euforia dengan kasus Covid-19 yang melandai. Masyarakat mulai menjalankan kegiatan seperti biasa dengan syarat mematuhi protokol kesehatan. Karena itu, pemerintah hendaknya mulai mempertimbangkan untuk penerapan *new normal*, atau adaptasi kebiasaan baru seiring penurunan kasus harian Covid-19 dalam



Abidin Fikri



Lestari Moerdijat

beberapa waktu terakhir.

Dalam pandangan Jazilul Fawaid, jika pandemi Covid-19 menjadi endemi maka kita mesti hidup berdampingan dengan Covid-19. Cara hidup berdampingan dengan Covid-19 adalah dengan hidup sewajarnya tanpa takut berlebihan. "Kita mesti hidup berdampingan dengan Covid-19 dan menjalani hidup dengan sewajarnya namun tetap waspada. Tidak perlu takut berlebihan yang justru akan menurunkan imunitas tubuh," kata Gus Jazil, sapaan akrab Jazilul Fawaid.

Gus Jazil juga melihat masyarakat siap hidup berdampingan dengan Covid-19. "Saya melihat masyarakat sudah bisa beradaptasi selama setahun lebih pandemi ini. Adaptasi masyarakat sudah sangat baik.



Rahmad Handoyo

Yang harus lebih dipraktikan lagi dalam kehidupan masyarakat adalah saling membantu satu sama lain, gotong royong, tepo seliro, dan saling menguatkan," tuturnya.

Wakil Ketua MPR Dr. Lestari Moerdijat juga berpendapat sama bahwa masyarakat mesti melakukan adaptasi, karena harus hidup berdampingan dengan Covid-19. Caranya, dengan menjalankan protokol kesehatan secara disiplin dan ketat. "Pada masa pandemi, masyarakat harus membiasakan diri dengan norma-norma baru dalam semua aktivitas. Yaitu, dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan," katanya dalam keterangan tertulis pada Senin, 20 September 2021.

Rerie, sapaan akrab Lestari Moerdijat, menambahkan bahwa kepatuhan masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan harus terus ditingkatkan agar tetap bisa beraktivitas dan hidup berdampingan dengan Covid-19 secara aman dan terkendali.

Pemerintah, lanjut Rerie, juga harus melaksanakan sejumlah kebijakan pengendalian penyebaran virus korona secara konsisten. Dengan kebijakan yang konsisten itu, masyarakat pun menjadi terbiasa dengan norma-norma baru yang wajib dipatuhi untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. "Berbagai persyaratan dalam sejumlah kebijakan pengendalian Covid-19 harus konsisten sehingga masyarakat bisa mematuhi kebijakan tersebut," kata Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Nasdem ini.

Rerie memberi contoh, misalnya persyaratan ketika berada di area public, seperti mal harus konsisten dalam pelaksanaannya, termasuk sanksi bila persyaratan itu dilanggar. Hal ini penting agar penerapan kebijakan itu mendorong masyarakat untuk menerapkan norma-norma baru dalam aktivitas sehari-hari.

Anggota MPR dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, meminta pemerintah mulai memikirkan untuk menerapkan new normal atau adaptasi kebiasaan baru seiring penurunan kasus harian Covid-19 dalam beberapa waktu terakhir. Pasaunya, pandemi Covid-19 belum berakhir. "Oleh karena itu, satu-satunya cara kita memang membiasakan hidup di tengah situasi pandemi



Saleh Partaonan Daulay

ini," ujarnya.

Sementara itu, Rahmad Handoyo menegaskan bahwa hidup *new normal* atau adaptasi kebiasaan baru adalah sebuah keniscayaan. Sebab, realitasnya, Covid-19 tidak akan pernah hilang dari muka bumi. Covid-19 akan tetap ada. Dengan demikian, siap atau tidak siap, masyarakat memang harus menyiapkan diri untuk hidup berdampingan dengan Covid-19.

"Siap atau tidak siap memang masyarakat harus disiapkan karena fakta dan realitasnya seperti sekarang, yaitu Covid-19 akan tetap ada. Bahkan, dari pandangan pakar, akademisi, epidemiolog, bahwa Covid-19 ini tidak akan pernah hilang. Karena itu, siap atau tidak siap, memang harus siap mandiri, yaitu perubahan pola dan perilaku hidup kita," jelasnya.

Rahmad Handoyo memberi contoh, jika sebelumnya masyarakat tidak memakai masker, maka mau tidak mau, kita harus mengubah pola hidup dengan selalu memakai masker. Sekarang di mana pun terpampang spanduk atau pemberitahuan wajib menggunakan masker. Contoh lainnya adalah kebiasaan mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan lain sebagainya. Semua menyangkut perubahan pola hidup.

"Pengendalian pandemi ini tidak hanya sebatas obat, vaksin, atau vitamin. Tetapi yang lebih penting adalah perubahan pola hidup dan perilaku. Jadi perlu ada edukasi dan sosialisasi tentang perubahan perilaku hidup masyarakat," ucapnya. □

DER/BSC

Antisipasi Gelombang Ketiga Pandemi Covid-19

Banyak negara yang sudah berhasil memperluas cakupan vaksinasi kepada penduduknya, toh tetap mengalami lonjakan kasus Covid-19 gelombang ketiga.



Suryopratomo



Khairy Jamaluddin

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

PANDEMI Corona Virus Disease 2019 atau dikenal dengan Covid-19 belum berakhir. Pada saat Indonesia sedang mengalami penurunan jumlah kasus positif Covid-19, banyak negara-negara di dunia justru sedang menghadapi gelombang ketiga Covid-19. Ketika Indonesia mengalami puncak kasus kedua pada Juli 2021, negara-negara lainnya di dunia tidak mengalami kenaikan. Tetapi pada September 2021, kasus Covid-19 di Indonesia melandai, sedangkan kasus dunia mengalami *third wave* atau puncak ketiga.

Pada periode Agustus – September, pandemi Covid-19 di Indonesia mulai terkendali. Sebaliknya, negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia tengah menghadapi pandemi Covid-19 gelombang ketiga. Ambil contoh Singapura. Penduduk negara kecil yang berdekatan dengan Indonesia itu dikenal sangat disiplin menjalankan protokol kesehatan. Bahkan, pemerintah menetapkan denda atau hukuman penjara bagi pelanggar protokol kesehatan.

Setelah berhasil mengendalikan pandemi Covid-19, pemerintah Singapura menyatakan masyarakat harus siap hidup berdampingan dengan Covid-19. Singapura menganggap wabah Covid-19 sama seperti penyakit flu. Namun, belakangan kasus positif Covid-19 di Singapura justru melonjak. Dalam Dialog Produktif Semangat

Selasa, Forum Merdeka Barat 9 KPCPEN, Selasa 28 September 2021, Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Suryopratomo, menyebutkan, kasus di Singapura di atas 1.000 kasus. “Bagi Singapura, jumlah ini cukup besar,” kata Suryopratomo.

Pada Sabtu, 18 September 2021 misalnya, kasus baru di negara tersebut dilaporkan mencapai angka 1.009 kasus. Sebanyak 1.004 kasus positif Covid-19 di antaranya adalah kasus lokal. Lebih rinci lagi, dari jumlah itu sebanyak 926 kasus penularan masyarakat dan 78 orang warga asrama, serta 5 kasus impor. Jumlah kasus positif Covid-19 ini adalah kasus harian tertinggi di Singapura sejak 23 April tahun lalu. Kala itu tercatat 1.037 kasus baru.

Hal serupa terjadi di negara jiran Malaysia. Pada 1 Juli 2021, Kementerian Kesehatan Malaysia sempat mengumumkan nol kasus baru Covid-19. Ketika terjadi pandemi Covid-19, Malaysia memang menerapkan *lockdown*. Setelah berhasil mengendalikan pandemi Covid-19, Malaysia mencabut kebijakan *lockdown* dan seluruh kegiatan bisnis maupun ekonomi kembali berjalan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat.

Namun, belakangan terjadi lonjakan kasus Covid-19 di Malaysia. Bahkan, negara itu berencana untuk kembali menerapkan *lockdown*. Anggota parlemen Malaysia Lim

Kit Siang justru heran ketika kasus Covid-19 di Malaysia melonjak, kasus positif Covid-19 di Indonesia justru melandai. Ia pun mengkritik Menteri Kesehatan Malaysia, Khairy Jamaluddin, yang tak mampu menurunkan kasus Covid-19 di Malaysia.

“Bisakah Menteri Kesehatan yang baru, Khairy Jamaluddin, menjelaskan mengapa selama 16 hari berturut-turut, Indonesia telah mengurangi kasus baru Covid-19. Di saat Indonesia mencatat 8.955 kasus baru pada Kamis (2/9/2021), Malaysia justru membukukan angka 20.988 kasus,” kata Lim Kiat siang, Pemimpin Partai Aksi Demokratik (DAP) Malaysia, seperti dikutip Malay Mail, pada Jumat, 3 September 2021. Saat itu, jumlah kasus harian Covid-19 di Malaysia sekitar 20.000 kasus.

Lie menyebut Malaysia adalah salah satu negara dengan kinerja terburuk dalam penanganan Covid-19. Berdasarkan Our World in Data per 1 September 2021, kasus baru di Malaysia mencapai 572,43 per satu juta orang. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia 37,40, Filipina 126,95, dan Myanmar 61,27.

Masih berdasarkan Our World in Data, Malaysia juga menduduki puncak angka kematian Covid-19 di kawasan Asia Tenggara. Angka kematian di Malaysia 8,48 per satu juta orang. Vietnam berada di urutan kedua dengan 8,19, sementara kematian harian per satu juta

orang di Indonesia adalah 2,36.

Negara Cina, negara pertama kali ditemukan virus korona, juga tengah menghadapi gelombang ketiga Covid-19. Setelah berhasil mengendalikan pandemi Covid-19, Cina kembali melaporkan adanya kasus baru Covid-19. Pada 26 Juli lalu, Cina melaporkan adanya 61 kasus baru. Dari jumlah itu, 57 di antaranya adalah kasus penularan lokal. Sebelumnya, Cina melaporkan kasus harian Covid-19 sebanyak 46 kasus.

Selain ketiga negara di atas, beberapa negara lain juga menghadapi gelombang ketiga pandemi Covid-19, di antaranya Amerika Serikat, Inggris, Jepang. Pada Juli 2021, Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) sudah mengingatkan bahwa dunia telah memasuki serangan gelombang ketiga virus korona. Lonjakan

Cina, Jepang, Inggris, Amerika Serikat, berhasil menekan penyebaran virus korona, tetapi sekarang malah melaporkan adanya lonjakan kasus Covid-19. Negara-negara itu tengah menghadapi gelombang ketiga pandemi Covid-19. Lalu bagaimana dengan Indonesia?

Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito, menjelaskan tiga gelombang Covid-19. Gelombang pertama terjadi pada Januari 2021 sebagai puncak pertama. Kemudian gelombang kedua pada April 2021 sebagai puncak kedua. Gelombang ketiga pada Agustus – September 2021 sebagai puncak ketiga.

Menurut Wiku, vaksinasi tidak menjamin kasus Covid-19 terhenti atau berkurang. Contohnya, negara-negara yang sudah

di negara itu muncul kluster baru seperti kluster restoran, tempat makan di Bandara, tempat karaoke, mal, hingga terminal bus.

Tidak jauh berbeda, lonjakan kasus Covid-19 di Jepang disebabkan karena masyarakat cenderung berkerumun untuk menonton pertandingan (saat penyelenggaraan Olimpiade) di ruang publik seperti bar, kafe, atau restoran. Sedangkan di AS, lonjakan kasus Covid-19 kembali terjadi karena vaksinasi tidak dibarengi dengan pengawasan dan pelaksanaan protokol kesehatan yang baik.

Karena itu, Wiku Adisasmito mengingatkan agar Indonesia tidak boleh semata-mata bergantung pada efek vaksinasi. “Dengan adanya lonjakan kasus di berbagai negara dengan cakupan vaksinasi dosis pertama



Wiku Adisasmito

kasus positif Covid-19 sudah terlihat di beberapa negara, terutama sejak munculnya varian Delta yang bermula di India.

Secara global, kasus Covid-19 meningkat. Begitu pula dengan tingkat kematian yang kembali melonjak. Varian Delta adalah satu faktor utama meningkatnya penularan Covid-19. WHO mencatat varian Delta sudah ditemukan di lebih dari 111 negara. Atas dasar itu, WHO memperkirakan varian Delta menjadi varian virus korona yang dominan di seluruh dunia.

Indonesia

Banyak negara yang sebelumnya sempat sukses menangani wabah virus korona, tetapi kembali terjadi lonjakan kasus baru. Negara-negara seperti Singapura, Malaysia,

berhasil memperluas cakupan vaksinasi kepada penduduknya, toh tetap mengalami lonjakan kasus Covid-19 gelombang ketiga. Singapura, misalnya. Cakupan vaksinasi di Singapura sudah mencapai 79,12%. Contoh lain adalah Jepang. Angka vaksinasi di Jepang sudah mencapai 69,84%. Pun Amerika Serikat. Cakupan vaksinasi di negara Paman Sam itu sudah mencapai 63,04%. Demikian pula Inggris, yang vaksinasinya sudah mencapai 71,28%.

Mengapa negara-negara yang cakupan vaksinasi sudah tinggi masih mengalami lonjakan kasus Covid-19? Dalam kasus Singapura, Wiku menjelaskan, lonjakan kasus Covid-19 di Singapura disebabkan Singapura kurang fokus pada protokol kesehatan di tempat umum. Itu sebabnya,

yang tinggi, kita tidak boleh semata-mata bergantung pada efek vaksinasi. Kita tidak boleh berpuas diri dan merasa aman hanya dengan vaksin, terutama jika hanya vaksin dosis pertama,” katanya dalam konferensi pers pada Kamis, 13 September 2021.

Saat ini Indonesia baru berhasil melewati serangan pandemi Covid-19 gelombang kedua. Pandemi gelombang ketiga di Indonesia diprediksi baru akan terjadi pada Desember 2021. Karena itu, kita perlu terus waspada dengan cara melanjutkan PPKM, memperbanyak testing, memperbaiki tracing, dan terus menegakkan protokol kesehatan. Pemerintah pun harus membatasi pintu masuk bagi orang asing ke Indonesia. □

BSC



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Dr. Jazilul Fawaid Wakil Ketua MPR RI

Masyarakat Bisa Beradaptasi dengan Pandemi Covid-19

SEJAK awal Agustus 2021, penambahan kasus positif Covid-19 di Indonesia menunjukkan tren menurun atau melandai. Padahal, se-belumnya, kasus positif Covid-19 sempat melonjak dan mencapai rekor tertinggi pada 15 Juli 2021 dengan 56.757 kasus harian. Merujuk data Satgas Penanganan Covid-19, memasuki Agustus hingga September 2021, tren pertambahan kasus positif virus korona perlahan menurun.

Sejalan dengan penurunan kasus positif Covid-19, pemerintah melonggarkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Masyarakat seolah euforia dengan kasus Covid-19 melandai. Masyarakat mulai menjalankan kegiatan seperti biasa dengan syarat mematuhi protokol kesehatan. Wakil Ketua MPR, Dr. Jazilul Fawaid, menilai, masyarakat seperti euforia setelah lebih dari satu tahun terkungkung pandemi Covid-19.

Berikut ini ungkapan Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKB dalam wawancara dengan Majelis seputar tren penurunan kasus positif Covid-19. Petikannya.

Kasus positif Covid-19 di Indonesia mulai melandai sejak puncak kasus yang mencapai lebih dari 50.000 kasus positif per hari pada pertengahan Juli 2021. Pada September ini kasus positif Covid-19 turun di kisaran 2.000 kasus. Apa pendapat Bapak?

Sejak awal melanda Indonesia sampai saat ini, pandemi Covid-19 memang membuat semua pihak kesulitan, terutama karena membawa dampak yang luas hingga memporakporandakan berbagai bidang kehidupan, baik kesehatan masyarakat dan juga perekonomian.

Selama setahun lebih bangsa Indonesia terus disibukkan dengan pandemi ini. Tapi sebagai umat beriman, semestinyalah kita memahami bahwa pandemi ini adalah ujian dari Allah SWT. Selain bersabar, kita berupaya semaksimal mungkin untuk keluar dari masalah ini.

Alhamdulillah, saat ini kasus positif Covid-19 sudah menunjukkan penurunan. Tren positif tersebut mesti dijaga, jangan sampai melonjak lagi sehingga bangsa ini bisa fokus untuk *me-recovery* dampak pandemic, seperti membangun kembali ekonomi rakyat.

Apakah bisa dibilang pandemi Covid-19 sudah terkendali? Pemerintah telah berhasil mengendalikan pandemi Covid-19?

Upaya pemerintah untuk mengendalikan pandemi ini sangat keras, seperti melakukan sosialisasi protokol kesehatan antara lain memakai masker, mencuci tangan, minum vitamin, menjaga kesehatan diri, keluarga dan lingkungan, kebijakan PPKM, sampai mengupayakan vaksinasi kepada seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah mengimbau rakyat untuk vaksinasi agar *herd immunity* bisa tercapai sehingga terbentuk kekebalan komunal terhadap virus.

Melihat upaya keras pemerintah dan penyebaran pandemi yang melandai saat ini, saya kira kita patut memberikan apresiasi kepada semua pihak. Tetapi kita tidak boleh lengah karena virus ini masih ada dan belum hilang sama sekali. Untuk itu, sekali lagi kita jangan lengah. Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat harus bersinergi, bahu membahu menghadapi bencana yang menjadi musuh kita bersama ini.

Masyarakat pun sudah berani bergerak. Ada euforia di tengah masyarakat.

Pemerintah memberi kelonggaran-kelonggaran sesuai level PPKM. Roda ekonomi bergulir. Sekolah mulai pembelajaran tatap muka. Bagaimana Bapak melihat fenomena ini?

Kita semua sudah lama terkungkung pandemi ini. Ketika pemerintah melonggarkan kebijakan PPKM karena melihat penurunan penyebaran pandemi, saya pikir wajar masyarakat ber-euforia dengan kembali melaksanakan berbagai kegiatan yang sebelumnya tertunda atau berhenti sama sekali, terutama kegiatan ekonomi dan juga sekolah-sekolah. Kalau masyarakat tidak segera bergerak melakukan kegiatan ekonomi, lalu bagaimana mereka memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya?

semangat dan tenaga baru bagi kita untuk menghadapi masalah apapun yang melanda negara kita.

Tetapi masih ada kekhawatiran terjadinya gelombang ketiga pandemi karena masih adanya varian baru Covid-19, seperti varian MU yang lebih ganas dibanding varian Delta. Bagaimana mengantisipasi kemungkinan terjadinya gelombang ketiga pandemi Covid-19?

Itulah, seperti yang sudah saya sampaikan, kita boleh euforia, boleh bersuka cita, dan bersyukur kepada Allah SWT, namun kita tidak boleh lengah sedikit pun. Pemantauan mesti terus dilakukan untuk menjaga kemungkinan terburuk dengan

kesehatan tubuh, berpikir positif. Saya melihat masyarakat sudah bisa beradaptasi selama setahun lebih pandemi ini. Adaptasinya sangat baik. Yang harus digencarkan lagi dalam tataran implementasi adalah saling membantu satu sama lain, gotong royong, tepo seliro, dan saling menguatkan

Apa saran atau masukan dari Bapak agar masyarakat bisa hidup new normal berdampingan dengan Covid-19?

Sekali lagi jalani hidup dengan sewajarnya saja. Ini perlu kesungguhan dengan menerapkan aturan yang sifatnya memutus mata rantai penyebaran Covid-19.



Untuk itu kita saat ini perlu kembali memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur bangsa, antara lain gotong royong. Kata gotong royong adalah kata-kata sakti asli Indonesia, warisan, dan tradisi khas Indonesia. Kita hidupkan lagi nilai luhur bangsa itu saat ini. Sebab nilai luhur bangsa itu berdampak luar biasa. Contohnya sudah ada, yakni bagaimana para pendiri bangsa dan pejuang kita dengan senjata bambu runcing dan semangat gotong royong berhasil mengalahkan penjajah Belanda yang memiliki senjata militer yang canggih.

Nah, semestinya di era sekarang kita menunjukkan kepada para pendiri dan pejuang bangsa bahwa dengan gotong royong kita mampu mengalahkan pandemi ini seperti mereka mengalahkan penjajah. Nilai gotong royong akan memberikan

varian yang lebih ganas.

Bahkan pandemi Covid-19 diperkirakan akan menjadi endemi. Covid-19 tetap ada dan masyarakat hidup berdampingan dengan Covid-19. Bagaimana Bapak melihat kesiapan masyarakat hidup berdampingan dengan Covid-19?

Kalau memang pandemi ini menjadi endemi dan kita mesti hidup berdampingan maka kita harus menjalani hidup dengan sewajarnya, tidak perlu takut berlebihan yang justru akan menurunkan imunitas tubuh. Ketakutan berlebihan akan berdampak buruk kepada hubungan sosial, misalnya terbiasa tidak berjabat tangan, pembatasan kegiatan, menjauhi teman, saudara atau keluarga kita yang terkena virus.

Kita jalani hidup dengan sewajarnya saja, namun tetap waspada, antara lain menjaga

Bagaimana dengan program vaksinasi massal, karena masih ada orang yang enggan divaksinasi dan apakah herd immunity atau kekebalan komunal bisa tercapai?

Tujuan pemberian vaksin, salah satunya adalah upaya besar untuk memutus mata rantai penyebaran virus korona untuk mencapai kekebalan komunal. Bila terjadi kekebalan komunal maka pandemi akan semakin melandai, sehingga kegiatan ekonomi kembali berjalan normal. Upaya ini kembali kepada rakyat juga.

Lagi pula vaksin itu sekarang mudah dan gratis hanya menunjukkan KTP saja. Melalui program vaksinasi kita harapkan herd immunity bisa tercapai. Karena itu, diperlukan dukungan aktif seluruh elemen masyarakat. Mudah-mudahan pandemi ini akan segera berakhir. □

Terima Dubes Libya untuk Indonesia

Bamsoet **Dorong** Peningkatan Kerjasama Ekonomi



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, dan Duta Besar Libya untuk Indonesia, Mr. Zakarya MM El Maghrabi, sepakat meningkatkan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Libya.

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo bersama Duta Besar Libya untuk Indonesia, Mr. Zakarya MM El Maghrabi sepakat meningkatkan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Libya. Terhadap berbagai hambatan yang terjadi, keduanya menekankan agar diselesaikan secara kekeluargaan melalui konsultasi dan negosiasi. Sejalan dengan hubungan persahabatan dan sikap saling dukung pemerintah kedua negara yang sudah terjalin selama 30 tahun, sejak 17 Oktober 1991.

“Karenanya, menyangkut permasalahan Pertamina dengan National Oil Company Libya (NOC Libya) terkait kerjasama eksplorasi minyak bumi di Block 17.3 (offshore Sabratah) dan Blok 123.3 (onshore Sirte) yang ditandatangani pada 10 Desember 2005, kita mendorong bisa diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Mengingat terhentinya proyek eksplorasi tersebut salah satunya disebabkan gejolak politik dan keamanan Libya,” ujar Bamsoet usai menerima Duta Besar Libya untuk Indonesia Mr. Zakarya MM El Maghrabi, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, di Jakarta, Rabu (22/9/21).

Sehubungan dengan itu, lanjut Bamsoet,

sangat penting bagi Pertamina dan NOC Libya untuk duduk bersama, mencari solusi terbaik agar keduanya bisa saling diuntungkan.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, akibat konflik dan pemblokiran sejumlah terminal minyak penting di Libya oleh pihak-pihak yang bertikai, menyebabkan hubungan perdagangan antara Indonesia dengan Libya sempat menurun. Secara rata-rata, selama periode 2016 hingga 2020 terjadi penurunan tren perdagangan sebesar minus 32,08%. Nilai perdagangan tertinggi antara Indonesia dan Libya tercatat pada 2012





mencapai US\$ 576,5 juta.

“Selain menawarkan kerjasama eksplorasi minyak bumi di berbagai block lainnya, Libya juga sangat terbuka terhadap peningkatan kerjasama ekonomi di berbagai bidang. Salah satunya, Libya tertarik untuk take over kredit pesawat dari Garuda maupun Lion Air untuk memperkuat armada maskapai mereka,” jelas Bamsoet.

Kepala Badan Penegakan Hukum, Keamanan, dan Pertahanan KADIN Indonesia ini menerangkan, Indonesia bisa menjadikan Libya sebagai salah satu pintu masuk dalam memperluas pasar komoditas unggulan Indonesia mencapai Eropa. Mengingat letak geografis Libya sangat strategis, sekitar satu jam penerbangan ke Italia dan berbagai negara Eropa lainnya.

“Komoditi utama ekspor Indonesia ke Libya antara lain plywood, karet, besi, dan baja, sabun, glassware, kertas, furniture, rempah-rempah, dan alas kaki. Sedangkan produk yang potensial untuk dikembangkan, antara lain teh, kopi, produk makanan, barang dari plastik, farmasi, kertas stationeries, elektronik,



minyak nabati, suku cadang mobil, dan produk mesin,” terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, investasi langsung (FDI) Libya ke Indonesia tercatat sebesar US\$ 15 juta oleh PT. Solar Sahara Investment (PT. SSI) dalam bentuk pendirian pabrik ban dalam, pabrik pipa PVC, dan proyek pembiakan ikan laut di Bali. Pemerintah Indonesia juga bisa menawarkan kepada Libya untuk menaikkan nilai investasinya, seiring dengan banyaknya peluang kerjasama yang bisa digarap. Baik

dari sektor infrastruktur, telekomunikasi hingga pertanian.

“Kita berharap, Pertamina bisa segera menyelesaikan persoalan dengan NOC Libya dan saya juga menyambut hangat permintaan Libya agar Indonesia bisa mengirimkan perawat untuk bekerja di sana. Selain membuktikan bahwa perawat Indonesia memiliki kualitas yang baik, tawaran tersebut juga semakin merekatkan hubungan people to people contact antara Indonesia dengan Libya,” pungkas Bamsoet. □

Perpres Dana Abadi Pesantren

HNW Sampaikan Tiga Catatan Kritis

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 resmi ditandatangani Presiden Jokowi. Diharapkan, masa depan pendidikan pondok pesantren jauh lebih baik dari sebelumnya.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI Dr. HM. Hidayat Nur Wahid, MA., menyampaikan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo yang menandatangani Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Dana Abadi).

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 merupakan aturan lanjutan dari UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (pasal 49 ayat 2) yang juga telah mendapatkan dukungan terbuka dari PB Nahdlatul Ulama, Partai Kebangkitan Bangsa, PPP, dan Partai Solidaritas Indonesia.

Hadirnya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 diharapkan masa depan ponpes semakin baik. Apalagi, pasal 23 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2019 menyatakan, Dana Abadi Pesantren bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan pesantren.

Lembaga pendidikan ini terus berkembang.

Berdasarkan data Pontren Kemenag, hingga saat ini, jumlahnya mencapai 27.722 pesantren. Dengan keluarnya Perpres Dana Abadi Pesantren maka Pemerintah sudah membuat Peraturan turunan yang legal untuk melaksanakan UU Pesantren. Antara lain, untuk merealisasikan bantuan pendanaan pesantren bersifat abadi, hingga masa yang akan datang.

PKS, menurut Hidayat, akan bersama umat mengawal agar tujuan untuk membantu pesantren bisa dilaksanakan secara adil dan amanah. Sehingga Perpres bisa membantu pesantren sebagaimana harapan dunia pesantren dan para ulama pengasuh ponpes sesuai ketentuan UU.

Hidayat, yang bisa disapa HNW, mengingatkan, jangan sampai aturan ini hanya memberikan harapan tanpa perwujudan, apalagi menghadirkan ketidakadilan. Atau malah menyulitkan pesantren dan para kiaiinya, sebagaimana dikhawatirkan oleh sebagian pesantren dan kiai.

“Kami apresiasi pemerintah menindaklanjuti UU Pesantren dengan mengeluarkan Perpres Dana Abadi Pesantren. Ada beberapa catatan penting, khusus terkait pasal 23 dan pasal 25 pada Perpres tersebut”, ungkap HNW dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (14/9/2021).

Catatan kritis yang disampaikan politisi PKS ini adalah: *Pertama*, pasal 23 ayat (1) menyebutkan, Dana Abadi Pesantren merupakan bagian dari Dana Abadi Pendidikan. Sementara Dana Abadi Pendidikan dibiayai dari alokasi 20% APBN untuk sektor Pendidikan. Oleh karena itu, HNW mewanti-wanti, munculnya alokasi anggaran untuk Dana Abadi Pesantren tidak mengurangi anggaran program bantuan pesantren yang sudah ada, yang dikelola melalui Kementerian Agama.

Kedua, implikasi dari pasal 23 ayat (1) adalah Dana Abadi Pesantren sebagai bagian dari Dana Abadi Pendidikan dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Berdasarkan pasal 9 ayat (1) Perpres Nomor 12 Tahun 2019 tentang Dana Abadi Pendidikan, disebutkan bahwa LPDP sebagai pengelola bisa menginvestasikan dana tersebut pada berbagai instrumen/portofolio. HNW mengingatkan pemerintah agar memastikan bahwa hasil pengembangan Dana Abadi Pendidikan yang dialokasikan untuk pesantren harus berasal dari investasi yang dibenarkan oleh Dunia Pesantren, yaitu investasi yang sesuai dengan Syariah.

Ketiga, soal pasal 23 ayat (3) yang menyebutkan bahwa alokasi dana pemanfaatan untuk pesantren mengikuti prioritas dari Dana Abadi Pendidikan. Hidayat yang merupakan alumnus pondok Pesantren Gontor ini juga berharap, pesantren mendapatkan prioritas yang proporsional dengan sektor penerima manfaat lainnya. Tidak justru dipinggirkan apalagi sampai diakhirkan. □

MBO

Webinar LHKP PP Muhammadiyah

Sepakat Pentingnya Indonesia Miliki PPHN

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, kembali menegaskan bahwa pemilihan Ketetapan MPR sebagai bentuk hukum yang ideal bagi PPHN mempunyai konsekuensi adanya amandemen terbatas, sekurang-kurangnya berkaitan dengan dua pasal dalam konstitusi.

KETUA MPR RI, Bambang Soesatyo, bersama Ketua Bidang Hukum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, dan Ketua Fraksi Partai Demokrat, Benny Harman, sepakat tentang pentingnya Indonesia memiliki Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai bintang penunjuk arah pembangunan.

MPR RI melalui Badan Pengkajian bekerjasama dengan Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI serta melibatkan pakar/akademisi dari berbagai disiplin ilmu, termasuk Lembaga Negara dan Kementerian Negara, sedang menyelesaikan Rancangan PPHN berikut naskah akademiknya. Ditargetkan pada awal tahun 2022 sudah selesai.

Badan Pengkajian MPR RI juga telah melakukan kajian tentang pilihan bentuk hukum PPHN, yakni bisa dimasukkan dalam konstitusi, dalam bentuk Ketetapan MPR, ataupun undang-undang. Paling ideal, menurut laporan Badan Kajian MPR yang disampaikan pada pimpinan MPR pada Januari 2021, dilakukan dalam bentuk Ketetapan MPR. Bukan melalui undang-undang yang masih dapat diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

"Juga bukan diatur langsung dalam konstitusi, karena PPHN adalah produk kebijakan yang berlaku periodik, dan disusun berdasarkan dinamika kehidupan masyarakat, serta bersifat direktif, tidak normatif seperti halnya konstitusi. Maka, materi PPHN tidak mungkin dirumuskan dalam satu pasal atau satu ayat saja dalam konstitusi," ujar Bamsoet dalam Webinar yang diselenggarakan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah, secara virtual dari Bali, Senin (13/9/21).

Turut hadir, antara lain: Ketua LHKP PP Muhammadiyah, Yono Reksoprodjo; Wakil Sekretaris LHKP PP Muhammadiyah, Titi Anggraini; Peneliti Senior LIPI, Siti Zuhro; dan Peneliti Senior Pusat Kajian Konstitusi dan Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Jakarta, Iwan Satriawan.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, pemilihan Ketetapan MPR sebagai bentuk hukum yang ideal bagi PPHN mempunyai konsekuensi adanya amandemen terbatas, sekurang-kurangnya berkaitan dengan dua pasal dalam konstitusi. Antara lain, penambahan ayat pada Pasal 3 yang memberi kewenangan kepada MPR untuk mengubah dan menetapkan PPHN, serta penambahan ayat pada Pasal 23 yang mengatur kewenangan DPR untuk menolak RUU APBN yang diajukan Presiden apabila tidak sesuai PPHN.

"Kekhawatiran amandemen terbatas akan membuka kotak pandora dan membuka peluang dilakukannya amandemen pada substansi lain di luar PPHN, juga tidak beralasan dan terlalu premature. Proses panjang amandemen sudah diatur dalam ketentuan Pasal 37 ayat 1-3 UUD NRI Tahun 1945. Ayat 1 menjelaskan, usul perubahan pasal-pasal konstitusi dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR, sekitar 237 dari 711 jumlah anggota

MPR, dan pengambilan keputusan harus memenuhi quorum 2/3 anggota MPR yang terdiri dari 9 Fraksi di DPR dan 136 anggota DPD," jelas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPP dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, di ayat 2 dijelaskan bahwa setiap usul perubahan pasal-pasal konstitusi harus diajukan secara tertulis dan ditujukan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Sedangkan di ayat 3, dijelaskan untuk mengubah pasal-pasal konstitusi, sidang MPR harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR, sekitar 474 dari 711 anggota MPR.

Sementara di ayat 4 dijelaskan, putusan mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR, sekitar 357 dari 711 anggota MPR.

"Sehingga tidak mungkin ada penumpang gelap di luar PPHN. Seperti untuk mengubah periodisasi masa jabatan kepresidenan menjadi 3 periode," pungkas Bamsoet. □

Diskusi Empat Pilar MPR

Amandemen UUD Tak Boleh untuk Kepentingan Politik Jangka Pendek

Amandemen UUD sah-sah saja jika rakyat menghendaki, termasuk amandemen UUD NRI Tahun 1945 untuk menghadirkan kembali haluan negara.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR, H. Asrul Sani, SH., M.Si., mengungkapkan bahwa UUD NRI Tahun 1945 harus diperlakukan sebagai 'The Living Constitution' atau konstitusi yang hidup. Artinya, konstitusi bisa dilakukan perubahan atau tidak sesuai keperluan dan keinginan rakyat.

Contohnya, kini sedang hangat wacana tentang perlunya amendemen UUD NRI Tahun 1945 untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Itu boleh boleh-boleh saja jika rakyat menghendaki dan memang jika berdampak baik. "Yang tidak boleh adalah proses amendemen itu dilakukan dan digunakan untuk kepentingan politik jangka pendek, apalagi kepentingan politik kelompok tertentu," kata Asrul Sani.

Asrul Sani menyampaikan hal itu dalam Diskusi Empat Pilar MPR di Media Center Parlemen, Lobi Gedung Nusantara I, Kompleks MPR/DPR Senayan, Jakarta, Senin (6/9/2021). Diskusi yang diselenggarakan oleh Biro Humas dan Sistem Informasi, Setjen MPR, bekerjasama dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen.

Selain menghadirkan Asrul Sani, diskusi bertema: 'Evaluasi Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 dalam Mencapai Cita-Cita Bangsa,' itu juga menghadirkan pembicara lainnya, yakni: Wakil Ketua MPR RI, Dr. H. Sjarifuddin Hasan, SE., MM., MBA., dan pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago, serta diikuti oleh para awak media massa

cetak, elektronik dan online.

Pimpinan MPR dari unsur Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menjelaskan, MPR sangat berhati-hati dalam menyikapi wacana tersebut sejak pertama kali digulirkan melalui rekomendasi yang diterima oleh MPR periode 2019-2024 dari MPR periode 2014-2019. Rekomendasi itu, antara lain terkait dengan





perlu menghadirkan haluan negara (PPHN).

“Mengapa kami sangat hati-hati, sebab di MPR periode lalu ada dinamika soal PPHN ini, yaitu ada tujuh raksi plus Kelompok DPD menyetujui PPHN dengan payung hukum TAP MPR, dan ada 3 Fraksi menyetujui PPHN, namun dengan payung UU. MPR periode sekarang pun ada perbedaan pendapat di tengah masyarakat tentang perlu tidaknya amandemen terbatas UUD NRI Tahun 1945 dalam menetapkan payung hukum PPHN,” katanya.

Kepada masyarakat agar bisa lebih memahami terkait amandemen, Arsul Sani menginformasikan, amandemen hanya bisa terwujud melalui aturan dan prosedur yang ditetapkan Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945. Di mana pada salah satu ayat, yaitu ayat (1) berbunyi, ‘Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis

Permusyawaratan Rakyat’.

“Di MPR, sampai saat ini usul tersebut belum ada. Saya sendiri berharap agar PPHN jika memang baik untuk rakyat Indonesia dan sebagai jalan memperlancar perjalanan bangsa ini menuju cita-cita Indonesia yang maju dan sejahtera, mesti mendapat dukungan. Arah ke sana sudah terlihat dengan banyak yang sepakat soal PPHN-nya. Tinggal bagaimana mencari jalan tengah untuk pembahasan payung hukumnya. Rakyat mesti bersabar, sebab saat ini negara dan kita semua sedang fokus mengatasi pandemi Covid-19,” tandasnya.

Perlu Kajian Mendalam

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Dr. H. Sjarifuddin Hasan, SE., MM., MBA., memastikan bahwa sampai saat ini, MPR RI belum memutuskan apapun terkait amandemen UUD NRI Tahun 1945. Ini menjawab pertanyaan berbagai pihak, perihal wacana yang masih hangat bergulir tentang memunculkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN)

melalui amandemen.

“Kabar terbaru yang bisa saya sampaikan, sesuai hasil Rapat Pimpinan MPR terakhir, adalah MPR masih akan terus melakukan kajian secara mendalam karena banyak aspek yang harus dipertimbangkan,” ujarnya.

Lebih jauh Syarif Hasan menekankan, ketelitian dalam melakukan kajian perlu diperhatikan. Sebab, MPR sangat memahami bahwa wacana ini jika terwujud, akan sangat besar manfaatnya untuk bangsa. “Jadi intinya, karena PPHN ini untuk rakyat maka dibutuhkan konsentrasi dalam menyikapi dan mengelolanya,” tambahnya.

Kesepakatan Pimpinan MPR selanjutnya, lanjut Syarif Hasan, setelah selesai melakukan pendalaman dan keluar hasilnya maka langkah berikutnya adalah melakukan sosialisasi, dengan maksud mendapatkan respon balik dari rakyat. “Rakyat atau siapapun itu kami berikan hak yang sama untuk memberikan pandangannya,” ucapnya.

Pandangan rakyat, bagi Syarif Hasan, sangat penting sebab, karena MPR tidak menginginkan karena wacana ini di tengah masyarakat terjadi pro kontra semakin tajam, sehingga rakyat terkotak-kotak, terbelah, yang pada ujungnya mengancam persatuan bangsa. “Wacana ini juga jangan sampai menghabiskan energi bangsa yang semestinya digunakan untuk memikirkan penyelesaian pandemi Covid-19 yang sampai saat ini belum kunjung usai,” imbuhnya.

Untuk itu, Syarif Hasan mengajak seluruh elemen bangsa untuk mendukung langkah-langkah MPR ini. “Kami di MPR akan berusaha semaksimal mungkin agar apapun hasil kajian dan keputusannya berdampak baik untuk semua,” tegasnya. □

DER



Pusat Isoman Pesantren NU

Wujud Pemerintah Hadir untuk Umat

Wakil Ketua MPR RI, Dr. Ahmad Basarah, pembangunan ruang isolasi mandiri di tujuh pondok pesantren NU jelas merupakan wujud nyata dari gotong royong yang menjadi saripati nilai-nilai Pancasila.



WAKIL Ketua MPR yang juga menjabat Wakil Ketua Pengurus Pusat Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (PP LAZISNU) PBNU, Ahmad Basarah, menegaskan bahwa pembangunan pusat isolasi mandiri di tujuh pesantren NU adalah wujud kehadiran pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin untuk umat. Dia menegaskan hal itu saat memberikan sambutan pada acara diresmikannya ruang isolasi Covid-19 di tujuh pondok pesantren NU dari berbagai daerah, Jumat (24/9/21).

"Pembangunan ruang isolasi mandiri di tujuh pondok pesantren ini jelas merupakan wujud nyata dari gotong royong yang menjadi saripati nilai-nilai Pancasila. Ini bukti pemerintah hadir untuk umat, sebab sesuai undang-undang perhajian, keuntungan dari dana haji benar-benar digunakan untuk kemaslahatan umat Islam, bukan untuk yang lain," jelas Ahmad Basarah yang juga dosen Universitas Islam Malang itu.

Sebagai wujud gotong-royong keumatan, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan NU Care-Lazisnu membangun ruang-ruang isolasi mandiri di tujuh pesantren di Jakarta dan luar Jakarta. Ketujuh pondok pesantren itu, masing-masing: Pondok Pesantren Luhur Al Tsaqafah di Jakarta Selatan, Pondok Pesantren Fauzan Garut (Jawa Barat), Pondok Pesantren Khas Kempek Cirebon

(Jawa Barat), Pondok Pesantren Al Ihya Ulumuddin, Cilacap (Jawa Tengah), Pondok Pesantren Maslakul Huda Pati (Jawa Tengah), Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading Malang (Jawa Timur), dan Pondok Pesantren Fathul Ulum Kewagean Kediri (Jawa Timur).

Menurut Ahmad Basarah, program gotong-royong keumatan itu dilakukan dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji. "Sesuai amanat Pasal 1 ayat 2 UU ini, dana haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat islam," jelas Ahmad Basarah.

Ahmad Basarah yang juga menjabat Sekretaris Dewan Penasihat Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) menjelaskan, berdasar data Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), hingga akhir Agustus 2021, ada 723 kiai di Indonesia meninggal dunia akibat terinfeksi virus korona (Covid-19). Sedangkan data resmi Asosiasi Pesantren Nahdlatul Ulama atau Rabithah Ma'had Islamiyah PBNU menyatakan, per 27 Desember 2020 baru ada 234 kiai dan tokoh NU meninggal dunia

akibat Covid-19.

"Itu berarti terjadi peningkatan 200%. Karena itu, kerjasama dan gotong royong ini sangat bermanfaat untuk ikhtiar mencegah korban Covid-19 yang lainnya. Kendati pembiayaan fasilitas ruang isolasi Covid-19 di tujuh pesantren ini dibiayai oleh dana haji, pendanaan ini harus kita yakini halal karena dilakukan dengan cara yang benar, sebab undang-undang memang menyatakan dan mengaturnya demikian," tandas Ahmad Basarah

Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu menguraikan, Pasal 10 Huruf G Undang-undang Perhajian itu jelas memberi amanat kepada BPKH agar menggunakan keuangan haji untuk banyak sektor, antara lain kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam. Dengan demikian, program ini layak dicontoh karena tujuan program ini adalah tersedianya fasilitas yang layak untuk mendukung pelayanan kesehatan, khususnya penanganan Covid-19 bagi peserta didik/santri di pondok pesantren.

Kehadiran pemerintah dalam bentuk pembangunan pusat isolasi mandiri Covid-19 di tujuh pesantren itu disambut baik oleh para kiai pesantren yang hadir secara virtual dalam acara peresmian itu. Menurut KH Abdul Ghofarrozin, pengasuh Pondok Pesantren Maslakul Huda Pati, Jawa Tengah, ia awalnya

menolak bantuan tapi berubah pikiran saat menilai sisi baik dari bantuan ini.

“Jika saya terima bantuan, itu berarti saya membenarkan bahwa santri-santri saya akan kena Covid-19. Tapi, setelah saya pelajari, bantuan ruang isolasi Covid-19 ini harus diterima sebab Islam mengajarkan kita harus siap-siap sebelum musibah datang. Tentu saya dan semua santri senang atas bantuan pemerintah ini,” jelas KH Abdul Ghofarozin.

Sementara itu, Rahmat Hidayat, anggota Bidang Kesekretariatan Badan dan Kemasyarakatan BPKH, menjelaskan bahwa mengelola dana umat adalah amanat yang berat. Sekali tujuan pengelolaan salah diterapkan, taruhannya adalah risiko kehancuran umat.

“Jadi, tiga hal penting mengelola keuangan haji harus terus kami pegang, yakni kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas

dan efisiensi penggunaan biaya penyelenggaraan ibadah haji, dan manfaat bagio kemaslahatan umat Islam,” jelas Rahmat Hidayat yang hadir secara virtual.

Sebagai penutup, Ahmad Basarah memberi apresiasi kepada Lembaga NU Care yang telah memiliki jaringan pelayanan dan pengelolaan ZIS di 12 negara. Di dalam negeri, NU Care tersebar di 34 Provinsi dan 376 Kabupaten/Kota. □

Menistaan Agama

HNW Kutuk Lembaran Alquran Jadi Petasan

Penistaan terhadap agama Islam kembali terjadi. Kali ini, lembaran Kitab Suci Alquran digunakan sebagai pembungkus dan bahan petasan.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA., mengutuk keras penggunaan lembaran Alquran sebagai pembungkus dan bahan petasan. Hidayat sepakat dengan MUI dan Muhammadiyah, peristiwa yang terjadi di Ciledug, Tangerang, itu merupakan perbuatan penistaan terhadap Alquran, kitab suci umat Islam.

Karena itu, menurut Hidayat, kasus tersebut perlu diusut tuntas, dan diberi sanksi hukum yang tegas agar tak berulang. Apalagi, kasus ini sempat viral di medsos, dan itu menunjukkan bahwa peristiwa tersebut sudah jadi perhatian publik.

Berulangnya penistaan terhadap agama dan simbol semua agama yang diakui di Indonesia membuktikan perlunya instrumen hukum bersifat *lex specialis*. Yaitu, instrumen hukum yang bisa melindungi simbol agama-agama di Indonesia agar tidak terjadi pengulangan penistaan agama, tokoh agama ataupun simbol-simbol agama.

Saat ini, kata Hidayat yang biasa disapa HNW, instrumen hukum yang tersedia belum menimbulkan efek jera kepada pelaku penistaan terhadap agama Islam dan simbolnya, sehingga masih terus terjadi. Bahkan, ada tokoh Budha yang heran dengan terus terjadinya penistaan terhadap Agama Islam (simbol) di Indonesia, Negara

Pancasila, yang mayoritas warganya justru beragama Islam.

“Selain dijadikan sebagai bungkus petasan, agama Islam juga beberapa kali menjadi bahan lawakan. Itu terjadi karena permisifnya publik dan tidak ada sanksi hukum yang tegas, sehingga para penista agama serta simbol agama mengira mereka tidak melakukan pelanggaran hukum, sehingga nista itu terulang lagi dan lagi,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Senin (13/9/2021).

Selama ini, kata HNW, penistaan agama kerap kali diusut dengan UU PNPS No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Atau Pasal 156s KUHP dengan ancaman maksimal 5 tahun. “UU tersebut hanya terdiri dari 5 pasal, jadi tidak secara komprehensif mengatur perlindungan terhadap agama atau simbolnya seperti rumah Ibadah maupun Kitab Suci,” ujarnya.

Oleh karena itu, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini mengingatkan agar DPR RI menyiapkan RUU Pelindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama (RUU PTASA). Nantinya, RUU PTASA ini diharapkan menjadi salah satu upaya memberikan perlindungan terhadap semua Agama.

“Ini seharusnya menjadi prioritas DPR agar segera diundangkan. Supaya kejadian penistaan Agama dan Simbol Agama yang meresahkan masyarakat tidak terulang lagi,” ujarnya.

Dalam draft RUU PTASA itu, menurut HNW,

dijelaskan secara rinci simbol-simbol agama yang diakui oleh Negara Indonesia, dan dihormati oleh pemeluk-pemeluknya. Tujuannya adalah selain memberikan kepastian hukum, juga memberi pemahaman terhadap masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran hukum berupa penistaan Agama. Dan, supaya Agama dan Simbol Agama yang terkait dengan sila I Pancasila dan Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 bisa dihormati dan dijaga.

“Selain memberikan sanksi lebih keras, juga ada upaya preventif berupa edukasi kepada masyarakat untuk menghormati simbol semua Agama. Sehingga tidak menjadi bahan penistaan, lawakan atau hal lain yang tidak meletakkannya pada posisi yang dihormati. Agar tercipta kondisi yang lebih kondusif untuk merawat toleransi dan harmoni juga kokoh kuatnya kedaulatan NKRI,” tuturnya. □

MBO

Usut Kasus Penyerangan Tokoh Agama

Wakil Ketua MPR RI, Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA., mendorong dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk menyelidiki teror penyerangan ulama dan penodaan simbol agama yang terus terjadi di Indonesia. Hidayat menilai penyerangan terhadap ulama dan penodaan simbol agama yang terus terjadi sebagai peristiwa yang ganjil. Pasalnya, peristiwa tersebut terjadi di negara yang telah mendeklarasikan diri sebagai negeri hukum, mayoritas mutlak penduduk dan pejabatnya beragama Islam.

Kasus terbaru, terjadi pada Ahad (19/9/2021), sehabis salat Maghrib. Seorang Ustad di Tangerang ditembak hingga wafat oleh orang tidak dikenal. Lalu, pada Senin (20/9/2021) siang ba'da dhuhur, seorang ustad yang sedang mengisi kajian di dalam masjid di Batam, dikejar dan diserang oleh orang yang ngaku sebagai Komunis.

HNW, sapaan akrab Hidayat Nur Wahid, mengatakan, penembakan atau penyerangan terhadap tokoh Agama tersebut bukan yang pertama kali. Melainkan telah berulang kali terjadi selama dua tahun terakhir. “Ini yang harus diselidiki secara komprehensif terkait motif dan penerapan hukum dari peristiwa-peristiwa yang meresahkan warga dan umat. Apalagi,

pelaku penyerang ustad di Batam di bulan September ini, saat diperiksa oleh polisi, menyatakan dirinya sebagai komunis,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Senin (20/9/21).

Lebih lanjut, HNW mencatat, ada lebih dari sepuluh kasus penyerangan dan teror terhadap tokoh agama dan rumah ibadah dalam kurun dua tahun terakhir. Beberapa di antaranya adalah penusukan ulama, penyerangan penceramah, penganiayaan imam masjid (saat salat subuh dan isya'), pelemparan bom molotov ke masjid, vandalisme di mushola, dan berbagai perusakan serta penistaan simbol agama lainnya. “Itu



perlu diusut secara tuntas, apakah ada kaitannya satu sama lain? Bagaimana vonis hukumnya?,” ujarnya.

HNW mengingatkan umat dan para tokoh agama untuk makin waspada, tapi jangan sampai terprovokasi. Karenanya, diperlukan penegakan hukum melalui aturan hukum yang khusus (*lex specialis*). Selain itu, fenomena berulangnya kasus ini juga harus diselidiki secara mendalam. Tak terkecuali, kasus terakhir penembakan seorang ustad di Tangerang, dan penyerangan ustad di Batam.

“Memang ada pelaku yang diproses

secara hukum dan divonis pengadilan, tapi vonis tidak memberikan efek jera. Apalagi beberapa kasus dihentikan karena pelaku dinyatakan mengalami gangguan jiwa. Tapi, pengakuan penyerang ustad di Batam bahwa dirinya komunis, di tengah kewaspadaan umat soal bulan September dan kejahatan PKI terhadap NKRI dan Pancasila dan umat Islam, perlu diusut yang lebih serius,” ujarnya.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai, perlu penelusuran yang lebih mendalam dan komprehensif, bagaimana rangkaian peristiwa tersebut bisa terjadi. “Ada yang sebut itu suatu kebetulan. Tapi, sangat langka sekali bagaimana suatu kebetulan bisa terus berulang dengan modus korban yang sejenis (tokoh Agama Islam, ustad/masjid/mushola) dan pelakunya juga sejenis (diklaim gangguan jiwa). Apalagi bila dirujuk pernyataan mantan Kepala BIN Sutiyoso bahwa tidak mungkin hal seperti itu berulang kecuali ada faktor pengendalinya,” tambahnya.

Oleh karena itu, HNW menilai, pembentukan Pansus yang melibatkan Komisi VIII yang membidangi urusan keagamaan dan Komisi III yang membidangi urusan hukum di DPR merupakan langkah yang perlu diambil. Hal ini perlu dilakukan agar tidak menimbulkan keresahan dan ketakutan di masyarakat dan tokoh Agama, terkait rangkaian peristiwa semacam itu yang terus terjadi. Dan, juga sebagai bentuk pertanggungjawaban DPR sebagai Wakil Rakyat dalam mengkritisi kewajiban negara untuk menegakkan hukum yang adil dan benar. Agar Negara benar-benar melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Konstitusi. Yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia, termasuk tokoh dan simbol agama.

“Pansus itu dibutuhkan dalam rangka DPR laksanakan amanat rakyat, serta hak pengawasan terhadap eksekutif dalam kewajiban penegakan hukum dan perlindungan terhadap rakyat, termasuk para tokoh Agama, seperti ulama/ustadz dan simbol agama. Bagaimana menghentikannya, dan apa solusinya agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi. Itu yang penting kita selesaikan bersama di DPR, sebagai realisasi laksanakan Amanat sebagai wakil rakyat,” pungkasnya. □

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid

Santri Punya Trah Menjadi Pemimpin

SAYA ingin menyampaikan kepada para santri bahwa santri punya hak untuk menjadi pemimpin. Di negeri ini, saya katakan pesantren, santri, pertama punya trah keilmuan. Namanya juga santri, ulama, jangan sampai para santri kehilangan trah keilmuannya. Santri kok nggak pintar, nggak punya ilmu, ya bukan santri, utamanya ilmu agama,” ujar Gus Jazil—sapaan akrab Jazilul Fawaid— saat melakukan Dialog Kebangsaan di Pondok Pesantren Bina Insan

khususnya KH Hasyim Asy’ari, mengeluarkan fatwa wajib hukumnya kaum muslim laki-laki dewasa dalam radius 94 km untuk berjuang melawan penjajah. “Setelah 22 Oktober 1945, ada peristiwa besar tanggal 10 November 1945 yang disebut Hari Pahlawan. Tidak akan pernah ada Hari Pahlawan 10 November jika tidak ada tanggal 22 Oktober 1945 (Resolusi Jihad),” katanya.

Setelah adanya Hari Santri Nasional,

Pesantren (Ponpes) Bina Insan Mulia di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, menggelar acara tasyakuran. Acara tasyakuran serupa juga digelar di Kantor DPC PKB Kabupaten Cirebon.

Gus Jazil yang juga Wakil Ketua Umum DPP PKB mengatakan, dengan disahkannya Perpres 82/2021, kini para santri dan juga pesantren memiliki peluang yang lebih luas untuk mengembangkan diri dan bersaing dalam menapaki tantangan global.



Mulia, Cirebon, Kamis (16/9/2021).

Pesan senada juga disampaikan Gus Jazil saat Sosialisasi 4 Pilar di Pondok Pesantren Ulumuddin, Susukan, Cirebon, di hari yang sama.

Selain memiliki trah keilmuan, menurut Gus Jazil, santri juga memiliki trah sebagai pemimpin dan pejuang. “Indonesia lahir itu nggak turun dari langit seperti hujan. Kemerdekaan Indonesia itu diperjuangkan, dan andil terbesarnya adalah para santri, ulama. Dulu itu tidak diakui, alhamdulillah 2015 diakui ada Hari Santri Nasional yang diperingati setiap 22 Oktober,” urainya.

Pemilihan tanggal Hari Santri Nasional tersebut karena tanggal itu bersamaan dengan momentum Resolusi Jihad di Surabaya, di mana para ulama saat itu,

Pemerintah bersama dengan DPR kemudian melahirkan Undang-Undang Pesantren pada 2019. Gus Jazil mengatakan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki andil besar dalam memperjuangkan lahirnya Undang-Undang Pesantren.

Dan, akhirnya pada 2 September 2021, Presiden Joko Widodo mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren yang mengatur tentang dana abadi pesantren. Gus Jazil mengatakan, hal ini merupakan bentuk pengakuan negara terhadap kalangan pesantren yang selama ini terpinggirkan.

Sebagai bentuk rasa syukur atas disahkannya Perpres Dana Abadi Pesantren, jajaran Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB bersama dengan para santri Pondok

“Dulu pondok pesantren dianaktirikan. Lulusan-lulusan pesantren sulit untuk menempuh jenjang pendidikan di luar negeri karena subsidi dan support pemerintah kurang. Dengan Perpres Dana Abadi Pesantren ini terbuka peluang untuk santri melanjutkan pendidikan di dalam dan luar negeri,” ungkapnya.

Selain diikuti ribuan santri, tasyakuran yang ditandai dengan pemotongan tumpeng nasi kuning tersebut juga dihadiri Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, KH Imam Jazuli, sejumlah politisi PKB antara lain Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda, Anggota Komisi VIII DPR KH Maman Imanulhaq, Ketua DPC PKB Kabupaten Cirebon Hasan Bashori, Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Barat Muhamad Shidqon, dan sejumlah politikus PKB lainnya. □



H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.

Ketua MPR RI/Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum UNPAD/
Dosen Universitas Terbuka

Menjaga Efektivitas dan Keamanan PeduliLindungi

DIGITALISASI pada segenap aspek kehidupan kini sudah menjadi keniscayaan. Oleh karena platform digital *PeduliLindungi* telah difungsikan sebagai penyimpan data masyarakat yang sudah divaksinasi, efektivitas, dan keamanan platform ini harus terjaga.

Digitalisasi sudah menjadi tuntutan era terkini, sehingga siapa pun tak lagi bisa menghindarinya. Terbaru adalah pemanfaatan platform digital *PeduliLindungi*. Aplikasi ini semula memuat informasi daerah-daerah yang terpapar Coronavirus Disease (Covid-19). Karena tuntutan keadaan akibat perkembangan pandemi, aplikasi ini dikembangkan sedemikian rupa guna mendukung sejumlah instansi pemerintah dalam kegiatan pelacakan kasus Covid-19, sekaligus upaya memutus rantai penularan virus korona. Karena efektivitasnya cukup mumpuni, aplikasi *PeduliLindungi* kini telah menjadi penyimpan data masyarakat yang sudah divaksinasi.

Sebagai bagian dari kewaspadaan seluruh elemen masyarakat, aplikasi *PeduliLindungi* akhirnya menjadi bagian tak terpisahkan dari denyut keseharian masyarakat di masa pandemi. Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menetapkan penggunaan platform digital ini tak hanya sekadar alat bantu pelacakan area atau wilayah terpapar virus korona, tetapi juga untuk mengidentifikasi seseorang itu sudah divaksin atau belum. Caranya, dengan menempatkan alat baca barcode *PeduliLindungi* yang tersimpan di ponsel dan diberbagai titik kegiatan publik; mulai dari pintu-pintu masuk transportasi umum, mal, bandara, dan ruang publik lainnya. Efektif, praktis, mudah, dan cepat.

Sangat disayangkan, karena baru saja aplikasi

ini diterapkan, lagi-lagi muncul persoalan lama yang berulang, yakni kebocoran data pribadi! Tanpa perlu lagi menyebut satu per satu kasus terdahulu, untuk kesekian kalinya masyarakat dipaksa menyaksikan lagi kasus terjadinya kebocoran data pribadi. Kebocoran dari aplikasi *PeduliLindungi* itu kemudian muncul di platform media sosial, yang bisa dilihat dan diakses siapa saja. Bahkan, bisa digunakan untuk tindak kejahatan digital.

Kalau sekadar dilihat karena ingin tahu, kasus bocornya data pribadi bisa saja tak perlu dipersoalkan. Tapi, bagaimana jika data pribadi yang terpublikasi itu disalahgunakan oleh pihak-pihak yang berniat melakukan tindak pidana? Sudah terjadi baru-baru ini, NIK dari Presiden Joko Widodo bisa dilihat pada platform-platform media sosial, akibat terjadinya kebocoran pada aplikasi *PeduliLindungi*.

Masyarakat tentu terkejut dan terusik karena kebocoran itu menyangkut data pribadi sosok seorang presiden, yang bisa saja jauh dari kemungkinan pemanfaatan datanya untuk tindak kejahatan pinjaman online ilegal serta kejahatan digital lainnya. Tetapi, apa jadinya jika kebocoran data itu berkaitan dengan pribadi warga kebanyakan? Potensi penyalahgunaannya terbilang tinggi karena barcode *PeduliLindungi* mencantumkan dengan lengkap data pribadi pemiliknya. Selain NIK, ada nama lengkap, nomor ponsel, bahkan email. Maka, tidak heran jika kasus bocornya data pribadi presiden meresahkan sebagian masyarakat.

Belajar dari kejadian itu, kini menjadi saat yang sangat tepat bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memperbaiki kekurangan dan kelemahan pada aplikasi *PeduliLindungi*. Bukan



hanya soal cara melindungi data masyarakat agar selalu tetap aman. Faktor lain yang juga sangat penting adalah bagaimana agar masyarakat yang mengakses bisa melakukannya dengan mudah dan lancar, baik melalui aplikasi yang di-*download* atau lewat *website*-nya.

Kominfo juga harus mendengar dan segera menyikapi banyaknya keluhan masyarakat karena mereka kesulitan mengakses, yang kemudian berakibat pada gagalnya mengambil data sertifikat vaksinasi yang dibutuhkan untuk 'tiket' bepergian ke mana-mana. Mobilitas masyarakat bisa terhenti jika kemampuan aplikasi PeduliLindungi dalam memberi akses masuk masih begitu terbatas.

Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana pemerintah menjamin dan menjaga keamanan data yang tersimpan pada aplikasi PeduliLindungi. Jaminan akan keamanan data jelas sangat penting agar aplikasi PeduliLindungi dapat digunakan dengan efektif, efisien dan optimal oleh masyarakat. Mobilitas warga tidak terhambat, data terlindungi, dan tentu saja tujuan utama penggunaan

aplikasi ini juga bisa tercapai, yakni memutus rantai penularan virus korona.

Terhitung sejak dimulainya penerapan platform ini, data Kominfo menunjukkan bahwa aplikasi PeduliLindungi telah diunduh oleh lebih dari 39 juta orang, dan dimanfaatkan sebagai fungsi penyaringan (screening) di berbagai fasilitas umum. Ini jelas angka yang masih sangat rendah jika diperbandingkan dengan total 270 juta penduduk. Pemerintah seyogyanya semakin menyosialisasikan manfaat aplikasi ini, agar lebih banyak lagi yang men-*download* dan menggunakannya.

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) sudah menerapkan penggunaan PeduliLindungi. Saat ini, tidak kurang dari 350 pusat belanja anggota APPBI telah memberlakukan ketentuan tersebut. Sejumlah area kegiatan publik lainnya pun sudah diwajibkan menerapkan aplikasi ini, seperti kegiatan industri berorientasi ekspor. Juga kelompok perusahaan kritikal seperti energi, logistik, pos, transportasi, dan distribusi kebutuhan pokok masyarakat, serta supermarket dan hypermarket.

Belum lagi restoran dan kafe dengan area pelayanan di ruang terbuka. Bahkan juga bioskop, tempat wisata hingga pusat kegiatan publik yang menyediakan fasilitas olahraga. Demi keamanan dan keselamatan, semua area kegiatan publik itu pasti butuh aplikasi PeduliLindungi.

Kendati masih ada kekurangan atau kelemahan di sana-sini pada platform PeduliLindungi, inisiatif dan langkah cepat bagi optimalisasi perlindungan dan keamanan data yang melibatkan sejumlah institusi patut diapresiasi. Sebagaimana sudah diketahui publik, melalui kerja sama yang melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sejumlah kementerian terkait dan PT Telkom Indonesia, telah dilakukan migrasi sistem PeduliLindungi ke Pusat Data Nasional yang dikelola Kemenkominfo.

Semoga, dari migrasi itu, aplikasi yang dikembangkan sejak awal 2020 sebagai hasil dari kolaborasi Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kesehatan, Kementerian BUMN, PT Telkom Indonesia serta BSSN, akan jauh lebih aman dan efektif. □

FGD BS-Center

'Booming dan Krisis Industri Asuransi dalam Perspektif UUD NRI Tahun 1945 dan Pancasila'

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo menegaskan, perusahaan asuransi harus mampu memajukan kesejahteraan umum dan memberikan jaminan sosial



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI, Bambang Soesatyo, mengungkapkan, dalam pelaksanaan sila kelima Pancasila, industri asuransi telah memiliki berbagai produk asuransi. Antara lain, Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yang memberikan perlindungan risiko gagal panen, telah berjalan sejak 2015, dengan premi Rp 180 ribu dan disubsidi 80% oleh pemerintah. Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) yang memberikan perlindungan risiko atas kematian dan kehilangan sapi, telah berjalan sejak tahun 2016, dengan premi sejumlah Rp 200 ribu disubsidi 80% oleh pemerintah.

"Asuransi Perikanan Pembudidaya Ikan Kecil (APPIK) yang memberikan perlindungan risiko atas kematian udang/ikan dan kegagalan usaha karena bencana alam, telah berjalan sejak 2017 diawali dengan udang, dengan premi Rp 90 ribu sampai dengan Rp 225 ribu per tahun sesuai lahan, disubsidi 100% oleh pemerintah. Serta Asuransi Nelayan yang memberikan perlindungan risiko atas kematian dan cacat

nelayan saat di laut atau di darat, telah berjalan sejak 2016, dengan premi Rp 140 ribu, dan disubsidi 100% oleh pemerintah," ujar Bamsoet dalam Focus Group Discussion (FGD) 'Booming dan Krisis Industri Asuransi dalam Perspektif UUD NRI Tahun 1945 dan Pancasila', di Kompleks Parlemen, Rabu (8/9/21).

FGD yang diselenggarakan Brain Society Center (BS Center) bersama MPR RI ini turut dihadiri anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati; Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo; dan Kepala Departemen Pengawasan IKNB 2A OJK, Ahmad Nasrullah. Hadir pula para narasumber pembahas, antara lain Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Rizal E. Halim, Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika, Ketua Dewan Asuransi Indonesia Tatang Hidayat, Direktur Utama PT. Asuransi Jiwasraya Angger P. Yuwono, dan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi.

Ketua DPR RI ke-20 ini menyatakan, tidak

menutup mata di balik berbagai asuransi yang melindungi petani dan sektor produktif, masih juga terdapat asuransi bermasalah yang bukannya memberikan proteksi melainkan menambah beban hidup masyarakat akibat gagal bayar. Sebagaimana terjadi pada Jiwasraya, Kresna Life, Bumiputera, dan Himalaya Insurance.

"Berbagai kasus gagal bayar tersebut disebabkan lemahnya manajemen risiko dari proses bisnis sejak hulu sampai hilir. Berawal dari pengemasan produk dengan garansi hasil investasi di luar batas kemampuan pengelola aset dalam menghasilkan pengembalian investasi, dan berujung pada pengelolaan aset investasi. Pada prinsipnya, perusahaan asuransi belum optimal melaksanakan pedoman pengelolaan aset dan kewajiban yang menjadi unsur fundamental dalam perusahaan asuransi," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menegaskan, merujuk berbagai kasus gagal bayar asuransi, perlu dilakukan restrukturisasi dan reformasi industri perasuransian. Restrukturisasi akan menekan pamor dan kepercayaan masyarakat terhadap industri dalam jangka pendek.

"Perlu ada tekad melakukan reformasi perasuransian seperti dicanangkan Presiden saat membuka Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan awal 2020 yang ditindaklanjuti OJK, yaitu meliputi reformasi pengaturan dan pengawasan, reformasi institusional, reformasi infrastruktur dan penyiapan RUU Lembaga Penjamin Polis. Sudah saatnya perusahaan asuransi kembali ke khittahnya dalam ikut serta memajukan kesejahteraan umum dan memberikan jaminan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi," tandas



Bamsuet.

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Rizal E Halim menerangkan, berbagai pokok permasalahan terkait industri asuransi. Antara lain, kesalahan pembentukan harga produk atau mispricing, lemahnya prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi, adanya rekayasa harga saham lewat masifnya jual beli saham dengan dressing reksadana, serta tekanan likuiditas dari produk asuransi yang kemudian berdampak terhadap penurunan kepercayaan nasabah yang menyebabkan merosotnya penjualan.

“BPKN telah mengeluarkan rekomendasi terkait asuransi tahun 2020. Antara lain, Indonesia perlu mempercepat pembentukan Lembaga Penjamin Polis (LPP) demi menjalankan amanat UU No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagai langkah untuk melindungi pemegang polis dan memastikan industri perasuransian berjalan dengan sehat. Perlu segera membuat peraturan turunan yang mengatur persyaratan agen asuransi yang bersertifikat serta memiliki kredibilitas secara jelas dan sistematis dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Serta membuat pedoman bagi

perusahaan asuransi untuk melengkapi perjanjian asuransi dengan ringkasan perjanjian tentang manfaat dan risiko agar mudah dipahami konsumen,” terang Rizal Halim.

Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, mengingatkan, mengambil pelajaran dari kasus Jiwasraya, beberapa masalah mendasar yang potensial terjadi pada perusahaan asuransi, terdiri dari kesalahan pricing produk, aktivitas investasi yang rentan, manipulasi kinerja perusahaan dengan aggressive window dressing, dan tekanan likuiditas akibat mismatch. Portofolio Manajemen yang buruk juga menyebabkan risiko kerugian yang sangat besar akibat penempatan pada aset-aset yang berisiko tinggi. Kerugian yang sangat besar juga terjadi akibat fraud dan tata kelola yang tidak baik. Ketegasan institusi pengawas untuk melakukan tindakan koreksi juga tidak berjalan optimal.

“Pelaku usaha industri asuransi, pada 2021 ini industri asuransi juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Krisis Covid-19 menyebabkan bisnis asuransi tertekan karena penurunan pendapatan masyarakat. Menyebabkan daya beli masyarakat untuk membeli asuransi semakin menurun,” tandas Anis Byarwati. □



Temu Pakar Ratu Kalinyamat

Ratu Jepara, Penggagas Poros Maritim

Ratu Kalinyamat atau Retno Kencono memiliki pemikiran sangat maju, melampaui batas perempuan kebanyakan pada zamannya. Oleh portugis, ia dijuluki Rainha da Jepara, Ratu dari Jepara.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI, Dr. Lestari Moerdijat, SS., MM., mengapresiasi upaya pemerintah dan masyarakat Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah yang akan mengusulkan kembali Ratu Kalinyamat (RK) agar memperoleh gelar Pahlawan Nasional. Menurut Lestari, upaya tersebut sejalan dengan keberanian serta perjuangan Ratu Kalinyamat yang sukses menggagalkan upaya tentara Portugis yang hendak menjajah wilayah Nusantara.

Pada kurun 1549-1579, RK melakukan tiga kali perlawanan terhadap kolonialis Portugis. Tahun 1551, Ratu Kalinyamat mengirimkan pasukannya ke Malaka untuk menyerang tentara Portugis. Serangan ini dilakukan sesuai permintaan Raja Johor yang meminta bantuan kepada RK, meski kemudian pasukan Ratu Kalinyamat bisa dipukul mundur.

Tahun 1556, Ratu Kalinyamat terus berusaha melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka. Saat itu RK mengabdikan permintaan Sultan Aceh untuk membantu menyerang Malaka. Ratu Kalinyamat mengirimkan 5 ribu pasukan dan satu jung.

Kemudian, pada 1574, Ratu Kalinyamat mengirimkan 15 ribu pasukan didukung persenjataan lengkap, 300 perahu layar dan

80 kapal jung besar ke Malaka untuk menggempur pasukan Portugis. Pasukan RK berhasil menguasai Malaka selama enam bulan, sebelum dipukul mundur oleh pasukan Portugis, yang berkekuatan 50 ribu prajurit.

“Tidak berlebihan bila Ratu Kalinyamat mendapat julukan Perempuan Perintis Anti Kolonialisme. Ia memiliki visi, misi yang sangat maju. Termasuk menyoal Poros Maritim. Karena keberanian dan kemampuannya itu bangsa Portugis memberinya julukan Rainha Da Jepara yang berarti Ratu dari Jepara,” kata Lestari Moerdijat.

Lestari yang biasa disapa Rerie menyampaikan hal itu memaparkan pokok-pokok pikiran pada acara Temu Pakar Ratu Kalinyamat. Acara tersebut berlangsung di Semarang, Sabtu (11/9/2021). Ikut hadir dan menjadi pembicara pada acara tersebut, antara lain Pratikno dan Nur Hidayat selaku anggota DPRD Jepara; Prof. Ratno Lukito, Ketua tim pakar Ratu Kalinyamat; Dr. Sa’dullah Assa’idi, M.Ag., Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Jepara; Pengamat militer, Dr. Connie Rahakundini; Serta Dr. Agustinus Supriono, Dr. Alamsyah, dan Dr. Chusnul Hayati, ketiganya sejarawan Universitas Diponegoro.

Pemikiran Ratu Kalinyamat menyangkut

pemanfaatan laut, menurut Rerie, sangat cocok untuk dilanjutkan. Terlebih Indonesia merupakan negara kepulauan yang harus selalu disatukan agar tidak tercerai berai. Salah satunya adalah dengan melanjutkan pembangunan poros maritim, seperti yang diinisiasi Ratu Kalinyamat.

Menurut Rerie, pemikiran Ratu Kalinyamat menyangkut pembangunan kawasan laut patut dilanjutkan, bahkan bisa menjadi dasar pemikiran pembangunan Indonesia. “Karena itu perlu terus dikumandangkan,” ungkap Rerie.

Rerie percaya upaya memberikan anugerah Pahlawan Nasional kepada Ratu Kalinyamat akan membuahkan hasil. Meski, upaya tersebut sempat mengalami dua kali kebuntuan. Karena itu, Rerie meminta semua pihak bahu-membahu, mendukung rencana tersebut. Apalagi, data dan fakta menyangkut asal usul, jasa, dan perjuangan Ratu Kalinyamat sudah didapat, dan jauh lebih lengkap dibanding sebelumnya.

Usaha ini sudah dilakukan sejak lama, mulai 1994. Namun, dua kali upaya mendapatkan anugerah Pahlawan Nasional bagi Ratu Kalinyamat gagal, karena minimnya data dan fakta pendukung. Kita tinggal memiliki satu kali kesempatan, dan harus diupayakan secara optimal. “Semoga kali ini berhasil,



dengan ditemukannya data-data primer, yang sebelumnya tidak diketahui rimbanya,” kata Rerie.

Poros Nusantara

Yang paling penting dari usaha memberikan gelar kehormatan ini, kata Rerie, adalah pembelajaran bagi generasi muda terhadap ketokohan Perempuan Perintis Anti Kolonialisme. Dan, itu ada pada sosok Ratu Kalinyamat. Dia adalah tokoh yang mampu melakukan konsolidasi dan membentuk aliansi, juga pemikiran poros nusantara, tanpa menimbulkan konflik dengan siapapun. Sikap-sikap tersebut patut ditiru dan

diteruskan oleh generasi muda.

Harapan serupa disampaikan Prof. Ratno Lukito, ketua tim pakar Ratu Kalinyamat. Menurut Ratno, upaya memberi penghargaan sebagai Pahlawan Nasional kepada RK menemukan titik terang. Optimisme itu didasari keberhasilan para peneliti memperoleh data-data primer yang selama ini tersimpan di Portugis.

“Buku dan catatan yang didapat dari Portugis itu menyatakan, benar bahwa Ratu Kalinyamat-lah yang telah menggagalkan rencana Portugis menginvasi nusantara. Jadi, sangat tepat jika beliau dianugerahi gelar Pahlawan Nasional,” kata Ratno Lukito.

Salah satu catatan tentang Ratu Kalinyamat

yang diperoleh dari Portugis, ditulis oleh De Couto yang menyatakan bahwa RK sebagai pemberani. Selain itu, De Couto juga menyebut Ratu Kalinyamat dengan istilah *Rainha de Japara, senhora paderosa e rica*, yang berarti Ratu Jepara, seorang wanita kaya dan berkuasa. Intinya, Ratu Kalinyamat adalah seorang tokoh wanita yang sangat terkenal. Dia tidak hanya berparas cantik, tetapi juga berkepribadian gagah berani, dan berkuasa.

Dengan ditemukannya bukti-bukti baru dari Portugis terkait eksistensi dan perjuangan Ratu Kalinyamat, menurut Sejarawan Universitas Diponegoro Dr. Alamsyah, membuat peluang pemberian anugerah sebagai Pahlawan Nasional kepada RK semakin besar. Terbuti dua kali percobaan sebelumnya, selalu gagal, karena tidak ada bukti-bukti ilmiah yang ditemukan.

“Dokumen-dokumen asal Portugis itu mampu membuktikan bahwa keberadaan Ratu Kalinyamat bukan legenda semata. Tetapi memang ada, mulai dari asal usul, keluarga hingga perjuangannya. Tidak ada keraguan lagi, upaya memberikan penghargaan sebagai Pahlawan Nasional kepada Ratu Kalinyamat akan menemui hasil,” katanya. □

MBO



KH. Ahmad Sanusi

Pendiri PUI Layak Bergelar Pahlawan Nasional

WAKIL Ketua MPR RI Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, M.A., mengingatkan pentingnya merawat dan menjaga persatuan di kalangan umat Islam. Karena persatuan di kalangan umat Islam merupakan wujud kontribusi untuk menjaga persatuan di antara anak bangsa dari sejumlah provokasi yang hendak merusaknya.

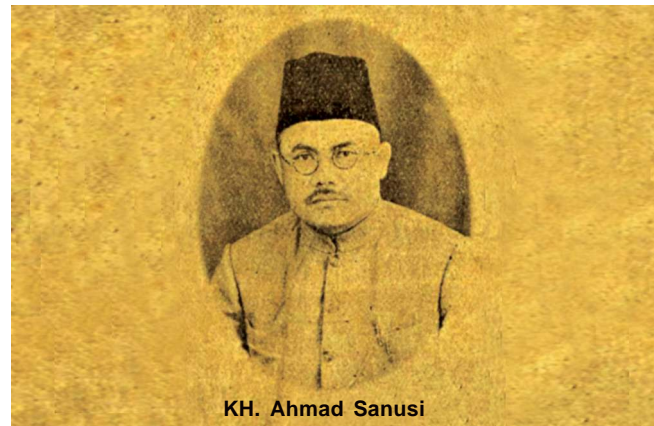
“Terutama upaya memecah persatuan umat. Dengan cara mendiskreditkan umat beragama, antara lain memberikan stigma tidak Pancasila dan radikal, perlakuan yang tidak adil kepada tokoh Agama, bahkan menistakan agama. Itu semua merupakan provokasi yang hendak melemahkan per-

persatuan umat dan bangsa untuk bersama-sama menyukseskan perjuangan Indonesia Merdeka. Sebagaimana telah diberikan keteladanannya oleh para pendiri PUI.

HNW menyebut KH. Abdul Halim, KH. Ahmad Sanusi, dan Mr. R. Syamsudin, sebagai pendiri PUI, juga founding fathers Republik ini, dengan berkiprah aktif di BPUPK. Bahkan, sesuai nama organisasi ‘Persatuan Ummat Islam,’ ketiganya bersama para tokoh ormas Islam, Partai Islam dan elemen bangsa dari beragam suku, agama dan organisasi lainnya bersatu di BPUPK ikut menghadirkan keteladanan besar dalam menghadirkan toleransi, persaudaraan dan bersatu dalam kesepakatan perjuangan bagi

NKRI dengan berbagai cara. Seperti upaya normalisasi komunisme, mencabut TAP MPRS No. XXV / 1966 yang membubarkan PKI. Dan, mengaburkan fakta sejarah PKI sebagai pelaku kudeta berdarah pada 30 September 1965, seperti dalam Kamus Sejarah Indonesia versi Dirjen Kebudayaan, dihilangkannya frasa Agama dalam Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035, iklan LGBT yang menyusup kepada anak-anak kita melalui YouTube, bahkan tindakan penistaan agama yang sengaja dilakukan sejumlah pihak.

Untuk menghadapi upaya-upaya neo-imperialisme, neo-kolonialisme, bahkan neo-komunisme itu, menurut Hidayat, pihaknya



KH. Ahmad Sanusi

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

satuan antara sesama anak bangsa,” ujar Hidayat saat memberikan sambutan pada acara Training Intisab PD Persatuan Ummat Islam (PUI) Jakarta Selatan, Rabu (15/9/2021).

Pada bulan September, kata Hidayat, bangsa Indonesia diingatkan dengan Jenderal Besar A.H. Nasution. Nasution pernah menyampaikan bahwa PKI memakai cara adu domba antara Pancasila dengan Islam untuk merusak persatuan bangsa. Karena itu, sudah tepat kalau Pimpinan PUI (Persatuan Umat Islam) menyegarkan ingatan sejarah dan komitmen keharusan menguatkan persatuan umat dan bangsa dari upaya provokasi dan adu domba.

Maka dari itu, anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta II yang akrab disapa HNW ini, menggarisbawahi peran penting yang diemban PUI dalam melanjutkan sejarah

terwujudnya Indonesia merdeka. Jauh dari egoisme, arogansi, intoleransi. “Yang dikedepankan adalah kemaslahatan terbesar bagi suksesnya perjuangan umat dan bangsa,” jelas HNW.

Saat ini, kata HNW, PUI bersama seluruh elemen bangsa lainnya harus memberi peran nyata, merawat kemerdekaan dengan melanjutkan persatuan bangsa yang sudah dicita-citakan para pendiri Republik Indonesia, dari segala bentuk penjajahan gaya baru.

Lebih lanjut HNW menyatakan, kita diresahkan dengan upaya pecah belah bangsa, gerakan separatis, maupun pembelahan bangsa akibat politik pemilu, maupun ketidakadilan hukum dan ekonomi, juga penjajahan.

Begitu pula neo-imperialisme, neo-kolonialisme, bahkan neo-komunisme terus berupaya membahayakan serta merusak

sebagai organisasi politik di DPR selalu siap bersama elemen umat dan bangsa lainnya mewaspadai upaya pecah belah yang sangat bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Sebagaimana dicontohkan para Pendiri PUI bersama tokoh-tokoh bangsa lainnya.

Oleh karenanya, Wakil Ketua Majelis Syura PKS, ini mendukung sikap PUI agar melanjutkan sejarah perjuangannya dalam menghadirkan persatuan umat dan bangsa. Termasuk memperjuangkan diangkatnya KH. Ahmad Sanusi sebagai Pahlawan Nasional demi menjadi teladan persatuan bagi generasi masa kini.

Apalagi, perjuangan KH. Ahmad Sanusi di BPUPK, di PUI, maupun di medan perjuangan lainnya, sangat penting untuk diabadikan sebagai teladan besar dalam merawat persatuan Indonesia. Oleh karenanya, PKS

sangat mendukung agar Negara menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional. Untuk itu, PUI melakukan persiapan yang diperlukan.

Seperti, dokumentasi dan penulisan sejarah perjuangan KH. Ahmad Sanusi, seminar dan lainnya, demi terpenuhinya persyaratan

pengangkatan KH. Ahmad Sanusi sebagai Pahlawan Nasional. □

MBO

Hari Tani Nasional

Permaian Kartel Menyebabkan Petani Tak Berdaya

Cita-cita bangsa ini untuk menjadi lumbung pangan dunia masih jauh panggang dari api. Buktinya, petani banyak hidup miskin. Komoditas pangan masih bergantung pada impor.

WAKIL Ketua MPR, Jazilul Fawaid mengatakan, kebijakan pertanian di Indonesia sebenarnya sudah cukup ideal. Pertanyaannya, kenapa Indonesia belum bisa menjadi negara agraris yang maju. “Menurut saya, bukan soal kebijakannya saja, tetapi implementasi dari kebijakan yang ada. Masalahnya tidak semata-mata dari undang-undang, tapi kebijakan kita,” ujar Jazilul Fawaid, yang biasa disapa Gus Jazil, pada acara Hari Tani Nasional dan Hari Ulang Tahun ke-7 Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan Indonesia (Gerbang Tani) secara virtual, Kamis (23/9/2021).

Jadi, menurut Gus Jazil, sampai hari ini petani kita atau Indonesia belum bisa disebut sebagai negara lumbung pangan dunia, padahal pangan itu sangat penting. “Hari ini kedaulatan pangan petani kita belum menjadi kekuatan, belum mampu menciptakan swasembada,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, dulu, di era Orde Baru, Indonesia pernah swasembada pangan. Sekarang, kenapa justru sekarang tidak bisa. “Dulu saya pernah di Komisi IV, kita memutuskan swasembada di 5 sektor: gula, padi, garam, kedelai, dan jagung. Tetapi sampai hari ini belum juga selesai. Pertanyaannya, ini soal ideologi atau anggaran, atau soal pembinaan dan implementasi,” ungkapnya.

Menurut Gus Jazil, hal ini menjadi persoalan besar ketika Indonesia sebagai negara agraris, namun tidak mampu mengejar cita-cita untuk swasembada di sektor pangan, dan tidak mampu menaikkan indeks kesejahteraan petani.

“Jangan berkata anggaran kita tidak cukup, tapi apakah benar semua program dan kebijakan yang sudah diputuskan itu mampu diimplementasikan. Saya kok melihat



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

ada banyak masalah. Lahan bermasalah, distribusi pupuk bermasalah, penyediaan bibit itu juga bermasalah. Bahkan petaninya pun bermasalah. Akhirnya indeks petani juga belum terlalu baik,” urainya.

Hal lain yang menjadi soal, kata Gus Jazil, saat ini anak-anak muda justru meninggalkan sektor pertanian dan tidak bangga menjadi petani. “Kalau begitu, berarti ancaman kita ke depan bisa kekurangan pangan. Kalau kita kekurangan pangan atau ketanahan pangan kita rapuh, maka negeri kita juga akan rapuh,” tuturnya.

Di sisi lain, Gus Jazil juga mengkritisi banyaknya permainan kartel di berbagai komoditi pertanian yang menyebabkan petani kita tidak berdaya. “Banyak produk pertanian menjadi game politik dalam konteks tata niaga. Kartel ada di gula, di kedelai, di bawang putih, kartel juga ada di daging. Ini semua masalah sehingga petani kita tak bisa berdaya,” tuturnya.

Menurut Gus Jazil, kebijakan tata niaga

pertanian ini sangat penting untuk menjadi perhatian pemerintah. Sebab, sering kali ketika petani panen, kemudian harganya jatuh. “Tata niaga itu penting. Kebijakan menyangkut harga komoditas pertanian, distribusi dan penjualan hasil pertanian itu penting,” urainya.

Oleh sebab itu, Gus Jazil menegaskan, faktor implementasi kebijakan pertanian menjadi sangat penting. Pihaknya mendorong Gerbang Tani untuk menjadi bagian dalam mengkritisi sekaligus mengoreksi dan mengawasi semua implementasi dari semua kebijakan pertanian, baik kebijakan dalam hal pengadaan bibit, kebijakan lahan, anggaran, termasuk tata niaga pertanian.

Gus Jazil berharap, Gerbang Tani menjadi pelopor atau perintis kembalinya Indonesia menjadi negara agraris yang berwibawa dan betul-betul menghasilkan komoditi-komoditi pertanian andalan dunia, serta menjadi sentrum kekuatan pertanian dan pangan dunia. □



Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad
Wakil Ketua MPR RI, dan Ketua Umum DPP Masyarakat Agribisnis Indonesia

Membangun Sistem Agribisnis Jagung Berbasis Kelembagaan Ekonomi Petani/Koperasi, Solusi Permanen Masalah Harga

JAGUNG merupakan komoditi strategis nasional, dengan luas panen 5.16 juta Ha, produktifitas rata-rata 4.8 ton/ha dan produksi 24.95 juta Pipilan Kering (Pusdatin Kementan 2021), dan melibatkan jutaan petani, 94 unit Pengusaha Pabrik Pakan, ratusan ribu peternak rakyat, jutaan konsumen, dan telah menempatkan Indonesia termasuk produsen jagung no. 6 di antara 12 negara produsen jagung dunia. Oleh karena itu, masalah jagung akan berdampak pada dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAM). Sejak tahun 2018 Kementerian Pertanian tidak menerbitkan rekomendasi izin impor jagung, adapun impor yang masuk bukan untuk pakan, tetapi untuk bahan baku industri, sebagai pemanis, lebih kurang 1 juta ton.

Sampai sekarang persoalan klasik agribisnis jagung di Indonesia belum terselesaikan secara komprehensif dan fundamental. Setiap kali ada pertemuan petani, peternak rakyat, pengusaha pabrik pakan, dengan pejabat pemerintah, mulai Bupati sampai Presiden, baik dalam forum resmi maupun tidak resmi, selalu muncul persoalan. Mulai di tingkat petani jagung, selalu mengatakan bahwa kami sudah menanam jagung tapi tidak ada yang membeli, kalau ada yang membeli harganya kurang layak, kalau harga sudah layak sulit mendapat benih yang bermutu, pupuk, dan jasa alat pertanian dengan harga layak, permodalan dengan prosedur sederhana dan sebagainya. Sementara di pihak pengusaha hulu (benih, pupuk, pestisida, dan alsintan) sulit menjual produk secara cash, sementara KUR untuk petani jagung tidak terserap sesuai target, karena Bank pelaksana KUR tetap berprinsip sukses penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian, untuk itu harus ada avalis.

Selanjutnya dipihak pengusaha pabrik pakan mengatakan bahwa produksi jagung dalam negeri tidak cukup, kalaulah cukup kualitasnya kurang baik,

dan kalau kualitasnya baik harga mahal, sehingga mengambil jalan pintas, yaitu lebih baik impor. Sementara peternak unggas mengatakan harga pakan mahal, karena harga jagung mahal. Hal tersebut muncul lagi pada kunjungan Presiden ke Blitar, Jatim 2 minggu lalu, seorang peternak memprotes atas kenaikan harga jagung dari Rp 4.200 menjadi Rp 6.000/kg yang menyebabkan kenaikan harga pakan, sementara harga telur mengalami penurunan dari sekitar Rp 20.000 menjadi sekitar Rp 15.000/kg.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dirumuskan bahwa; "Apapun persoalan agribisnis jagung baik ditingkat petani maupun konsumen dan pengusaha hulu-hilir yang selalu muncul, ini menunjukkan bahwa sistem agribisnis jagung belum terbangun dengan baik, mulai di tingkat lapak maupun di tingkat pengambilan keputusan. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyelesaikan persoalan ini secara fundamental, sistematis dan berjangka panjang dan tidak symptomatic, serta tidak partial dan jangka pendek? Oleh karena itu kita harus bangun sistem agribisnisnya, mulai dari sub-sistem hulu sampai hilir. Agar sistem ini terbangun secara berkesinambungan, ada 3 pertanyaan kunci (key question) harus terjawab: 1. Harus ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab di hulu, tengah, dan hilir, 2). Bagaimana interkoneksinya antarpemangku kepentingan (Stake holders) untuk saling membesarkan, dan 3). Siapa yang menjadi derigen (pemerintah?) yang mensinkronisasikan dan mensinergikan agar semua pemangku kepentingan mendapat keuntungan yang layak sesuai resiko dan pengorbanan (sacrifice) masing-masing pihak. Sepanjang 3 persolaan ini tidak terjawab dengan baik, maka persolan klasik tersebut akan selalu muncul dan akan mengancam keberlanjutan (sustainability) sistem agribisnis jagung di Indonesia. Dengan terbangunnya sistem ini, masalah harga jagung yang layak terutama ditingkat petani

mendapat perlindungan, jangan diserahkan ke mekanisme pasar, pihak yang lemah akan tergilas terutama petani.

Hasil identifikasi dan inventarisasi persoalan sistem agribisnis jagung menunjukkan bahwa; 1). Tidak ada Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) seperti yang diamanatkan dalam UU No 19 tahun 2013, dalam hal ini Koperasi Petani yang menghubungkan pihak yang bergerak di hulu dalam hal ini petani jagung dan para pengusaha agribisnis yang bergerak di penyediaan sarana, jasa alsintan, permodalan pengolahan dan pemasaran, dan 2). Kurangnya peran pemerintah sebagai derigent, agar semua pemangku kepentingan merasa diuntungkan dari pembagian margin dari bisnis jagung ini. Untuk itu bagaimana ada kebijakan yang berpihak dari pemerintah untuk lebih mereposisi kelembagaan ekonomi petani/koperasi dan BUMD sebagai penyedia pelayanan (delivery system) bagi petani, dan menjadi avalis dengan pihak penyedia dana/permodalan bunga rendah/tanpa bunga, tanpa agunan dan sistem bagi hasil.

Berdasarkan pengalaman dan bench marking, ternyata petani maju, modern dan kuat karena adanya delivery system dalam hal ini adalah koperasi. Zaman Orde Lama (OrLa) ada beberapa koperasi yang kuat dari beberapa komoditi, yaitu koperasi kelapa, koperasi karet, dan zaman Orde Baru (OrBa) telah dibangun catur sarana unit desa (BUUD/KUD, penyuluh, BRI Unit Desa dan Kios Sarana) di setiap desa dan tahun 1984 sukses mengantar Indonesia dari negara pengimpor menjadi negara berswasembada pangan. Bench Marking di beberapa negara (New Zealand, Jepang, Korea dan Turki), petani maju modern, karena adanya kebijakan yang berpihak memberdayakan Koperasi sebagai Kelembagaan Ekonomi Petani, sesuai amanah UUD 1945 Pasal 33 dan, UU No 25 tahun 1992 tentang Koperasi dan UU No 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Masalahnya adalah tinggal bagaimana menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi, permodalan, manajemen, dan kemampuan memberikan pelayanan prima (exelence service, lebih murah, lebih cepat). Kementerian Koperasi harus kerja sama dengan Kementerian Pertanian dan Perdagangan, untuk membina Koperasi yang bekerja pada kawasan yang memenuhi skala ekonomi 1.600-3.200 Ha. Latihan SDM managemen sampai operator, mengenai managemen, kepemimpinan, kewirausahaan dan penguasaan IT agar dapat diberikan. Pinjaman Modal tanpa bunga dan agunan, dan

sistem bagi hasil juga harus disiapkan. Untuk itu, koperasi perlu dimitrakan dengan BUMD atau Perusahaan Mitra yang menjamin suplai sarana/parasana dan pemasaran dan langsung kontrak dengan Perusahaan Pabrik Pakan. Harga kontrak inilah dan biaya produksi jagung per kg petani yang menjadi patokan dalam menentukan Harga Pembelian Koperasi (HPK) kepada petani jagung (kadar air 14 %) yang menjadi anggota. Pemerintah Daerah melalui BUMD harus investasi prasarana seperti silo, pengeringan (drier) kapasitas besar, gudang penyimpanan, alat angkut. Rencana Memperindag menyubsidi 30.000 ton dengan besaran Rp 1.500 /kg atau totalnya Rp 45 M untuk jangka pendek kurang tepat, karena tidak jelas siapa yang akan disubsidi, lebih baik dipinjamkan ke Koperasi tanpa bunga dengan sistem bagi hasil

Peluang peningkatan produksi jagung nasional masih cukup besar, baik melalui peningkatan produktivitas maupun peningkatan indeks pertanaman dengan penguatan delivery system, terutama menjaga stabilitas harga yang layak buat petani anggota koperasi di tingkat Kecamatan. Tantangannya adalah bagaimana menyiapkan modal untuk lebih kurang 2.250 unit koperasi, dari KEP/Koperasi Petani 4.694 unit yang sudah terdata on line (Data Simluhtan Kementan, 14 September 2021) untuk menjadikan Indonesia sebagai pengeksport jagung paling tidak di daerah 15 sentra produksi, termasuk untuk substitusi impor, dengan menjaga harga jagung petani minimal Rp 4.200/kg, kadar air 14 % (biaya produksi intensif rata-rata Rp 8-10 jt/ha, produksi 5 ton, atau biaya produksi Rp 1.600-2000/kg), dan harga kontrak koperasi dengan BUMD Rp 4.500, dan harga kontrak BUMD dengan pabrik Rp 5.000/kg, FOB. Kalau sistem ini terbangun, insya Allah harga akan stabil, baik di tingkat produsen maupun konsumen, dan ini akan mendorong semua pemangku kepentingan untuk saling membesarkan, karena ada kejelasan suplai-demand dan harga.

Kalau rata-rata satu unit koperasi melayani kawasan skala ekonomi seluas 2.400 Ha x 5 ton/ ha, total produksi 12.000 ton x Rp 4.200/kg, nilai produksinya lebih kurang Rp 50 M. Untuk keperluan cash flow koperasi cukup diberikan pinjaman tanpa bunga dengan sistem bagi hasil Rp 15 M/koperasi x 2.250 koperasi, lebih kurang Rp 33, 75 T. Sumber pembiayaannya bisa dari pinjaman APBD atau APBN yang yang disimpan di Bank Daerah atau melalui Kredit Usaha Rakyat yang plafondnya sudah tersedia lebih kurang Rp 70 T. □

Partai Pendukung Pemerintah Bertambah, Bagaimana Kekuatan Penyeimbang?

Terjadi dinamika politik dalam demokrasi di Indonesia pada tahun ini. Partai Amanat Nasional (PAN) masuk ke koalisi partai politik pendukung pemerintah. Masuknya PAN dalam koalisi membuat kekuatan politik pemerintah di parlemen semakin kuat. Benarkah kekuatan penyeimbang, *check and balances*, semakin tidak efektif seiring makin kuatnya partai pendukung pemerintah. Berikut pendapat dari para politisi.

Zulfikar Arse Sadikin, Anggota MPR Fraksi Partai Golkar

Dalam Politik Indonesia, Istilah Oposisi Kurang Tepat

BANYAK penggunaan istilah yang kurang tepat saat ini perihal politik di Indonesia, salah satunya soal oposisi. Dalam ilmu politik, sistem presidensial itu tidak mengenal istilah oposisi sebagaimana dimaksud dalam sistem parlementer. Tugas mengawasi pemerintah dalam sistem presidensial sepenuhnya di jalankan oleh legislatif sebagai wakil rakyat.

Dengan bergabungnya PAN dalam pemerintahan tentu tidak akan berpengaruh terhadap kualitas legislatif dalam mengawasi kinerja pemerintah, bahkan bisa membangun hubungan yang semakin sinergis antara eksekutif dan legislatif, serta sejalan dengan tujuan membentuk pemerintahan yang kuat dan efektif.

Masuk atau tidaknya ke dalam pemerintahan merupakan hak politik masing-masing partai. Bisa jadi dengan masuk ke pemerintahan partai bisa lebih mudah melaksanakan aspirasi konstituennya. Masuk ke pemerintahan tidak bisa selalu berkonotasi negative, seperti pragmatisme itu.

Dan, sekali lagi dalam sistem presidensial, semua partai mau tidak mau harus mendukung pemerintah, karena presiden merupakan pilihan rakyat. Bentuk dukungannya bisa ikut masuk dalam kabinet atau mengawasi jalannya pemerintahan lewat legislatif. Kita tidak bisa begitu saja mendefinisikan partai oposisi sebagai bukan pendukung pemerintah. Sekali lagi kita ini presidensial, bukan parlementer.

Dalam sistem parlementer, partai-partai



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

yang kalah pemilu tentu saja memiliki kerugian karena tidak bisa melaksanakan program kerjanya, sehingga mereka beroposisi kepada partai pemenang yang sedang memerintah, dengan mengkritisi kinerja dan kebijakannya, agar pemerintah jatuh, kemudian ganti oposisi tadi yang memerintah, meski belum waktunya pemilu.

Di dalam sistem presidensial Indonesia saat ini tidak bisa seperti itu. Eksekutif dan legislatif sama-sama dipilih rakyat lewat pemilu. Yang memenangkan pemilu memerintah, yang kalah di legislatif mengawasi. Dan, kekuasaan baru bisa berganti secara konstitusional lewat pemilu, bukan manuver politik di dalam Parlemen.

Di negara manapun menjadi partai yang tidak

bisa memerintah tidak menguntungkan, karena tidak bisa melaksanakan program kerja dan implementasi ideologinya. Makanya semua partai berkompetisi untuk merebut suara pemilih agar bisa memerintah. Keuntungan bagi yang memerintah adalah bisa menunaikan janjinya kepada pemilih saat pemilu.

Tapi di luar pemerintahan pun bukan berarti tidak beruntung. Contoh PKS dan Gerindra mendapatkan penambahan kursi masif di parlemen dari Pemilu 2019 lalu, meskipun berada di luar pemerintahan. Itu merupakan apresiasi dari pemilih atas kinerja mereka di legislatif dalam mengawasi pemerintah. Semua ada resikonya, baik di luar atau di dalam pemerintah.

Demokrasi pada dasarnya membutuhkan *check and balances*. Ini bisa dilakukan oleh sesama lembaga negara, oleh pers dan media, oleh mahasiswa, oleh *civil society*, bahkan langsung oleh warga negara itu sendiri. Mereka semua ini yang mengontrol kekuasaan. Sistem sudah ada dan sudah berjalan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan berlebihan dari kuatnya dukungan bagi pemerintah.

Toh, partai-partai memerintah ini akan diadili oleh rakyat lewat pemilu nantinya. Kalau berhasil mereka tentu bisa mendapatkan mandat kembali untuk berkuasa. Sebaliknya, bila dinilai gagal, mereka pun kehilangan kekuasaan dan mandat untuk memerintah kembali. Begitu cara sistem presidensial bekerja. Kontrol tetap ada dalam kedaulatan rakyat.

Sekali lagi, mekanisme *check and bal-*

ances penting dalam demokrasi. Kalau yang di maksud oposisi adalah peran-peran yang mengawasi dan mengkritisi pemerintah, itu bisa ada di dalam dan luar legislatif. Dan hal

itu berjalan sampai saat ini.

Indonesia tidak pernah kehabisan dan kekurangan pengawas dan pengkritisi pemerintah. Baik itu dari legislatif main pun

dari kekuatan *civil society*. Demokrasi Indonesia baik-baik saja meski partai yang mendukung pemerintah semakin kuat. □

AWG

Fauzi H Amro, Anggota MPR FRaksi Partai Nasdem

Oposisi atau Masuk Kekuasaan, Sikap Politik Mesti Dihormati

DENGAN bergabungnya PAN dalam koalisi Partai Pendukung Pemerintah, kekuatan kelompok oposisi semakin melemah? Secara kalkulasi matematis ya, karena pasca merapatnya PAN ke dalam koalisi pemerintah berarti saat ini hanya tersisa PKS dan Partai Demokrat, partai pemilik kursi di DPR yang berada di luar koalisi Pemerintah. Sementara dengan merapatnya PAN, Jokowi mendapat dukungan dari tujuh partai politik di DPR. Mantan Walikota Solo itu berhasil mengamankan 471 kursi parlemen. Jokowi juga mengantongi perolehan suara partai pada Pemilu 2019 sebesar 77,31%.

Setiap partai politik punya hak untuk menjadi partai koalisi pemerintah atau menjadi oposisi. Tentu dengan berbagai pertimbangan politik yang mendasarinya. Dan, namanya partai politik pasti punya kepentingan pragmatis dalam setiap langkah politik. Apakah itu bakal dapat kursi di kabinet atau pun kepentingan lainnya? Atau semangatnya ingin membangun bangsa melalui pemerintahan, terlebih sekarang zaman pandemi, perlu ada upaya bersama-sama dan bergotong royong untuk menghadapi Covid-19 yang juga berimbas pada sisi ekonomi. Namun itu semua kembali pada kepada pimpinan masing-masing partai politik, termasuk ke rekan-rekan PAN.

Saya berharap, dengan bergabungnya PAN dalam koalisi Pemerintahan Jokowi akan semakin memperkaya ide, gagasan, serta memperkuat kerja pemerintah, terutama dalam menghadapi pandemi dan memulihkan ekonomi nasional kita.

Menjadi oposisi atau masuk dalam pemerintahan itu adalah sikap politik yang mesti dihormati, karena semuanya pasti niatnya untuk kebaikan bangsa. Ada bekerja di dalam pemerintahan, ada juga bekerja mengontrol di luar pemerintah, yang kita sebut sebagai oposisi.

Sebenarnya, kontrol jalan pemerintah tetap berjalan, sekalipun sekarang hanya tersisa 2 partai di luar pemerintahan, yakni PKS dan Demokrat. Meski kami berada dalam koalisi partai pendukung pemerintah, bukan berarti kita tidak kritis, tapi sebagai anggota parlemen kami tetap



menjalankan fungsi kontrol dan tetap kritis yang konstruktif atas berbagai kebijakan Pemerintah yang bersinggungan dengan kepentingan rakyat dan negara.

Misalnya saat ini Pemerintah tengah mendorong Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan saat ini sedang tahap pembahasan di Komisi XI DPR-RI. Fraksi Nasdem meski mendukung perluasan basis pajak untuk meningkatkan pendapat negara, namun Fraksi Nasdem di DPR-RI tetap menyuarakan kepentingan rakyat, dengan menolak klausul pasal-pasal yang bakal merugikan masyarakat. Misalnya, kami menolak dengan tegas pengenaan pajak sembako, pajak layanan medis, pajak

sosial, pajak keagamaan hingga pajak pendidikan, karena hal tersebut bersentuhan dengan hajat hidup rakyat, itu tidak boleh dipajaki. Itu hanya salah satu contoh kerja parlemen, meski berada dalam koalisi pemerintah, namun tidak serta merta menyetujui kebijakan pemerintah, apalagi kebijakan tersebut bakal merugikan masyarakat menengah ke bawah pasti akan dikritisi.

Selain itu, masyarakat sipil seperti NGO (LSM), ormas dan juga kalangan akademi tetap juga bisa berpartisipasi mengontrol jalannya pemerintahan. Jadi, semua pihak bisa berperan, baik melalui jalur parlemen maupun melalui parlemen jalanan, atau sekedar bersuara melalui sosial media dan media massa lainnya.

Menurut saya, Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi perlu ada partai penyeimbang yang berfungsi untuk mengawasi pemerintah. Perlu ada partai yang mengkritik kinerja pemerintah agar tidak kebablasan, sehingga kebijakan pemerintah bisa tetap berada jalur benar, yakni untuk kemakmuran rakyat dan kemajuan bangsa dan negara. Karenanya, Nasdem sangat menghormati sikap kawan-kawan partai yang memilih di luar pemerintah. Kami sangat bersahabat baik dengan rekan-rekan PKS, demikian halnya dengan sahabat-sahabat saya di Partai Demokrat, hubungan kami rekan-rekan lainnya sangat akrab dan mencair.

Parlemen harus tetap menjalankan fungsinya sebagai pengontrol jalan pemerintahan, demikian halnya masyarakat sipil seperti NGO (LSM), ormas dan juga kalangan akademis mesti bergerak berpartisipasi mengontrol jalannya pemerintahan.

Jadi, semua pihak bisa berperan agar demokrasi kita tetap berjalan di rel yang benar. □

AWG



MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT



Sejarah Penjara



Dibangun untuk Mereka yang Berbuat Jahat

Penjara mulai dikenal pada Abad XVIII. Dibangun untuk tempat bagi para penjahat agar tidak mengulang kejahatan yang dilakukan. Kejahatan yang bertingkat membuat kelas penjara pun beragam. Penjara Alcatraz yang pernah dibangun pemerintah Amerika Serikat merupakan penjara kelas berat, diperuntukkan bagi pelaku kejahatan di luar batas kemanusiaan dan hukum. Sayang keberadaan penjara disebut tidak membuat orang jera melakukan kejahatan. Akibatnya, penghuni penjara bertambah melebihi kapasitas.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA



Penjara Alcatraz

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

KESEKIAN kalinya Kerajaan Spanyol mengeluarkan perintah kepada para pelaut untuk melakukan ekspedisi penjelajahan ke berbagai belahan dunia. Pada tahun 1770-an, perintah yang dikeluarkan kerajaan itu kepada pelautnya adalah menuju ke Amerika.

Pelayaran kali ini dipimpin oleh Kapten Juan Manuel de Ayala. Dalam pelayaran yang dipimpin oleh pria kelahiran Osuna, Andalusia, itu berbagai tantangan alam dihadapi. Singgah di beberapa pulau dan pantai, yang ia lakukan selain untuk beristirahat juga untuk mengisi perbekalan dan memperbaiki kapal.

Dalam pelayaran yang sudah berjalan kurang lebih lima tahun, pada suatu hari, tepatnya 12 Agustus 1775, ia melihat ada pulau kecil berupa karang. Di pulau itu terdapat banyak burung yang terbang atau hinggap di sana. Melihat fenomena alam yang demikian membuat de Ayala menamakan pulau itu dengan nama *Alcatraz*. Menurut catatan yang ada, nama itu berasal dari bahasa arab yang aslinya, *al qatras*, elang laut. Sumber lain mengatakan, Alcatraz berarti burung pelikan. Nama itu sematkan untuk pulau itu

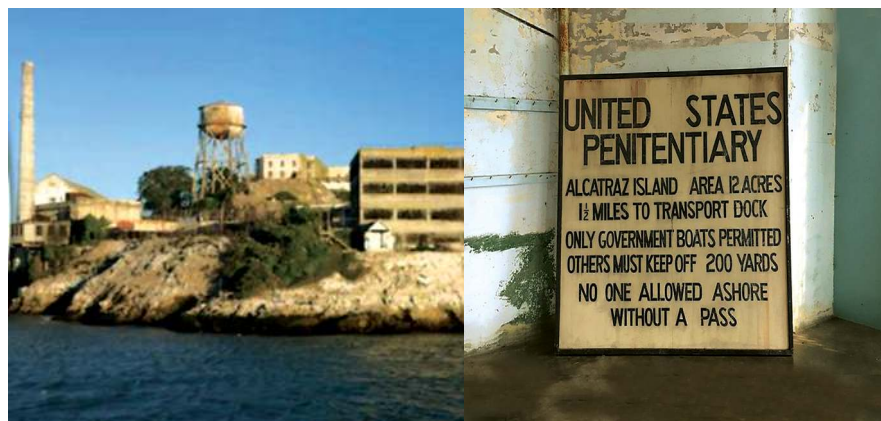
terdapat banyak berbagai jenis burung hidup di sana. Di pulau itulah yang membuat ia dan *crew* kapal yang di-pimpinnya, San Carlos, menjadi orang Eropa pertama yang berhasil menemukan Teluk San Fransisco, California, Amerika Serikat.

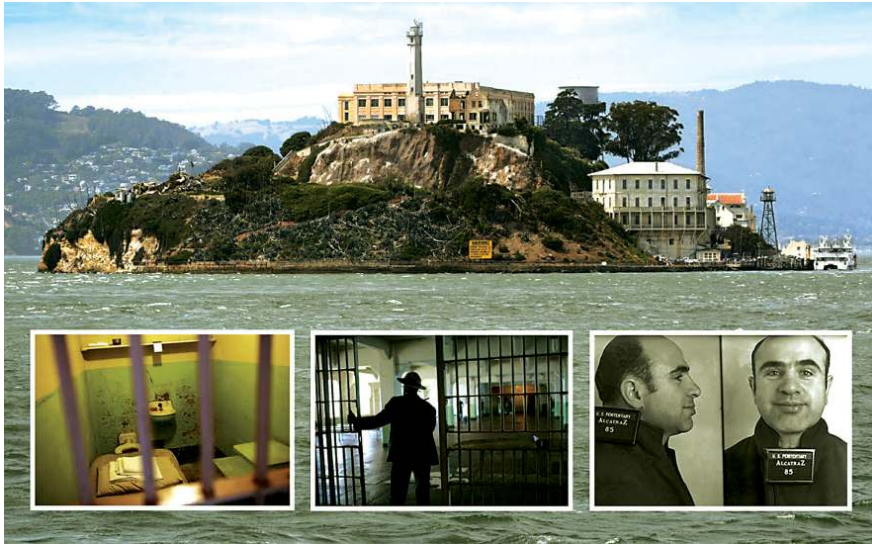
Keberadaan Pulau Alcatraz yang berada di Teluk San Fransisco ternyata sangat strategis, buktinya pada tahun 1850 di sana dibangun benteng atau pertahanan militer. Sebagai benteng atau pertahanan militer, pastinya di sana dilengkapi dengan bangunan besar, kokoh, kuat, serta dipasang puluhan meriam untuk meng-

halau kapal-kapal musuh.

Di pulau itu tidak hanya berfungsi sebagai pertahanan militer. Para tentara Amerika Serikat juga menggunakan tempat itu sebagai penjara bagi mereka yang dianggap bersalah. Saat Perang Sipil terjadi, banyak *desertir* Union maupun simpatisan Konfederasi dijebloskan dalam Alcatraz. Bagi orang-orang Indian yang melawan pemerintah juga dijebloskan dalam benteng itu.

Ketika bangsa Amerika Serikat sudah terbentuk dan kondisi dalam negeri sudah tidak ada lagi perang saudara atau tak ada





Alphonse Gabriel Capone

lagi bangsa lain yang hendak menyerang Amerika Serikat maka keberadaan benteng di Alcatraz diubah fungsinya. Pulau itu yang awalnya di bawah Kementerian Pertahanan, maka sejak 12 Oktober 1933 beralih ke Kementerian Kehakiman. Selanjutnya, pada 1934, oleh Kementerian Kehakiman bangunan ini difungsikan sebagai penjara. Tentunya, ada perubahan dan penambahan bangunan berupa sel-sel.

Pada masa itu di negeri Paman Sam sudah banyak penjara yang dibangun, namun mengapa pemerintahan pada masa itu membuat lagi penjara, apalagi di pulau tandus, kecil, dan susah disinggahi. Rupanya penjara yang dibuat di Alcatraz adalah

penjara kelas berat atau penjara yang penghuninya adalah pelaku tindak kejahatan yang extraordinary alias luar biasa.

Kompas.com, 11/08/2021 menyebutkan, penjara Alcatraz dibangun ditujukan untuk narapidana-narapidana yang sering membuat masalah di penjara federal Amerika lainnya, seperti meloloskan diri, membuat keonaran, pembunuhan sesama napi, dan sebagainya.

Sebagai penjara kelas berat tentu pengamanannya di tempat itu juga sama beratnya alias sangat ketat. Menurut catatan, selama penjara itu beroperasi tidak ada satupun penghuni atau narapidana yang mendekam di sana bisa meloloskan

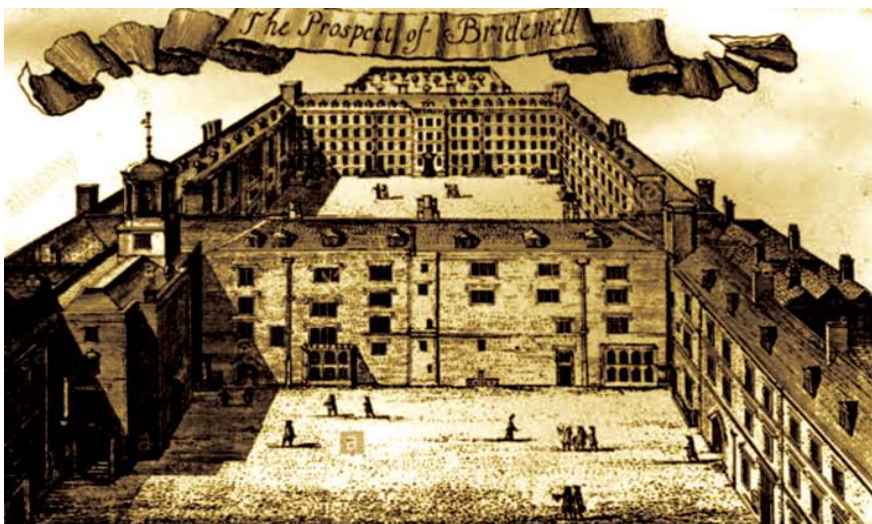
diri. Mereka yang mencoba pulang sebelum waktunya, akhirnya tertangkap kembali atau tewas tenggelam atau ditembak mati.

Salah seorang yang pernah mendekam di sana adalah Al Capone. Pria kelahiran Brooklyn, New York, 17 Januari 1899, ini *gangster*. *Gangster* adalah pelaku kejahatan dan kriminal yang terorganisir. Banyak kejahatan yang dilakukan Al Capone, seperti menjual dan memproduksi minuman keras yang memang dilarang, menjalankan bisnis prostitusi, pemerasan, menghindari pajak, dan menyuap pejabat untuk melancarkan bisnisnya.

Atas berbagai kejahatan yang dilakukan oleh pria yang bernama lengkap Alphonse Gabriel Capone itu, ia mendekam di Alcatraz selama 11 tahun. Ia masuk dalam penjara pada tahun 1931 dan bebas bersyarat pada tahun 1939. Sebagai seorang *gangster*, nama Alcapone melegenda di mana-mana, termasuk di Alcatraz sendiri. Dalam, *Kompas.com*, 21/03/2019, diceritakan, di Alcatraz, ia menyuap para penjaga agar bisa mendapatkan perlakuan istimewa. Keistimewaan inilah yang bisa membuat dia tetap bisa menjalankan bisnis haramnya. Bila penjara merupakan tempat orang di mana kebebasannya dibatasi, namun Alcapone tetap bisa melakukan apa saja, seperti bermain banjo dan mengadakan konser musik tiap minggu.

Penjahat kelas berat lain yang pernah mendekam di sana adalah Robert Franklin Stroud. Stroud merupakan pembunuh yang kejam hingga akhirnya dia divonis hukuman mati, namun keputusan ini diubah menjadi hukuman seumur hidup. Akibatnya, Stroud harus menjalani sisa hidupnya di Alcatraz.

Ada beberapa pendapat mengenai sejarah penjara. Ada yang menyebutkan, penjara sudah ada sejak Abad XVI, namun ada pula yang mengatakan sudah ada pada Abad XIII di Florence, Perancis. Bahkan, pada masa 2000 SM, di Mesir sudah ada yang namanya penjara. Dari berbagai catatan sejarah yang menyebut keberadaan penjara, banyak yang menyinggung keberadaan *bridewell*. *Bridewell* merupakan tempat penampungan bagi para gelandang-



Bridewell

an, pengemis, dan anak-anak terlantar. *Bridewell* ada pertama kali pada pertengahan Abad XVI di bekas Kastil Raja Edward VI. Para penghuni *Bridewell* dilatih ketrampilan kerja.

Ketika *Act 1630* dan *Act of 170* disahkan, banyak yang menyebutkan muncul pidana penjara yang narapidananya dibina *The Hous of Correction*. Pada awal Abad XVIII mulai dibangun dan tumbuh pidana penjara. Dalam www.academia.edu/sejarah_pidana_penjara, diungkapkan, pidana penjara diperkirakan dalam tahun-tahun Abad XVIII mulai tumbuh sebagai pidana baru berbentuk membatasi kebebasan bergerak, merampas kemerdekaan, menghilangkan kemerdekaan

penjara itu. Bagaimana penjara yang manusiawi tanpa mengurangi efek jera.

I Wayan Putu Sucana Aryana, dosen Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai Bali, dalam media.neliti.com memaparkan, di dunia terdapat tiga sistem kepenjaraan, yakni: Pertama, *Sistem Pensylvania*. Sistem ini menekankan pada penutupan secara terasing terhadap narapidana agar insyaf dan menyesal atas perbuatannya dan agar merasakan pidananya. Menurut sistem ini narapidana dimasukkan dalam sel, narapidana mendapatkan pekerjaan di selnya masing-masing dan mendapat bacaan kitab Injil. Sistem *Pensylvania* banyak dianut negara-negara Eropa. Dalam sistem

kelonggaran untuk bergaul antara narapidana satu dengan lainnya. Akhirnya setelah menjalani $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari lama pidana yang harus dijalani, narapidana dibebaskan dengan syarat.

Sucana Aryana dalam tulisannya itu menyebutkan, Indonesia tidak menganut secara tegas salah satu dari tiga kepenjaraan tersebut. Ia menyimpulkan pelaksanaan pidana penjara belum efektif untuk memberikan pembinaan dan menyiapkan mantan warga binaan untuk kembali ke masyarakat. Penjara hanya akan menjadi tempat bagi seseorang untuk belajar tentang bagaimana melakukan kejahatan yang lebih profesional. Kelebihan



I Wayan Putu Sucana Aryana



Robert F. Kennedy

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

yang harus dirasakan sebagai derita selama menjalani pidana bagi narapidana.

Sebelumnya, di laman itu disebutkan bahwa pemberian pidana merupakan perwujudan dari rasa kebencian masyarakat dan sebagai pengungkapan rasa takut masyarakat terhadap para pelanggar hukum. Oleh karena itu, sistem koreksi dari masyarakat pada saat itu, selain bertujuan agar pelaku tindak pidana tidak mempunyai kemungkinan untuk melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum, juga sekaligus dimaksudkan untuk melindungi masyarakat.

Dari sinilah kemudian muncul perdebatan soal memberlakukan pidana penjara bagi narapidana. Masalah ini berkembang karena tuntutan soal hak asasi manusia (HAM), kemanusiaan, semakin tumbuh dan berkembang. Sehingga selalu dilakukan kajian, penelitian, dan riset bagaimana idealnya

ini, narapidana tidak diberi kesempatan menerima pengunjung, dan tanpa diberi kesempatan berbicara dengan orang lain.

Kedua, *Sistem Auburn*. Sistem ini pertama kali dilaksanakan di penjara Kota Auburn di Negara Bagian New York. Kemudian, karena sistem tersebut menunjukkan keberhasilan maka pada 1925 sistem ini juga dilaksanakan di penjara Sing Sing. Menurut sistem ini, narapidana pada malam hari harus tinggal di dalam sel, sedangkan pada siang hari mereka melakukan pekerjaan secara bersama-sama, tetap antara narapidana satu dengan lainnya dilarang berbicara. Sistem ini banyak dipraktikkan di Amerika.

Ketiga, *Sistem Irlandia*. Sistem ini menghendaki agar para narapidana pada awalnya ditempatkan terus-menerus dalam sel. Tetapi kemudian dipekerjakan bersama-sama. Pada tahap ke tahap narapidana diberikan

kapasitas di lembaga pemasyarakatan akan menyebabkan tendensi kerusuhan yang semakin besar.

Apa yang disimpulkan itu benar, buktinya Alcatraz sebagai penjara kelas berat dan super ketat dalam pengawasan tidak membuat penjahat yang lainnya kapok melakukan kejahatan. Semakin bertambah penghuni penjara, maka biaya operasionalnya pun membengkak. Akibatnya, Jaksa Agung AS Robert F. Kennedy terpaksa menutup penjara selamanya itu pada 21 Maret 1963. Alasannya, karena biaya operasionalnya jauh lebih mahal dibanding penjara federal lainnya. Untuk membiayai segala keperluan untuk 250 tahanan dan 60 pegawai dan keluarganya memakan banyak dolar Amerika Serikat yang harus dikeluarkan. □

AWG/dari berbagai sumber



Penjara Nusakambangan, Alcatraz-nya Indonesia

Ada yang menyebutkan, Penjara Nusakambangan adalah Alcatraz-nya Indonesia. Mungkin ada benarnya, karena Nusakambangan dan Alcatraz sama-sama ditemukan oleh pelaut Eropa. Dua pulau itu awalnya juga dirancang sebagai benteng. Penjara Alcatraz dan Nusakambangan sama-sama diperuntukan penjahat kelas berat. Bedanya, Alcatraz sudah ditutup, sedang Nusakambangan masih berfungsi.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

ENTAH mengapa sejarah Penjara Alcatraz di Teluk San Fransisco, California, Amerika Serikat, mirip penjara di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Penghuninya, sama-sama narapidana kelas berat. Bila Pulau Alcatraz ditemukan dari hasil pelayaran oleh Pelaut Spanyol, Nusakambangan pun demikian.

Dalam *tirto.id*, 'Balada Pulau Penjara Nusakambangan: dari Amangkurat Hingga Teroris', diceritakan, pada pertengahan Abad XVI, kapal *Royal George* mendarat di timur pesisir Pangandaran. Berlabuhnya kapal berbendera Inggris tersebut membuat VOC yang merasa lebih dulu hadir di Jawa, Batavia, merasa terusik.

Untuk mencegah Inggris menguasai wilayah pesisir selatan hingga kelak bisa masuk ke Tanah Jawa, VOC yang didukung oleh pemerintah Belanda mengirimkan kapal-kapalnya ke sana. Pelayaran itu dipimpin oleh Paulus Paulusz. Paulusz sebenarnya bukanlah seorang awak kapal yang terlatih, namun ia seorang *kartografer*. Berbekal ilmu pemetaan itulah yang membuat dia bisa tiba di tempat tujuan.

Dalam pelayaran, Paulusz melihat ada suatu daratan yang bentuknya memanjang.

Daratan itu berada di antara wilayah Cilacap dan Pangandaran. Dari temuan itu, Paulusz merekomendasikan daratan itu cocok sebagai benteng pertahanan, tempat pengawasan, dan pelabuhan. Ketiga rekomendasi itu merupakan satu paket untuk VOC guna menguasai dan mengamankan otoritas pesisir selatan.

Rekomendasi itu diterima oleh VOC, namun saran dari Paulusz tidak segera dilakukan. Paling penting bagi VOC pada masa itu adalah mengklaim wilayah yang teraupung di Samudera Hindia itu sebagai otoritasnya. Klaim VOC atas pulau itu lebih kuat daripada Inggris.

Dalam perjalanan waktu, dengan semakin banyaknya pelaut Inggris berlayar ke belahan selatan (Australia dan Selandia Baru), serta selepas berakhirnya Perang Diponegoro, 1825-1830, membuat VOC menjalankan saran Paulusz, yakni membangun pulau yang bernama Nusakambangan pada 1836 sebagai benteng dan tempat pertahanan.

Untuk membangun tembok-tembok besar di pulau itu, VOC mendatangkan pekerja-pekerja dari daratan besar, Pulau Jawa. Ketika proyek berjalan, pada 1850 datanglah

wabah malaria di pulau itu. Wabah yang melanda membuat banyak pekerja terpapar hingga jatuh korban jiwa. Menghadapi serangan malaria tersebut, VOC tidak ingin proyek berhenti. Untuk mengatasi berkurangnya tenaga kerja maka didatangkanlah para narapidana sebagai gantinya.

Meski mereka menjadi pekerja, namun proses hukum yang menimpa tetap harus dijalani. Untuk menjalani proses hukum maka dibuatlah penjara bambu. Penjara sementara itu berada di Karang Bolong. Penjara bambu yang kapasitasnya mencapai 300 orang itu merupakan tempat tinggal sekaligus penjara bagi narapidana yang dipekerjakan di sana.

Peristiwa wabah malaria yang terjadi pada tahun 1850, kembali melanda pada 1862. Akibatnya, Nusakambangan dijadikan sebagai pulau yang tertutup, diisolasi, dengan tujuan memutus rantai penularan. Gelombang kedua wabah itu pastinya juga membuat korban jiwa. Pembangunan benteng pun terhenti.

Setelah dirasa aman dari wabah, awal Abad XX, pembangunan dilanjutkan. Selepas pembangunan selesai, rupanya ancaman kepada Belanda yang menguasai Jawa telah



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

berakhir. Pada masa itu, sepertinya bangsa-bangsa Eropa sudah mengkapling-kapling wilayah jajahan dan di antara mereka ada kesepakatan tidak saling mengganggu. Inggris sepertinya sudah puas menguasai Australia dan Selandia Baru, sehingga tidak lagi bernafsu merebut Jawa dari Belanda.

Benteng dan tempat pertahanan yang sudah dibangun oleh VOC yang selanjutnya dipegang pemerintah Belanda itu kurang berfungsi, sebab tidak ada lagi ancaman dari luar. Pemandahan narapidana ke Nusakambangan yang awalnya dipekerjakan di sana dan selanjutnya di sana sudah berdiri penjara bambu, membuat Belanda berpikir untuk menjadi Nusa-

kambangan sebagai penjara. Sebagai tindak lanjutnya, Belanda menetapkan Nusakambangan sebagai Poelaoe Boei (Pulau Bui). Bui artinya penjara. Keputusan itu ditetapkan pada tahun 1908.

Untuk menjadikan Nusakambangan sebagai Pulau Bui, Belanda dari waktu ke waktu terus membangun sel-sel. Dalam *jateng.suara.com*, 22 Juli 2021, diuraikan, pada 1910, dibangun Penjara Permisan. Penjara ini memiliki kapasitas 700 orang. Seperti kali pertama narapidana didatangkan di sana, narapidana yang ada pada tahun itu juga dipekerjakan, namun kali ini mereka dijadikan buruh di perkebunan karet.

Kejahatan yang ada masa itu bisa jadi

terus meningkat, terbukti dua tahun setelah Penjara Permisan dibangun, Belanda kembali membangun Penjara Karang Anyar dan Penjara Nirbaya. Pembangunan dua penjara sekaligus dilakukan pada tahun 1912. Masing-masing penjara mampu menampung 750 tahanan.

Selanjutnya, berturut-turut dibangun Penjara Batu pada 1924, Penjara Besi 1927, dan Penjara Gligier dan Penjara Karang Tengah pada 1928. Disebutkan, Belanda membangun bangunan penjara terakhir di Nusakambangan pada 1935. Penjara ini adalah Penjara Lumus Buntu.

Bila Alcatraz sudah ditutup oleh pemerintah Amerika Serikat, penjara di Nusakambangan dari kali pertama dibuka hingga saat ini masih difungsikan sebagai penjara. Bila di Alcatraz ada upaya pelarian diri, di tempat ini juga pernah terjadi.

Dalam *tirto.id* diceritakan, pada 1979, narapidana yang bernama Sastrowiyono berhasil lolos dari penjara. Perampok kejam itu lebih dulu harus melompati pagar setinggi 4 meter. Berhasil lolos dari tembok, ia mengarungi sungai di sisi utara pulau. Berhasil sampai di daratan Cilacap, selanjutnya Sastro berhasil sampai di kampung halamannya, Lampung. Pelarian yang dilakukan sia-sia, sebab dia berhasil ditangkap kembali.

Apa yang terjadi pada 1979 terulang pada 1982. Narapidana Johny Indo dan Bang Timong sebagai provokator bersama puluhan narapidana lainnya mengeroyok petugas. Mereka lolos dari bangunan penjara, namun sebelum keluar pulau di antara mereka ada yang ditangkap kembali, bahkan ada yang dihujani timah panas alias ditembak mati, dengan alasan tidak mau menyerahkan diri.

Dalam *Wikipedia*, mereka yang pernah di sana adalah, Johny Indo, Kusni Kasdut, Pramoeoya Ananta Toer, Tommy Soeharto, Bob Hasan, Amrozi, Imam Samudra, Mukhlas, Abu Bakar Ba'asyir, Jhon Kei, Umar Patek, Kelompok Bali Nine. Mereka memiliki kasus masing-masing dan terbilang kasus *extraordinary* alias kasus luar biasa. □

AWG/dari berbagai sumber





Kalisosok, Penjara Seram Tapi Enak

Penjara Kalisosok dibangun jauh lebih dahulu dibanding Benteng Alcatraz. Di Kalisosok pernah tinggal para pahlawan bangsa. Banyak cerita yang menyeramkan dari penjara itu, namun ada kesaksian tentang makanan yang enak dan kamar yang bersih dari tempat itu. Kalisosok sudah ditutup. Banyak keinginan agar penjara yang dibangun masa Daendels itu dijadikan cagar budaya dan wisata sejarah.



Purnawan Basundoro



Herman Willem Daendels

MESKI jabatan Gubernur Jenderal Hindia Belanda terbilang singkat, dari 1808 hingga 1811, namun banyak catatan yang menorehkan nama Herman Willem Daendels dalam sejarah Indonesia. Salah satu yang dibangun Daendels di Jawa adalah Penjara Kalisosok. Penjara itu berada di Kota Surabaya, Jl. Kasuari No. 5, Krembangan. Dari berbagai sumber yang ada, penjara itu dibangun pada 1 September 1808. Tempat, di mana dibangun penjara itu, awalnya adalah loji, gedung besar, milik VOC, seluas 3,5 hektare. Bangunan ini berada di Surabaya Utara, di Jembatan Merah Plaza. Berdampingan dengan Jembatan Merah.

Dalam *tugujatim.id*, 9 Juli 2021, ahli sejarah Universitas Airlangga, Prof. Dr. Purnawan Basundoro, SS., MHum., menguraikan, sebelum Kalisosok dibangun sudah ada dua penjara, yakni *Binnenboei*, penjara dalam kota; dan *Buitenboei*, penjara luar kota. Kalisosok merupakan penjara dalam kota. "*Binnenboei* bertempat di lokasi yang kemudian dikembangkan menjadi Penjara Kalisosok", ujar Purnawan dalam media itu. Sedangkan *Buitenboei* berada di Pasar Besar. Dari dua penjara itu, pada 1845, *Buitenboei*

diusulkan untuk dibongkar, sedang *Binnenboei* diperbesar.

Usulan memperbesar penjara dalam kota disetujui pada 1848 dengan anggaran sebesar 60.000 Gulden. Pembangunan yang dimulai pada 1849 membuat tersedianya 12 *sell* (ruang tahanan) di tempat itu. Pada tahun 1850, penjara hasil renovasi itu sudah digunakan.

Himpunan informasi *Liputan6.com*, 29 Agustus 2019, menyebutkan, Kalisosok

merupakan penjara paling ditakuti oleh para penghuni, sebab ruangan yang ada sempit, gelap, dan pengap. Dinding antarsel dibuat sangat tebal. Satu ruangan hanya mampu menampung 20 orang, namun karena banyaknya narapidana membuat satu ruangan bisa dijepit 90 orang.

Di Kalisosok juga ada ruang bawah tanah. Ruang ini disebut sebagai tempat melakukan penyiksaan. Pada masa pendudukan Jepang bisa jadi hal demikian kerap di-



FOTO-FOTO: ISTIMEWA



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

lakukan. Di tahun 1945, Jepang kalah dalam Perang Dunia II. Saat itu di Surabaya masih banyak tentara Jepang, bahkan mereka masih menguasai Penjara Kalisosok. Orang-orang dan tentara Belanda pun banyak yang ditahan oleh Jepang, salah satunya Kolonel Huiyer. Kedatangan Sekutu di Surabaya tidak hanya ingin menguasai kembali Indonesia, namun mereka juga ingin membebaskan orang-orang Belanda yang ditahan oleh Jepang. Untuk itulah, Sekutu menggempur Penjara Kalisosok. Operasi militer yang dilakukan Sekutu untuk merebut Kalisosok berhasil, orang-orang dan tentara Belanda berhasil dibebaskan.

Sempitnya ruangan diakui oleh Purnawan. Dia mengungkapkan, di Kalisosok ada ruang berukuran kecil, 2,5 meter x 5 meter, dibagi menjadi dua. Ruangan itu mungkin hanya muat dua-tiga orang saja. "Tak terbayangkan susahannya jika ruang tersebut diisi beberapa

orang", tuturnya.

Dari cerita-cerita yang berkembang di masyarakat terhadap Kalisosok, banyak yang menyebut bahwa penjara itu adalah penjara angker. Cerita lebih menyeramkan ketika dibumbui kisah-kisah mistis yang katanya pernah dialami oleh seseorang. Simak *jawapos.com*, 21 Maret 2021, yang menulis tentang Penjara Kalisosok dengan judul: *Sebelum Masuk Penjara Kalisosok Permisinya Dulu Sama Guno dan Grado*. Kedua nama itu diceritakan sebagai makhluk tak tampak yang sebagai penjaga bangunan penjara.

Ketika masyarakat menyebut penjara itu angker karena banyaknya cerita mistis, hal itu dibenarkan oleh Purnawan. Dia mengatakan, Kalisosok menyeramkan karena keketatan dalam penjagaan. Dia mengungkapkan, ada tahanan yang kakinya digelangi atau dipasang dengan bandul bola

besi yang berat. Hal demikian dilakukan agar tahanan itu tidak bisa melarikan diri.

Apa yang diungkapkan itu sama dengan penjara yang ada di Kantor Pemerintahan Hindia-Belanda (Batavia) yang sekarang menjadi Museum Jakarta. Di penjara ini, tahanan tidak hanya digelangi dengan bandul bola besi, namun juga harus berada dalam ruangan yang sempit dan atap yang pendek sehingga mereka tidak bisa berdiri.

Meski Kalisosok digambarkan demikian menyeramkan, namun Purnawan menyatakan, penjara ini merupakan tempat yang paling nyaman, fasilitasnya lengkap, dan makanannya tersedia dengan enak. Ada seorang tahanan pribumi mengatakan, selama mendekam di sana, dia diberi makanan yang enak. Kesaksian anggota militer Belanda yang ditahan juga menyebut kamar yang ada dan kebun yang selalu bersih, serta makanan yang enak. Hal demikian membuat suasana penjara menjai nyaman.

Penjara Kalisosok yang dibangun pada 1808 akhirnya ditutup oleh pemerintah pada tahun 2000-an. Mereka yang masih mendekam di tahun-tahun itu dipindahkan ke Lapas Medaeng atau Porong, Sidoarjo, Jawa Timur.

Saat ini masih terjadi kesimpangsiuran soal kepemilikan lahan seluas 3,5 hektare itu. Akibatnya, bangunan menjadi tidak jelas mau dikemanakan dan mau diapakan. Banyak pihak ingin bangunan yang sudah mulai rapuh, runtuh, ditumbuhi semak belukar, dirusak tangan tidak bertanggungjawab itu dijadikan cagar budaya, tempat belajar sejarah, dan wisata kota. □

AWG/dari berbagai sumber



Penjara Kalisosok, Surabaya



Ujang Hamzah

Ketua RT 01 Desa Cibeber Jawa Barat

Penanganan Pandemi Harus Cepat

PANDEMI Covid-19 yang melanda Indonesia sudah banyak memakan korban rakyat Indonesia. Turunnya kondisi perekonomian rakyat, terutama rakyat kecil, sudah tampak nyata. Tapi, saya melihat pemerintah sudah sangat serius dalam penanganan pandemi ini.

Saya rasa sudah sangat baik usaha pemerintah itu. Upaya yang cepat, keras, dan terus-menerus untuk menekan laju penyebaran virus akan semakin meringankan beban rakyat, apalagi sampai tuntas menghentikan pandemi.

Saya berharap, berbarengan dengan program-program menghadapi pandemi, dalam jangka pendek juga mesti dilakukan berbagai program untuk meringankan beban masyarakat, seperti penyaluran bantuan baik langsung ataupun tidak langsung.

Saya melihat berbagai elemen masyarakat, terutama pejabat negara, banyak yang memperlihatkan kepeduliannya kepada rakyat. Banyak dari mereka yang turun langsung melihat kondisi rakyat lalu memberikan bantuan. Ini mesti diperbanyak dan diperluas lagi, kalau bisa ke daerah-daerah pelosok di berbagai wilayah Indonesia. □

DER



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Ibu Lasmi

Warga Desa Peuteuycondong Cianjur

Doa Bersama demi Keselamatan Bangsa



SEBAGAI rakyat kecil, saya hanya bisa menghaturkan terima kasih dan apresiasi sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang sudi turun langsung ke bawah, mengunjungi rakyat untuk memberikan bantuan dan dorongan semangat di masa pandemi ini.

Seperti yang dilakukan Pimpinan MPR, Bapak Syarifuddin Hasan, yang rela berkeliling kampung memberikan bantuan kepada kami yang sangat membutuhkan. Aspirasi saya adalah, mesti semakin banyak Bapak-Bapak di atas sana, terutama yang menjad wakil rakyat, agar gencar turun, membangkitkan kembali rakyatnya dari keterpurukan.

Kami akan memberikan doa yang terbaik untuk mereka. Saya harap juga ke depannya jika bisa jangan lagi terjadi pandemi seperti ini lagi. Kami berterima kasih sekali lagi kepada pemerintah yang sudah berusaha dan tetap akan berusaha agar rakyat terbebas dari pandemi. □

DER

KH. Ahmad Dahlan

Menyadarkan **Bangsanya** Sebagai *Kaum Terjajah*



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

PANDEMI Covid-19 yang mulai terdeteksi di Indonesia sejak awal tahun 2020 telah menyebabkan banyak kerugian. Pandemi telah menyebabkan terganggunya berbagai sektor kehidupan, terutama sektor ekonomi dan pendidikan. Pandemi telah menyebabkan bertambah tingginya angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia, dan terganggunya komunikasi sosial di masyarakat.

Tapi, di sisi lain, pandemi juga menyadarkan umat manusia bahwa pandemi adalah musuh bersama, dan harus dihadapi secara bersama-sama pula. Di masa pandemi tumbuh kembali semangat gotong-gotong di tengah masyarakat Indonesia. Semangat saling tolong-menolong ini ditunjukkan oleh warga masyarakat, baik secara perseorang maupun mengatasnama organisasi kemasyarakatan.

Salah satu organisasi keagamaan yang intens mengulurkan tangan membantu penanganan pandemi Covid-19 adalah Muhammadiyah. Sebanyak 83 dari 116 rumah sakit milik Muhammadiyah berpartisipasi aktif dalam penanganan pasien Covid-19 di Indonesia. Juga 75.000 relawan, baik tenaga kesehatan maupun kemanusiaan, turut ambil bagian dalam “perang” melawan virus korona.

Bayangkan, untuk mendukung penanganan

pandemi ini, organisasi yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ini ikut menggelontorkan dana lebih dari Rp 1 Triliun. Aksi kemanusiaan ini dilakukan oleh Muhammadiyah sebagai pengejawantahan dari strategi dasar perjuangannya, yaitu dakwa Islam, ‘amar ma’ruf nahi munkar’ dengan masyarakat sebagai medan perjuangannya.

Gerakan dakwah Islam, ‘amar ma’ruf nahi munkar’ ini memang telah melekat sebagai jati diri Muhammadiyah semenjak awal kelahirannya. Untuk menjaga marwah Muhammadiyah ini, KH. Ahmad Dahlan telah meninggalkan pesan yang sangat melegenda di kalangan warga Muhammadiyah. Pesan itu berbunyi: “Hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah.

Siapa KH. Ahmad Dahlan yang waktu mudanya bernama Muhamad Darwis? Dia adalah putera keempat dari tujuh bersaudara, putera pasangan KH. Abu Bakar dan Nyai Abu Bakar. Lahir di Yogyakarta pada 1 Agustus 1868, dan meninggal di usia 54 tahun pada 23 Februari 1923. Sang Pembaharu—begitu KH. Ahmad Dahlan dijuluki—dimakamkan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebelum mendirikan Muhammadiyah, 18 November 1912, Ahmad Dahlan ikut terlibat di berbagai pergerakan. Yaitu, Jam’iyatul

Khair, Budi Utomo, Syarikat Islam, dan Komite Pembela Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Selain itu, Ahmad Dahlan juga dikenal sebagai wirausahawan yang cukup berhasil. Ia ikut berdagang batik, profesi yang saat itu tumbuh subur seperti rumput di musim hujan.

Upaya Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah bukan tanpa sandung. Fitnah, tuduhan, dan hasutan datang bertubi-tubi. Ia dituduh sebagai kiai palsu yang merintis agama baru. Karena Ahmad Dahlan dekat dengan orang-orang Belanda, dan mengajar di OSVIA Magelang —sekolah khusus Belanda. Sang Kiai juga bergaul dengan tokoh-tokoh Budi Utomo yang kebanyakan dari golongan priyayi. Bahkan ada yang berusaha membunuhnya. Namun, ia tetap bergeming dan melanjutkan cita-cita perjuangan pembaruan Islam.

KH. Ahmad Dahlan adalah sosok yang memiliki pemikiran sangat maju. Di zamannya, dia sudah berkeinginan agar orang Islam memiliki wawasan luas. Ahmad Dahlan tidak menghendaki umat Islam terpaku pada literatur dari orang Islam sendiri. Bagi Ahmad Dahlan, untuk mencari kebenaran, orang tidak boleh merasa benar sendiri. Sehingga, orang harus membuka diri, berdialog dan berdiskusi dengan semua pihak, walau berbeda keyakinan sekalipun.



Di antara berbagai keteladanan yang telah ditunjukkan KH. Ahmad Dahlan, salah satunya telah menjadi kenangan yang masyhur di kalangan Muhammadiyah. Itu terjadi di sisa usianya, sebelum menghadap sang Khaliq. Saat itu kesehatan Ahmad Dahlan kian memburuk. Karena itu, dokter membatasi kunjungan para tamu. Untuk itu, sang dokter berinisiatif memasang tanda larangan bertamu, termasuk bagi para pengurus Muhammadiyah.

Tapi, berlawanan dengan anjuran dokter, sang Kyai justru memanggil masuk tamunya ke ruangan tempat istirahatnya. Di tempat itu, Ahmad Dahlan meminta progres amal Muhammadiyah yang telah dan sedang dikerjakan oleh pimpinan dan pengurus Muhammadiyah. Akibatnya, sang Kiai bukannya beristirahat, tapi malah aktif memikirkan amal soleh buat umat dan masyarakat tanpa henti.

Nyai Dahlan yang mendampingi sang Kiai tak kuasa melarang suaminya bersua dengan para tamu yang datang. Nyai Dahlan tak ingin menyakiti hati suaminya. Dia hanya menyampaikan isi hatinya seraya meneteskan air mata. "Kiai, bukankah dokter sudah memberi nasihat agar melepas fikiran-fikiran berat supaya penderitaan kiai berkurang. Cobalah memenuhi nasihat dokter, agar kesehatan Kiai cepat kembali," ujar Nyai Dahlan pada sang Kiai.

Mendengar pinta istrinya, KH. Ahmad Dahlan dibantu K.H. Ibrahim bangun dari tempat tidurnya. Raut wajahnya terlihat masam, pertanda marah. Sembari menunjuk ke arah istrinya, dengan nada pelan KH. Ahmad Dahlan berucap: "Sekarang iblis menjelma berwujud Nyai memecatku dari Islam- Muhammadiyah. Kemarin iblis sudah menjelma menjadi dokter, rupanya tidak puas lantas menjelma berupa Nyai. Oh, Nyai Iblis. Lupakah kau akan pelajaranku "Wa laa tamuutunna illaa wa antum muslimuun?" (bertakwalah kamu kepada Allah dengan



sebenarnya takwa. Dan, janganlah sekali-kali kamu mati, melainkan dalam keadaan beragama Islam).

"Sekarang pergilah, jangan mendekat aku," kata Kiai Ahmad Dahlan pada Nyai Dahlan. Seketika itu Ibu Nyai menangis tersedu-sedu sambil minta maaf sebesar-besarnya. "Maaf atas perbuatanku yang dipandang salah itu," ungkap Nyai Dahlan sedih.

Pengakuan terhadap perjuangan Kiai Ahmad Dahlan bukan hanya datang dari kalangan umat Islam, terutama Muhammadiyah, melainkan juga datang dari pemerintah. Pada 1961, sesuai surat Keputusan Presiden No. 657, KH. Ahmad Dahlan ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional. Alasan peng-anugerahan gelar Pahlawan Nasional itu karena Ahmad Dahlan dianggap sebagai

pelopor kebangkitan umat Islam untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah.

Selain itu, Muhammadiyah juga dinilai telah memurnikan ajaran Islam. Menuntun kemajuan, kecerdasan, dan beramal bagi masyarakat dengan dasar iman dan juga Islam. Muhammadiyah memelopori amal usaha sosial dan pendidikan yang amat diperlukan bagi kebangkitan serta kemajuan bangsa. Sedangkan Aisyiyah (organisasi otonom Wanita Muhammadiyah) memelopori pendidikan bagi kaum perempuan, dan berfungsi sosial, seperti kaum pria.

Sikap dan pandangan hidup yang patut diteladani dari sosok Sang Pencerah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, adalah tetap sederhana lainnya masyarakat kebanyakan. □

MBO

Amandemen Terbatas Hadirkan PPHN

Bamsoet Kecil Kemungkinan Ada Penumpang Gelap



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI, Bambang Soesatyo, menegaskan, keberadaan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sangatlah mendasar dan mendesak. PPHN diperlukan sebagai bintang panduan arah dan strategi pembangunan nasional. Selain untuk memastikan bahwa proses pembangunan nasional merupakan manifestasi dan implementasi dari ideologi negara dan falsafah bangsa, yaitu Pancasila.

Bamsoet menegaskan, tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan atas rencana amandemen terbatas untuk menghadirkan kembali PPHN. “Kecil kemungkinan ada penumpang gelap untuk mengubah Pasal 7 terkait perodesasi, karena mekanismenya diatur ketat di dalam Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945. Apalagi semua partai politik saat ini telah siap-siap running di 2024,” ungkap Bamsoet saat Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Universitas Pendidikan Nasional Bali secara luring dan daring, Jumat (17/9/21).

Turut serta sebagai pembicara Guru Besar bidang Hukum Universitas Pendidikan Nasional I Nyoman Budiana. Acara dihadiri oleh para pimpinan Universitas Pendidikan Nasional, antara lain Rektor Nyoman Sri Subawa, Wakil Rektor bidang Pengembangan Akademik Ni Wayan Widhiasthini, Wakil Rektor bidang SDM & Keuangan A.A.A. Ngr. Sri Rahayu Gorda, Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan I Made Wiryadarma, serta civitas akademika Universitas Pendidikan Nasional.

Lebih lanjut Bamsoet menyatakan, keberadaan PPHN

mengisyaratkan pesan penting bahwa pembangunan nasional diselenggarakan dalam kerangka menjaga dan memperkuat ideologi negara agar tetap menjadi karakter dan jiwa bangsa. “Ke depan berbagai tantangan kebangsaan akan semakin kompleks dan dinamis sehingga perlu dibangun benteng ideologi dan penguatan karakter bangsa melalui pembangunan wawasan kebangsaan,” ujar Bamsoet.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III Bidang Hukum DPR RI ini memaparkan, pasca perubahan UUD 1945, fungsi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) digantikan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025. Selanjutnya, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) disusun berlandaskan visi dan misi calon presiden dan wakil presiden terpilih.

“Dalam implementasinya, berbagai peraturan perundang-undangan tersebut mempunyai kecenderungan yang bersifat eksekutif sentris dan menyisakan beragam potensi persoalan. Antara lain implementasi RPJPN secara tidak konsisten dalam setiap periode pemerintahan, serta ketidakselarasan antara sistem perencanaan pembangunan nasional dan sistem perencanaan pembangunan daerah. Akibatnya, berpotensi menghasilkan program pembangunan yang tidak saling mendukung, bahkan mungkin saling menegasikan



satu sama lain,” jelas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPi dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menuturkan, dengan adanya ketidakpastian kesinambungan kebijakan dan program pembangunan nasional pada akhirnya mendorong lahirnya wacana publik yang membawa arus balik kesadaran untuk menghidupkan kembali haluan negara ‘model GBHN’ atau hadirnya PPHN.

“Gagasan untuk mereformulasikan

sistem perencanaan pembangunan nasional telah direkomendasikan oleh MPR periode 2009-2014. Rekomendasi tersebut ditindaklanjuti oleh MPR periode 2014-2019 dengan memunculkan gagasan melakukan perubahan terbatas terhadap UUD NRI Tahun 1945 guna mengembalikan wewenang MPR menetapkan pedoman pembangunan nasional atau PPHN,” urai Bamsoet.

Kepala Badan Penegakan Hukum, Per-

tahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menandakan, untuk menghadirkan PPHN diperlukan amendemen terbatas UUD NRI Tahun 1945. Perubahan terbatas UUD NRI Tahun 1945 hanya akan dilakukan pada dua pasal, yaitu Pasal 3 yang memberi kewenangan kepada MPR untuk mengubah dan menetapkan PPHN, serta Pasal 23 yang mengatur kewenangan DPR untuk menolak RUU APBN yang diajukan oleh Presiden apabila tidak sesuai dengan PPHN.

“Secara substansi, PPHN hanya akan memuat kebijakan strategis yang akan menjadi rujukan atau arahan bagi penyusunan haluan pembangunan oleh pemerintah. PPHN harus dapat menggambarkan wajah Indonesia untuk 25 tahun, 50 tahun, atau bahkan 100 tahun yang akan datang, mampu menjawab kebutuhan Indonesia di era milenial, serta mampu memberikan arahan untuk menjawab berbagai tantangan dan dinamika pembangunan, baik bersifat domestik maupun global,” pungkas Bamsoet. □

Talkshow 'Menuju Amandemen UUD NRI 1945'

Amandemen Terbatas UUD NRI 1945 Hanya Bahas PPHN



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI, Bambang Soesatyo, menuturkan, saat ini bangsa Indonesia sedang menginjakkan kaki pada fase akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Karenanya, di tahun 2021-2022 merupakan waktu yang ideal untuk meletakkan dasar legalitas yang tepat dalam menyusun Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai haluan negara dalam program pembangunan jangka panjang.

Urgensi menghadirkan PPHN dicetuskan oleh MPR RI periode 2009-2014. Sebagaimana tertuang dalam Keputusan MPR Nomor 4/MPR/2014 yang mengamanatkan dalam rangka mewujudkan kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang berkesinambungan dan terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan daerah, maka perlu dirumuskan kembali sistem perencanaan pembangunan yang tepat. Berorientasi pada demokrasi dan kesejahteraan rakyat.

"Dilanjutkan MPR periode 2014-2019 melalui Keputusan MPR Nomor 8/MPR/2019 merekomendasikan kepada MPR Periode

2019-2024 untuk mengkaji substansi dan bentuk hukum PPHN. Termasuk membangun konsensus politik dalam penetapan bentuk hukumnya," ujar Bamsuet dalam talkshow 'Menuju Amandemen UUD NRI Tahun 1945' yang diselenggarakan *Tribun Network Kompas Gramedia*, secara virtual dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, di Jakarta, Rabu (22/9/21).

Turut menjadi narasumber, antara lain Wakil Ketua MPR Syarifuddin Hasan, Pakar Hukum Tata Negara Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, serta Ketua Dewan Pertimbangan Forum Rektor Indonesia Prof. Dr. Arif Satria.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III Bidang Hukum dan Keamanan DPR RI ini menjelaskan, menindaklanjuti berbagai rekomendasi MPR RI periode 2009-2014 dan 2014-2019, MPR RI periode 2019-2024 melalui Badan Pengkajian MPR sedang menyelesaikan rancangan PPHN beserta naskah akademiknya. Dari kajian Badan Pengkajian MPR RI yang disampaikan kepada Pimpinan MPR RI pada 18 Januari 2021,

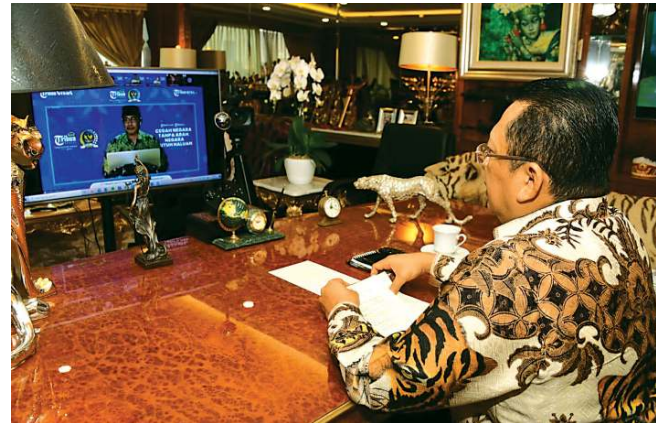
bentuk hukum yang ideal terhadap PPHN adalah melalui Ketetapan MPR RI. Bukan melalui undang-undang yang bisa dibatalkan oleh Perppu, serta bukan dimasukkan secara langsung dalam konstitusi.

"Untuk menghadirkan PPHN melalui Ketetapan MPR terlebih dahulu harus dilakukan amandemen terbatas terhadap UUD NRI Tahun 1945. Amandemen terbatas hanya menambahkan satu ayat di pasal 3 UUD NRI Tahun 1945 terkait kewenangan MPR menetapkan PPHN dan Pasal 23 tentang Persetujuan RUU APBN oleh DPR yang harus merujuk garis-garis kebijakan PPHN. Ini pun perlu dukungan seluruh partai politik, satu saja tidak setuju, amandemen sulit dilakukan," jelas Bamsuet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, jika seluruh partai politik sepakat terhadap pentingnya PPHN serta bentuk hukumnya melalui Ketetapan MPR maka diharapkan proses amandemen selesai di tahun 2022. Dilanjutkan penyesuaian peraturan perundang-undangan terkait PPHN pada 2023, dan pada 2024 nanti, calon presiden dan calon wakil presiden dapat menetapkan visi dan misi sesuai dengan PPHN.

"Amandemen konstitusi tersebut tidak akan menyasar hal lain di luar PPHN. Misalnya menambah perodesasi jabatan kepresidenan menjadi tiga periode, ataupun memperpanjang beberapa tahun masa jabatan presiden. Mengingat tata cara amandemen konstitusi telah diatur pada Pasal 37 UUD NRI 1945, dan Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib MPR RI di pasal 101 sampai dengan Pasal 109," terang Bamsuet.

Senada dengan Bamsuet, Ketua Dewan Pertimbangan Forum Rektor Indonesia Prof. Dr. Arif Satria menegaskan, membangun bangsa tidak bisa hanya berdimensi 5 tahunan. Namun, memerlukan perencanaan



jangka panjang yang terukur, obyektif, dan implementatif. Sebagaimana Tiongkok yang mampu memiliki visi jangka panjang, dan kemudian diterjemahkan ke dalam proyek tahunan yang sistematis. Masih menyambung terus, meski kepemimpinan politik berganti secara periodik.

“Tidak mungkin Tiongkok membangun Great Wall sepanjang 21 ribu kilometer hanya dalam kurun waktu 5 tahun. Tidak mungkin juga Great Wall dibangun hanya dalam satu rezim kepemimpinan politik. Ternyata, butuh

kurang lebih 1.800 tahun untuk bisa menyelesaikan Great Wall yang bersejarah. Kini Tiongkok kembali hadir dengan gagasan besar tentang Blue Economy Valley di Qingdao, sebuah proyek raksasa untuk menunjukkan kepada dunia, bahwa Tiongkok adalah sentral ekonomi kelautan masa depan,” tegas Arif Satria.

Arif Satria menambahkan, kondisi Singapura dan Indonesia di tahun 1960-an hampir sama. Kini kondisi Singapura berubah jauh lebih maju karena mempunyai visi besar yang di-

wujudkan melalui langkah-langkah strategis, sistematis, dan berkesinambungan. Singapura telah menjadi pusat pelabuhan terbesar kedua di dunia setelah Shanghai. Singapura juga telah menjadi pusat perdagangan dunia.

“Kita tentu ingin Indonesia menjadi bangsa besar. Proses menuju bangsa besar tidak sebentar. Diperlukan usaha dan perjuangan yang besar. Upaya utamanya adalah proses perencanaan jangka panjang yang matang, terukur, dan berkesinambungan,” pungkas Arif Satria. □



Yayasan Al Barokah Jayapura

Tidak Ada Agenda Perpanjangan Masa Jabatan Presiden



WAKIL Ketua MPR RI Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA., menegaskan, salah satu dari Empat Pilar yang disosialisasikan MPR adalah UUD NRI Tahun 1945. Karena itu, seharusnya MPR jadi teladan dalam memegang teguh pelaksanaan ketentuan Konstitusi. Dan, menjalankan amanat reformasi, termasuk yang terkait dengan pembatasan masa jabatan Presiden. Belakangan, masa jabatan Presiden ini banyak dipolemikkan oleh pihak-pihak dari luar MPR.

Terkait amandemen UUD NRI Tahun 1945, ada dua isu yang dibicarakan publik. Yaitu, Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dan perpanjangan masa jabatan Presiden. Semua itu, menurut Hidayat, penting untuk didudukkan sesuai konstitusi dan dinamika di MPR. "Ini penting, karena banyak isu di luar MPR terkait wacana amandemen yang bisa mengalihkan dan menggerus kepercayaan rakyat terhadap Parlemen, serta Lembaga Negara," ujar Hidayat saat melakukan sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama Yayasan Al Barokah di Jayapura, Papua, Sabtu (11/9/2021).

HNW, sapaan akrab Hidayat Nur Wahid, mengingatkan, peluang terjadinya amandemen diatur dalam Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945. Amandemen bisa dilakukan jika memenuhi persyaratan, apalagi juga ada kajian di MPR untuk menghadirkan kembali GBHN dengan nama PPHN. Tetapi itu bukanlah rencana, apalagi program final MPR

untuk melakukan amandemen. Melainkan pelaksanaan terhadap Rekomendasi dari MPR periode sebelumnya.

HNW menyatakan, kajian untuk hadirnya amandemen UUD NRI Tahun 1945. Faktanya, tidak seluruh fraksi di MPR RI menyetujui amandemen UUD. Misalnya, Fraksi PKS istiqamah menolaknya. Bahkan, menurut PKS, Partai Demokrat, dan Gerindra, PPHN bisa dihadirkan tanpa amandemen. Cukup melalui Undang-undang.

"Apalagi menimbang Negara lagi berjuang atasi Covid-19, sementara rencana materi amandemen bukan hal yang sangat diperlukan oleh negara dan rakyat. Argumentasi penolakan amandemen itu semakin kuat," ujarnya.

Menurut HNW, wacana amandemen UUD

juga belum jadi keputusan final, karena kajiannya belum selesai dan belum disepakati. Apalagi belum ada satupun anggota MPR RI yang mengusulkannya. Merujuk Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945 ada batasan aturan yang sangat jelas dan tegas. Yaitu, usulan yang bisa ditindaklanjuti oleh MPR untuk melakukan amandemen hanyalah yang diusulkan oleh anggota MPR, dengan aturan yang sangat ketat. Bukan yang diwacanakan oleh individu mantan pimpinan partai, atau aktivis lembaga survei, atau kelompok relawan.

"Anggota MPR yang mengusulkan amandemen UUD NRI Tahun 1945 minimal berjumlah 1/3 dari total jumlah anggota MPR. Usulan disampaikan secara tertulis dengan menyebutkan alasan perubahan dan alternatif usulannya. Itu semua harus





sudah dipenuhi sebelum sidang Paripurna MPR. Begitu aturan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945. Jadi tidak bisa tiba-tiba, dengan mengusulkan pasal titipan baru, soal perpanjangan masa jabatan Presiden misalnya. Jadi, syaratnya sangat ketat. Berbeda dengan kasus lain ataupun ketentuan UUD 45 sebelum perubahan yang bisa terjadi keputusan yang mendadak," jelasnya.

Masa Jabatan

Oleh karena itu, proses amendemen UUD NRI Tahun 1945 di MPR RI, apabila memang akan terjadi, hanya akan dilakukan secara ketat sesuai ketentuan UUD NRI Tahun 1945 yang berlaku. Bukan karena desakan opini ataupun survei. Karenanya, HNW yang juga Wakil Ketua Majelis Syura PKS, percaya bahwa ketentuan Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 yang membatasi dua kali masa jabatan Presiden tidak akan diamandemen.

"Tidak ada kajian dan agenda MPR terkait perubahan UUD untuk memperpanjang masa jabatan Presiden. Yang baru ada kajian terkait dengan PPHN. Itu pun tidak semua Fraksi dan Kelompok DPD setuju diberlakukannya melalui amendemen UUD NRI Tahun 1945," ujarnya.

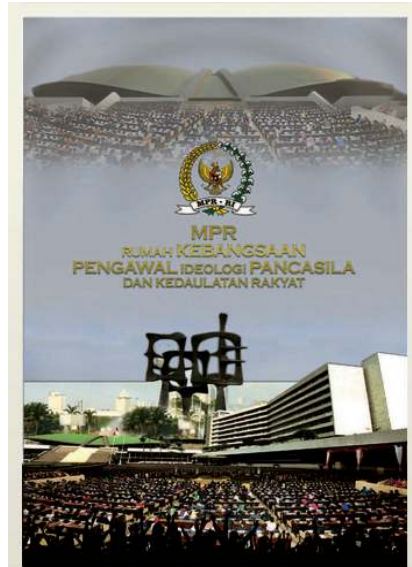
"Di tengah manuver yang mengusulkan perpanjangan masa jabatan Presiden, tidak ada satupun Pimpinan maupun anggota MPR yang secara resmi ikut mengusulkan perubahan UUD NRI Tahun 1945 untuk memperpanjang masa jabatan Presiden. Itu tandanya, memang di MPR tidak ada agenda perubahan UUD NRI Tahun 1945 untuk memperpanjang masa jabatan Presiden," tambahnya.

Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 yang membatasi masa jabatan presiden hanya dua periode merupakan ketentuan yang krusial. "Itu merupakan tuntutan reformasi yang terpenting. Dari 6 tuntutan Reformasi, salah satunya adalah mengamandemen UUD (Pasal 7) untuk membatasi masa jabatan presiden hanya dua periode saja," ujarnya.

Menurut HNW, bangsa Indonesia telah melewati sejarah kelam di mana Presiden yang terlalu lama berkuasa, bisa dipilih berkali-kali tanpa batasan, sehingga menghadirkan penumpukan kekuasaan yang ujungnya otoriter dan koruptif. Itu terjadi karena UUD tidak tegas membatasi masa jabatan presiden. Jadi, agar sejarah itu tidak terulang maka Reformasi menghendaki hadirnya pembatasan tersebut. Dan, itulah pasal yang paling pertama diubah oleh MPRRI era reformasi pada 1999. Sekalipun demikian, rakyat dan para akademisi penting untuk terus mengawal konsistensi MPR dalam melaksanakan seluruh ketentuan UUD NRI Tahun 1945, termasuk yang terkait manuver untuk perpanjangan masa jabatan Presiden.

Berkali-kali MPR menegaskan dan menyosialisasikan ketentuan UUD NRI Tahun 1945 soal adanya pembatasan masa jabatan Presiden maksimal 2 periode (pasal 7 UUD NRI 1945) sehingga tidak bisa diperpanjang menjadi 3 periode. Atau bahwa Pemilu untuk memilih Presiden atau Anggota DPR/DPD itu dilakukan sekali dalam lima tahun (pasal 22E ayat (1) dan (2)), sehingga masa jabatan Presiden tidak bisa ditambah dengan 3 tahun misalnya, karena tak sesuai dengan ketentuan UUD. □

MBO



Implementasi Sila-sila Pancasila

- Berhenti saling menyakiti, mulailah saling menghargai
- Berhenti saling merendahkan, mulailah menghormati perbedaan
- Berhenti takabur, mulailah bersyukur
- Stop marah-marah, mulailah bersikap ramah
- Berhenti memaki, mulailah memakai hati
- Berhenti curiga, mulailah menyapa.
- Berhenti berseteru, mulailah bersatu
- Berhenti memaksakan, mulailah berkorban
- Berhenti mencari perbedaan, mulailah bergandeng tangan
- Berhenti silang pendapat, mulailah mencari mufakat
- Berhenti besar kepala, mulailah berlapang dada
- Berhenti bersikap tidak, mulailah bermusyawarah
- Berhenti malas, mulailah bekerja keras
- Stop diskriminasi, mulailah toleransi
- Berhenti menang sendiri, mulailah berbagi

EMPAT PILAR MPR RI

Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara
 UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Konstitusi Negara
 NKRI Sebagai Bentuk Negara
 Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara

Gelora Serayu Purwokerto

Pandemi Jadi Momentum Memperkuat Nilai Kebangsaan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR, Dr. Lestari Moerdijat, SS., MM., mengatakan, konsensus kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, telah menjadi perekat bangsa dan teruji dalam menghadapi krisis sejak Indonesia merdeka tahun 1945. Di masa pandemi ini, seyogyanya menjadi momentum kembali memperkuat nilai-nilai kebangsaan.

“Karena dengan bersatu kita bisa menghadapi tantangan (pandemi) ini,” kata Lestari Moerdijat yang hadir secara virtual dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR di Purwokerto, Jawa Tengah, Rabu (8/9/2021). Sosialisasi yang diselenggarakan MPR bekerjasama dengan Gelora Serayu menghadirkan narasumber anggota MPR Fraksi Partai Nasdem Sugeng Suparwoto, anggota DPRD Kabupaten Banyumas Djadjat Sudrajat, dan staf pengajar ilmu politik Fisip Unsoed, Andi Ali Said Akbar.

Rerie, sapaan Lestari Moerdijat, mengungkapkan, masyarakat melihat pandemi Covid-19 sebagai sebuah ancaman. “Tidak hanya berdampak pada masalah kesehatan

saja, tapi juga memiliki efek pada ancaman stabilitas masyarakat,” ujarnya.

Rerie memberi contoh dampak Covid-19 di Jawa Tengah. Pengangguran terbuka





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

pada Februari 2021 tercatat naik 5,59%, atau 1,12 juta dibandingkan pada sebelum pandemi Februari 2020. Sebanyak 11.438 pekerja di-PHK di Jateng. Selain itu, 5.400 anak di Jawa Tengah kehilangan orangtua karena Covid-19.

Rerie menambahkan, sebuah survei (Word Cloud Analysis) menunjukkan bahwa gotong royong merupakan nilai dasar ideologi kebangsaan yang saat ini diperlukan dalam rangka mempererat tali kebangsaan dengan memperkuat persatuan bangsa. "Semangat solidaritas dan kolaborasi antardaerah lebih diutamakan daripada kompetisi dalam upaya menghentikan rantai penyebaran wabah," imbuhnya.

Rerie menegaskan, karakter bangsa diturunkan dari empat konsensus kebangsaan, yaitu Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi neara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Karakter bangsa itu, antara lain saling hormat-menghormati, rasa kebersamaan dan tolong menolong, rasa persatuan dan kesatuan, rasa peduli dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sikap dan perilaku yang menggambarkan nilai-nilai kebangsaan.

"Karakter berbangsa ini diuji dalam hidup bermasyarakat, terutama saat menghadapi tantangan seperti halnya pandemi Covid-19," tegasnya.

Rerie menyebutkan, badai pandemi Covid-19 pasti berlalu. Manusia pasti bertahan, sebagian hidup dalam dunia yang berbeda.

"Keputusan ini tentukan masa depan. Kita tidak hanya berhadapan dengan wabah, tetapi juga ujian terhadap kemanusiaan," ucapnya.

Sosialisasi Empat Pilar MPR yang menerapkan protokol kesehatan secara ketat diikuti anggota DPC Partai Nasdem Banyumas, Himpunan Guru Paud Banyumas, para pendamping keluarga harapan, mahasiswa dan mahasiswi dari berbagai kampus di Banyumas. □

Kebumen, Jawa Tengah Karakter Kebangsaan Tameng Hadapi Pandemi

Karakter dan nilai-nilai kebangsaan yang kita miliki saat ini mampu menjadi tameng bagi

bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan dan membawa kita keluar dari krisis multidimensi akibat pandemi Covid-19.

"Dalam konteks solidaritas nasional, kita memiliki konsensus kebangsaan sebagai pondasi untuk menjaga kehidupan kebangsaan dan menjadi jalan keluar dari setiap masalah bangsa," kata Wakil Ketua MPR Dr. Lestari Moerdijat, SS, MM, dalam pengarahannya secara virtual pada acara Sosialisasi Empat Pilar MPR di Kebumen, Jawa Tengah, Kamis (9/9/2021).

Turut berbicara dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR itu Amelia Anggraini (Ketua DPP NasDem Bidang Perempuan dan Anak, dr. Faiz Alaudien Reza Mardhika (anggota Departemen Kesehatan DPP Partai NasDem),





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

mahasiswa, dan tokoh masyarakat se-Kabupaten Kebumen.

Lestari Moerdijat mengungkapkan, pandemi Covid-19 di Indonesia mulai menurun setelah mencapai puncak pada Juli 2021. "Sekarang sudah terjadi penurunan drastis. Kita mampu menurunkan angka secara signifikan," kata Rerie, sapaan akrab Lestari Moerdijat.

Mengutip hasil sebuah survei, Rerie menyebutkan, mayoritas responden dalam survei itu memahami bahwa pandemi bukanlah ancaman kesehatan semata.

Pandemi ini bisa berujung pada problem sosial yang pada gilirannya menjadi ancaman pada stabilitas nasional.

"Pandemi bukan hanya mengacaukan tapi memporakporandakan kehidupan kita. Lalu di mana konsensus kebangsaan di masa pandemi ini? Dari survei yang sama ditemukan ada kepercayaan dan keyakinan bahwa ada nilai-nilai yang sudah kita miliki dan nilai-nilai itu bisa menjadi tameng untuk menghadapi pandemi," papar Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Nasdem ini.

Rerie menggarisbawahi gotong-royong

sebagai nilai dasar ideologi kebangsaan yang perlu diperkuat. Dia mencontohkan program Jogo Tonggo yang diterapkan pemerintah daerah Jawa Tengah. Dalam program ini, setiap warga ikut menjaga tetangganya. Apabila setiap rumah saling menjaga, ujarinya, maka komunitas itu bisa terlindungi.

"Inilah semangat solidaritas dan kolaborasi yang kemudian memberikan proteksi bagi seluruh masyarakat berbasis gotong royong untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Program Jogo Tonggo





ini cukup berhasil,” katanya.

Bukan hanya gotong royong, Rerie juga menyebut nilai dan karakter pokok kebangsaan lainnya, seperti karakter religius, mandiri, toleransi, saling menghormati, memiliki rasa kebersamaan, rasa persatuan, peduli dalam bermasyarakat, memiliki moral, dan akhlak yang dilandasi nilai-nilai agama. “Karakter kebangsaan ini juga menjadi tameng untuk berhadapan dan membawa kita keluar dari pandemi Covid-19,” tuturnya.

Karakter dan nilai kebangsaan dalam konsensus kebangsaan, lanjut Rerie, merupakan pondasi menjaga kehidupan bangsa dan menjadi jalan keluar dari setiap masalah. “Sebagai bangsa yang besar dan bermartabat, maka keragaman, gotong royong, dan saling menjaga merupakan kunci persatuan,” ucapnya. □

Brebes, Jawa Tengah
Empat Pilar Terbukti Mampu Menjadi Perekat Bangsa

Wakil Ketua MPR RI, Dr. Lestari Moerdijat, SS., MM., percaya bahwa pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan dunia pada umumnya pasti akan berlalu. Bahkan, tanda-tanda akan berakhirnya pandemi ini sudah terlihat. Antara lain, berkurangnya jumlah kasus penularan, berkurangnya tingkat keterisian rumah sakit, serta berkurangnya jumlah kematian akibat Covid-19.

Tetapi, Lestari mengingatkan, Covid-19 tidak akan serta merta hilang dari bumi Indonesia dan dunia pada umumnya. Seperti diingatkan para pakar Covid-19, virus ini akan

berubah dari pandemi menjadi endemi. Karena itu, masyarakat harus bersiap melakukan situasi new normal, dengan tetap menjalankan protokol kesehatan.

“Pandemi mengakibatkan krisis yang multidimensional. Karena itu, kita harus tetap bersatu, bergotong royong, menghadapi segala kemungkinan dengan berpegangan pada Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika,” kata Lestari Moerdijat.

Pernyataan itu disampaikan Lestari di hadapan peserta Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, yang diselenggarakan oleh MPR bekerjasama dengan Serikat Buruh Nasional Indonesia (SBNI). Acara tersebut berlangsung di Ruang Pertemuan Islamic Centre Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Ahad (12/9/2021).

Empat Pilar MPR RI, kata Rerie panggilan akrab Lestari, sudah terbukti mampu

merekatkan bangsa Indonesia dalam menghadapi segala ancaman dan tantangan, termasuk pandemi Covid-19 saat ini. Karena pandemi yang hadir sekarang ini bukanlah yang pertama. Tetapi sudah ada pandemi-pandemi lain yang lebih dulu datang, dan Empat Pilar MPR RI sebagai konsensus mampu mengatasi.

“Konsensus ini bisa menjadi panduan dalam kehidupan, termasuk panduan menuju cita-cita, adil makmur dan beradab,” kata Rerie lagi.

Karena itu, meski banyak ideologi yang masuk, kata Rerie, bangsa Indonesia tidak boleh berpaling dari Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi bangsa. UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. □

MBO



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**Kertosari, Kabupaten Temanggung
Perkuat Nilai-Nilai Kebangsaan Hadapi
Permasalahan Bangsa**

Wakil Ketua MPR, Dr. Lestari Moerdijat, SS., MM., mengatakan bahwa sampai saat ini bangsa Indonesia masih mengalami permasalahan berat, yakni pandemi Covid-19 yang dampak negatifnya luar biasa dan sangat menyengsarakan rakyat.

Akibat pandemi, selain banyak rakyat yang terganggu kesehatannya dan bahkan meninggal dunia, pandemi juga melumpuhkan perekonomian sehingga banyak perusahaan tutup dan terpaksa merumahkan karyawannya, hal ini menimbulkan banyak pengangguran.

“Faktanya, pandemi ini ternyata tidak main-main, dan usaha pemerintah sejauh ini baik sekali dalam menghadapi masalah ini dan itu mesti diapresiasi,” kata Pimpinan MPR dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang akrab disapa Rerie.

Rerie menyampaikan hal itu saat berbicara secara virtual sebagai narasumber acara acara ‘Sosialisasi Empat Pilar MPR RI: Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika,’ di Omah Kebon Resto, Kertosari, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Jumat (17/9).

Hadir dalam acara yang diselenggarakan dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat tersebut, tokoh masyarakat Harry Poernomo, Ketua Perkumpulan Keluarga Besar Satpam Temanggung (PKBST) Yohanes



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Agus Setiyono, dan para anggota PKBST serta masyarakat sekitar sebagai peserta.

Namun, lanjut Rerie, selain upaya keras pemerintah bersama jajarannya dalam melawan pandemi, ada satu lagi upaya yang mesti dilakukan seluruh anak bangsa, yakni memperkuat pemahaman dan implementasi nilai-nilai kebangsaan.

Hal tersebut diketahui Rerie saat bersama timnya melakukan jajak pendapat kepada masyarakat pada Juni 2020. Saat itu, sebagai Pimpinan MPR, Rerie ingin mengetahui sampai dimana pengetahuan rakyat seputar Covid-19 ini.

Setelah dianalisa menggunakan metode Word Cloud Analysis, hasilnya adalah: *Pertama*, masyarakat ternyata telah memahami betul bahwa ancaman pandemi itu bukan hanya masalah kesehatan

semata. Tapi, juga mengakibatkan menurunnya aktivitas perekonomian yang berujung kepada terancamnya stabilitas nasional.

Kedua, publik menyadari bahwa nilai-nilai kebangsaan bisa menjadi tameng yang menjaga bangsa ini dari kehancuran. *Ketiga*, gotong royong yang merupakan nilai dasar ideologi kebangsaan, saat ini mesti diperkuat untuk menjaga persatuan bangsa.

“Intinya, rakyat Indonesia sudah sangat menyadari betapa berbahayanya pandemi ini dan juga telah mengetahui solusi untuk menghadapinya,” ujarnya.

Untuk itu, Rerie mengajak seluruh anak bangsa agar mulai saat ini utamakan memperkuat semangat solidaritas dan sinergitas dalam upaya memutus rantai penyebaran virus korona. □



Sosialisasi di Sumenep

Empat Pilar MPR Adalah Kesepakatan Harus Dijaga



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

WAKIL Ketua MPR RI Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA., menegaskan, umat Islam memberi kontribusi sangat besar bagi kemerdekaan Indonesia. Bahkan peran itu dilakukan oleh para ulama dan umat Islam di berbagai wilayah di seluruh Indonesia.

Di Madura, terdapat seorang ulama besar, memiliki santri yang dikemudian dikenal bernama KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Ahmad Dahlan. Keduanya, masing-masing sebagai pendiri Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Baik KH. Hasyim Asy'ari maupun KH. Ahmad Dahlan pernah mengenyam ilmu dari Syaikhona Muhammad Kholil yang dikenal juga sebagai Syaikhona Kholil al-Bangkalani.

"Syaikhona Kholil al-Bangkalani sangat layak dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Saya selaku Wakil Ketua MPR ikut mendukung usaha tersebut, meski beliau sendiri tak pernah mengharap. Tetapi kita sebagai penerus, tentu merasa senang jika orang yang kita hormati mendapat penghargaan yang layak. Apalagi, kedua santrinya, H. Hasyim Asy'ari dan KH. Ahmad Dahlan sudah mendapat anugerah Pahlawan Nasional," kata HNW, begitu Hidayat biasa disapa.

Pernyataan itu disampaikan Hidayat secara virtual saat memberikan Sosialisasi

Empat Pilar MPR di hadapan warga Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Acara yang diselenggarakan oleh MPR bekerjasama dengan Yayasan Dakau Lamak itu berlangsung di Kabupaten Sumenep, Sabtu (25/9/2021).

Selain Hidayat, juga hadir anggota MPR Fraksi PKS, Ahmad Syaikhul, sebagai pembicara pendamping. Serta hadir pula Ketua Yayasan Dakau Lamak, Dr. Mohammad Hidayatullah; Ketua Umum DPW PKS Jawa Timur, Irwan Setiawan; Sekretaris DPW PKS Jawa Timur, Ahmadi; Ketua DPD PKS Sumenep, Rimbun Hidayat; dan Sekretaris DPD PKS Seumenep, Manansyah.

Peninggalan sejarah dari jejak langkah Syaikhona Kholil, menurut HNW, patut ditiru dan menjadi inspirasi bagi masyarakat Sumenep. Terlebih ketika bangsa Indonesia memperingati peristiwa pengkhianatan PKI, pada bulan September ini.

"Jasa ulama bagi bangsanya sangat besar. Tetapi keselamatan mereka selalu terancam. Pada September 1948, saat pecah peristiwa Madiun, para ulama, santri, dan pondok pesantren menjadi korban kekejaman PKI," papar HNW.

Zaman sekarang, lanjut HNW, keamanan ulama juga belum sepenuhnya terjaga. Terbukti masih banyak ulama yang mengalami penyerangan oleh orang-orang tak

bertanggung jawab, termasuk ketika mereka menjalankan tugasnya membina masyarakat.

Menurut HNW, peristiwa pengkhianatan PKI maupun maraknya kasus penganiayaan ulama menjadikan isyarat bahwa Sosialisasi Empat Pilar MPR masih sangat dibutuhkan.

"Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika adalah hasil kesepakatan seluruh bangsa. Termasuk kesepakatan para ulama dengan kelompok nasionalis sehingga ada titik tengah yang bisa diterima kedua pihak. Karena itu, kesepakatan itu harus dijaga dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari," pinta HNW.

Sementara itu anggota MPR Fraksi PKS, Ahmad Syaikhul, mengatakan, sosialisasi tidak hanya diberikan kepada masyarakat umum. Tetapi juga anggota DPR, TNI, Polri, dan pejabat di lingkungan eksekutif. Itu artinya seluruh bangsa Indonesia berhak mengikuti sosialisasi MPR.

Presiden PKS itu berharap, setelah menerima sosialisasi, para peserta bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sementara bagi mereka yang kerap menyampaikan sosialisasi, mudah-mudahan bisa menginspirasi agar lebih baik dalam mengaktualisasikan pada kehidupan mereka. □

MBO

Diskusi Publik DPD RI

Dinamika Wacana Amandemen UUD NRI Tahun 1945



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WACANA amandemen UUD NRI Tahun 1945 juga menjadi perhatian Kelompok DPD di MPR. Untuk membahas wacana itu Kelompok DPR menggelar 'Diskusi Publik'. Acara yang diselenggarakan di Tangerang, Banten, 10 September 2021, tidak hanya dihadiri oleh anggota DPD namun juga para pakar di bidangnya.

Hadir dalam acara selepas salat Jumat itu adalah Ketua Kelompok DPD di MPR, Tamsil Linrung; Sekretaris Kelompok DPD di MPR, H. M. Syukur; Fahira Idris, Husain Alting Sjah, Abdul Rachman Thaha, Arniza Nilawati, serta beberapa anggota DPD lainnya hadir lewat 'daring'. Sedangkan paara pakar yang hadir dalam kesempatan itu adalah Refly Harun, Rizal Ramli, Rocky Gerung, G. Seto Harianto, dan Natalius Pigai.

Tamsil Linrung mengungkapkan, wacana terkait amandemen UUD berawal ketika MPR periode 2014-2019 mengeluarkan tujuh rekomendasi. Tujuh rekomendasi itu disebutkan oleh mantan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu adalah Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), Penataan Kewenangan MPR, Penataan Kewenangan DPD, Penataan Sistem Presidensial, Penataan Kekuasaan Kehakiman, Penataan

Sistem Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Pancasila sebagai Sumber Segala Hukum Negara, dan Pelaksanaan Pemasarakatan Nilai-Nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan Ketetapan MPR.

Saat ini, jelas Tamsil Linrung, wacana amandemen terbatas UUD NRI Tahun 1945 kuat terdengar di masyarakat, terutama untuk masalah PPHN. Menurut Tamsil Linrung, ada dinamika dalam masalah PPHN ini. Apakah

landasan hukumnya tertuang dalam UUD atau lewat undang-undang atau Ketetapan MPR. "Bila landasan hukumnya dituangkan dalam Ketetapan MPR maka perlu dilakukan amandemen terbatas UUD," tuturnya.

Sebagai wakil rakyat dari daerah, Tamsil Linrung mendengar aspirasi dari rakyat. Saat bertemu dengan masyarakat, tutur Tamsil Linrung, mereka juga mengikuti perkembangan politik ketatanegaraan, terutama soal rencana amandemen. "Masyarakat mempertanyakan tentang





wacana memperpanjang masa jabatan presiden menjadi 3 periode, atau pengunduran pemilu”, ungkapnya. “Banyak pertanyaan muncul demikian di tengah masyarakat”, tambahnya.

Mendengar pertanyaan seperti itu, anggota DPD dari Sulawesi Selatan itu heran, sebab wacana terkait masa jabatan

presiden menjadi 3 periode tak masuk dalam rekomendasi yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh MPR Periode 2014-2019. “Kita mendengar aspirasi masyarakat dan mereka mengatakan hal demikian jangan sampai terjadi,” paparnya.

Mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu mengakui, amandemen bukan

sesuatu yang tabu, sebab itu sangat memungkinkan. Menurut Tamsil Linrung, lebih memungkinkan bila dalam amandemen, fungsi DPD diperkuat.

Dalam diskusi dengan bahasan mengenai ‘Presiden Perseorangan’, ‘Presiden Threshold’, dan ‘Penataan Kewenangan DPD’, alumni Universitas Negeri Makassar itu tidak hanya mendorong penguatan lembaga DPD, namun juga mengkritik ‘President Threshold’. Dalam menjangkau suara dari masyarakat, menurut Tamsil Linrung, ‘President Threshold’ menjadi penyebab terbatasnya calon-calon yang bisa ditampilkan. “Hanya di Indonesia ada pembatasan yang demikian,” ungkapnya.

Selanjutnya, Tamsil Linrung menyatakan, DPD menganggap, pembatasan itu tidak perlu. Tak hanya itu, DPD malah mendorong perlu adanya calon perseorangan. Berdasarkan pengalaman, munculnya 2 calon presiden membuat terjadinya pembelahan di masyarakat. “Bila calonnya banyak, dampak negatifnya lebih kecil”, paparnya. □

AWG



Diskusi Empat Pilar MPR

Bangsa Indonesia Butuh Sosok Teladan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI, Dr. Jazilul Fawaid SQ, MM., mengatakan, memperkokoh Pancasila di tengah kehidupan bermasyarakat merupakan tema yang menarik. Hal itu diungkapkannya pada diskusi 'Empat Pilar MPR' yang digelar di Media Center, Gedung Nusantara III, Kompleks MPR/ DPR Senayan, Jakarta, 20 September 2021.

Selain Jazilul Fawaid, hadir pula sebagai pembicara dalam kegiatan yang diikuti para wartawan Parlemen itu adalah anggota MPR dari Kelompok DPD, Dr. Agustin Teras Narang, SH.; dan Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP, Antonius Benny Susetyo.

Menurut Jazilul Fawaid, tema tentang Pancasila selalu hangat, sebab Pancasila adalah etika dan landasan segala kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. "Pancasila merupakan azimat yang ditemukan oleh para pendiri bangsa", tutur politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. Sila-sila yang ada dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. "Semua konsep Pancasila bisa masuk dalam sendi-sendi kehidupan, dan keberadaan Pancasila tidak perlu dipertentangkan dengan agama," katanya.

Pria asal Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, itu menyebutkan, cita-cita Pancasila sangat ideal, namun dia mengakui antara idealnya Pancasila dengan realita yang ada di masyarakat sering tidak

nyambung. Hal demikian, menurut Gus Jazil, sapaan Jazilul Fawaid, masih sering menjadi menjadi masalah.

Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) itu, selanjutnya menegaskan, agar Pancasila bisa hidup di tengah masyarakat atau diamalkan maka nilai-nilai yang ada harus dipahami. Kiat untuk memahami dasar negara itu ditempuh lewat pendidikan dan keteladanan. Untuk menyosialisasikan Pancasila, kata Gus Jazil, tidak cukup bila hanya dilakukan oleh MPR dan BPIP. "MPR dan BPIP mempunyai tugas untuk menguatkan Pancasila hidup di tengah masyarakat", ujarnya.

Agar Pancasila bisa menjadi gaya hidup dalam keseharian maka harus ada sosok yang bisa menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. "Nah anak-anak milenial zaman sekarang butuh sosok seperti itu", tegasnya.

Selanjutnya Gus Jazil mengungkapkan, prinsip perekonomian nasional adalah usaha yang disusun berdasarkan asas kekeluargaan. "Nah, apakah prinsip perekonomian yang berjalan sudah seperti demikian, sudah seperti nilai-nilai Pancasila?" tanyanya. Untuk itu, Gus Jazil menegaskan, bila prinsip-prinsip perekonomian sudah disusun secara ke-





keluargaan maka hal demikian sudah selaras dengan nilai-nilai Pancasila. “Bila tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, di sinilah salah satu contoh dari tidak nyambungannya antara cita-cita dan realita,” paparnya.

Maka, kata Koordinator Nasional Nusantara Mengaji itu, perlu adanya ‘role model’

yang bisa dijadikan acuan untuk menjadi contoh keteladanan. “Keteladanan yang kita inginkan sampai saat ini belum berhasil ditemukan”, ungkapnya. Untuk itulah, Gus Jazil ingin agar Pancasila menjadi ruh dalam segala sendi kehidupan bagi semua, sehingga Pancasila bisa membumi. “Bila implementasi Pancasila belum terjadi maka

masyarakat, anak-anak muda, akan semakin menjauh”, ujarnya.

Teras Narang yang hadir dalam diskusi lewat ‘daring’ mengatakan, semua warga negara harus memahami pentingnya Pancasila. “Ini pekerjaan yang tak boleh berhenti,” tegasnya. Untuk memberi sosialisasi atau memahamkan nilai-nilai ini, menurut mantan Gubernur Kalimantan Tengah, itu harus menyesuaikan dengan era yang ada. Unsur kebersamaan harus selalu didengarkan.

Benny Susetyo menyebutkan, seseorang itu mengamalkan nilai-nilai Pancasila bisa dilihat apakah dia dalam kehidupan mempunyai rasa ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, dan persatuan. Bila nilai-nilai itu ada maka seseorang itu mampu membuat tatanan hidup sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nilai-nilai yang demikian, menurut Benny, ada pada sosok Wakil Presiden Mohammad Hatta. Hatta merupakan sosok yang bisa dijadikan teladan.

“Elit politik memang harus memberikan contoh keteladanan”, tegas Benny. □

AWG





Dr. H. Jazilul Fawaid, S.Q., M.A.

Wakil Ketua MPR RI Periode 2019-2024

Pengakaran Kembali Pancasila di Masyarakat

TANTANGAN dan problematika bagi Pancasila dewasa ini lebih didominasi oleh hal-hal yang bersifat kontekstual ketimbang konseptual. Kita semua memahami bahwa secara konseptual Pancasila merupakan dasar bagi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta landasan ideologis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sejak merdeka. Namun demikian, secara kontekstual, terdapat kesenjangan (gap) antara pemahaman dan aktualisasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Masih adanya kelompok-kelompok yang mempertentangkan antara agama dan negara adalah satu dari sekian banyak contoh kesenjangan yang ada. Oleh sebab itu, pengakaran kembali atau reinternalisasi Pancasila di tengah-tengah masyarakat menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak untuk dilakukan.

Adanya kesenjangan antara pemahaman dan aktualisasi Pancasila di masyarakat merupakan sebuah fenomena empirik, bukan sembarang asumsi atau generalisasi saja. Masyarakat Indonesia bukannya tak paham akan Pancasila. Sejak di bangku sekolah dasar hingga sekolah menengah, atau bagi mereka yang beruntung untuk melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi, nilai-nilai Pancasila secara kontinyu diinternalisasikan oleh tenaga pendidik dan pengajar kepada para murid atau peserta didik melalui materi pelajaran yang mereka terima. Materi seputar toleransi, tenggang rasa, tepa selira, hingga gotong royong, adalah materi-materi dasar dari Pancasila sebagai ideologi negara. Pada tataran lebih lanjut, masyarakat juga mendapat pembinaan dari lembaga-lembaga negara yang mengampu tugas untuk mendiseminasikan nilai-nilai Pancasila.

Melalui serangkaian upaya yang dilakukan secara sistematis tersebut, pemahaman masyarakat yang komprehensif mengenai Pancasila, baik aspek

sejarah maupun nilai-nilai dasarnya, merupakan hal yang niscaya untuk terwujud. Namun demikian, urgensi dari Pancasila sebagai dasar negara, terlebih lagi sebagai ideologi bagi seluruh warga negaranya, tidak bisa berhenti pada sekedar pemahaman saja. Pancasila memerlukan kontekstualisasi secara nyata sebagai laku hidup sehari-hari oleh seluruh bangsa Indonesia. Dengan kontekstualisasi itu, Pancasila menjadi ideologi yang benar-benar hidup. Keluhuran Pancasila sebagai landasan idiil bangsa dan negara Indonesia, bukan terletak pada barisan kata-kata saja, akan tetapi nilai-nilai dasarnya mewujud dan terefleksi sebagai habituasi dan gaya hidup manusia Indonesia yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari.

Tantangan Pancasila

Cita-cita untuk menjadikan Pancasila sebagai habituasi dan gaya hidup manusia Indonesia, tidak dimungkiri belum terwujud secara paripurna sampai hari ini. Pancasila, seperti layaknya ideologi lainnya, memiliki tantangan sebagai konsekuensi dari zaman yang terus bergerak dan berubah. Tantangan Pancasila hari ini sangat beragam. Globalisasi yang berlangsung sangat masif, tidak hanya menggerus batas-batas fisik antarnegara (deteritorialisasi), tapi juga melunturkan sekat-sekat sosial dan budaya. Budaya asing begitu cepat masuk ke Indonesia, tanpa saringan. Akibatnya, banyak masyarakat Indonesia terpapar oleh budaya asing yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Tak hanya itu, tantangan Pancasila hari ini juga disebabkan oleh hadirnya ideologi-ideologi alternatif yang dengan cerdas memanfaatkan celah rapuh problematika sosial dan ekonomi masyarakat untuk menolak dan berpaling dari Pancasila.

Ada fenomena kontemporer yang menarik untuk dicermati, sebagai pembelajaran bahwa upaya menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai habituasi dan gaya hidup masih perlu diperjuangkan dengan lebih

keras. Pandemi Covid-19 yang membekap Indonesia sejak 2020 yang lalu menghasilkan temuan bahwa situasi pandemi menjadi lahan yang cukup subur untuk berkembangnya intoleransi beragama. Data yang dirilis oleh Setara Institute mengenai kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) sepanjang 2020 dapat menjadi pembelajaran bagi kita bersama. Sepanjang 2020, peristiwa pelanggaran KBB cukup banyak terjadi, yakni hampir 180 peristiwa. Jumlah ini sebenarnya lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 200 peristiwa. Hanya saja dari sisi tindakan, pada 2020 yang merupakan tahun pandemi, angka tindakan lebih tinggi dari tahun sebelumnya, yakni 422 berbanding 327. Kondisi ini cukup memprihatinkan. Pandemi yang seyogianya menjadikan bangsa Indonesia menjadi lebih guyub dan bergotong royong, namun dicerai oleh pihak-pihak yang berlaku intoleran dan bertentangan dengan nilai ketuhanan Pancasila.

Fenomena lainnya yang paling mutakhir untuk dicermati adalah dari lanskap politik internasional, yakni eksistensi rezim Taliban yang mampu bangkit dan berkuasa kembali di Afghanistan setelah Pemerintah Amerika Serikat menarik mundur seluruh pasukannya pada akhir Agustus 2021 yang lalu. Banyak negara-negara di dunia, seperti India, Cina, Rusia, bahkan Indonesia yang khawatir bahwa berkuasanya Taliban di Afghanistan akan menjadi suar bagi bergeliatnya sel-sel terorisme yang sekian lama pasif. Kekhawatiran ini tidak berlebihan. Di Indonesia sendiri, sepanjang Agustus hingga September 2021, puluhan teroris berhasil dibekuk oleh aparat. Secara ideologis, sejatinya kekhawatiran semacam ini tidak perlu ada. Radikalisme dan terorisme hanya berkembang di masyarakat yang “kering” nilai-nilai ideologisnya. Namun demikian, permasalahan Indonesia saat ini adalah nilai-nilai ideologis tersebut masih berproses untuk menjadi habituasi dan gaya hidup manusia Indonesia. Celah dalam berproses itu bisa menjadi peluang bagi kelompok-kelompok teroris untuk membuat masyarakat Indonesia terpapar dan terkontaminasi dengan paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Pengakaran Kembali

Melihat kompleksitas tantangan tersebut, langkah yang harus dilakukan untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang benar-benar hidup di masyarakat (living ideology), tidak cukup

hanya dengan melakukan diseminasi atau internalisasi nilai-nilai saja yang digaungkan di ruang-ruang tertutup semacam kelas belajar-mengajar atau ruang-ruang seminar saja. Yang dibutuhkan lebih dari itu, yaitu mengakar kembali keseluruhan nilai-nilai Pancasila dalam cipta, rasa, karsa, dan karya, seluruh manusia Indonesia. Solusi pengakaran kembali ini sepintas seperti suatu hal yang normatif, bahkan utopis. Namun menjadi suatu solusi yang sangat mudah dan logis untuk diimplementasikan, apabila manusia Indonesia menyadari dua hal utama; pertama, asal muasal Pancasila adalah nilai-nilai yang digali dari kebiasaan dan cara hidup manusia Indonesia itu sendiri, serta kedua, manusia Indonesia menyadari tanggung jawab untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila sesuai tugas dan kapasitas masing-masing.

Pancasila bukanlah ideologi atau dasar negara yang digali dari belahan bumi lainnya. Pancasila adalah refleksi atau cerminan dari budaya bangsa Indonesia sendiri, budaya dalam konteks yang paling adiluhung untuk dijadikan sebagai pijakan dalam praktik berbangsa dan bernegara. Karena digali dari bumi Indonesia dan budaya masyarakat Indonesia sendiri sejak dulu kala, maka seyogianya manusia Indonesia hari ini tidak perlu merasa gamang, tidak familiar, atau merasa berjarak dengan Pancasila. Inilah modal utama untuk melakukan pengakaran kembali Pancasila di tengah masyarakat. Agar pengakaran kembali ini memiliki daya cengkeram yang kuat, seluruh bangsa Indonesia harus berani berkomitmen untuk mewujudkannya dalam laku hidup sehari-hari sesuai dengan tugas dan kapasitas mereka. Pemerintah misalnya, harus berkhidmat pada prinsip keadilan sosial dalam menetapkan kebijakan. Legislatif harus berpegang teguh pada prinsip musyawarah mufakat sebagai representasi rakyat. Masyarakat sendiri harus menjaga persatuan dan kesatuan, apapun situasi dan kondisi yang dihadapi. Hal-hal tersebut merupakan contoh pengakaran secara teknis yang bisa dilakukan. Hal-hal tersebut harus dilakukan secara berulang-ulang dan konsisten, sehingga menjelma sebagai habituasi dan gaya hidup. Dengan demikian, diharapkan Pancasila dapat mengakar secara kokoh sebagai dasar negara dan ideologi yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. □

Setjen MPR Hadiri Rakernas Kemenkeu Secara Virtual



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

SEKRETARIAT Jenderal MPR hadir secara virtual pada acara 'Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2021: bangkitkan Ekonomi, Pulihkan Negeri, Bersama Hadapi Pandemi,' yang digelar Kementerian Keuangan RI, Selasa (14/9/2021). Hadir mewakili Setjen MPR pejabat eselon II, III dan IV.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang Laporan Keuangannya memperoleh opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Melalui rangkaian kegiatan Rakernas ini diharapkan dapat dicapai sebuah komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, sehingga dapat menjadi modal yang sangat berharga bagi sinergi pengelolaan keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19, dan pemulihan ekonomi nasional yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. □

DER



Setjen MPR Gelar Sosialisasi Hukum

SEKRETARIAT Jenderal MPR gelar acara Sosialisasi Hukum dengan tema 'Pelaksanaan Pelayanan Publik di Tengah pandemi Covid-19'. Acara yang dilaksanakan di Ruang GBHN Lantai III, Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR Senayan, Jakarta, Rabu (22/9/2021), ini menghadirkan narasumber Heru Tjahjono dari Ombudsman RI, dan CPNS di

lingkungan Setjen MPR sebagai peserta.

Acara tersebut digelar ditujukan kepada pegawai di lingkungan Setjen MPR, khususnya para pegawai yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan pelayanan publik agar mampu memberikan pelayanan secara optimal. □

DER

Rakor Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Setjen MPR RI



SEKRETARIAT Jenderal MPR RI, Rabu (29/9/2021), menggelar Rapat Persiapan Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2021. Rapat yang dilaksanakan di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR Senayan, Jakarta, ini dihadiri dan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal MPR RI, Ma'ruf Cahyono.

Rapat ini diadakan untuk menyinergikan pemahaman dan tujuan, agar reformasi birokrasi yang menjadi fokus Setjen MPR dalam menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan negara berhasil dengan baik.

Di berbagai kesempatan, Setjen MPR Ma'ruf Cahyono selalu mengingatkan agar reformasi birokrasi harus dicapai dan ditingkatkan. Baginya, reformasi birokrasi harus memberi dampak dan manfaat yang lebih terasa di lingkungan kerja Setjen MPR sehingga bisa mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. □



DER



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Rahmad Handoyo, SPI., MM., Anggota MPR Fraksi PDI Perjuangan

Tetap Waspada, Pandemi Belum Sepenuhnya Terkendali

PERTAMBAHAN kasus positif Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sejak awal Agustus 2021 memperlihatkan tren menurun atau melandai. Merujuk pada data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 sepanjang Juli – September 2021, tren penurunan angka kasus positif tampak saat memasuki Agustus hingga awal September 2021. Tren penurunan terus berlanjut di bulan September. Pada akhir September angka kasus positif Covid-19 berada di kisaran 2.000 kasus, bahkan di bawah 2.000 kasus.

Kabar ini membawa angin segar dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Masyarakat pun seolah euforia dengan keadaan ini. Tampaknya, masyarakat mulai beradaptasi dengan kehidupan new normal di tengah pandemi Covid-19. Bagaimana tanggapan anggota dewan terhadap fenomena ini? Berikut perbincangan Majelis dengan anggota MPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Rahmad Handoyo, SPI., MM. Petikannya.

Sejak awal Agustus 2021, penambahan kasus Covid-19 mulai melandai. Merujuk data Satgas Penanganan

Covid-19, penambahan kasus positif Covid-19 menunjukkan tren menurun sejak Agustus hingga September 2021. Apa pendapat Bapak?

Kita tentu berterima kasih kepada pemerintah, presiden, dan seluruh jajarannya di pusat dan daerah, dan juga seluruh rakyat Indonesia, yang dengan penuh kesabaran dan bergandengan tangan, kita bisa menurunkan rate positif Covid-19 maupun dari tingkat kematian. Hasil ini patut kita syukuri dan inilah hasil kerja kita bersama. Yang penting adalah bagaimana kita menyikapi adanya penurunan kasus positif Covid-19 ini dan tidak ber-euforia. Sebab, penurunan kasus Covid-19 dan tingkat kematian sebenarnya masih bersifat labil. Artinya, sewaktu-waktu kasus Covid-19 bisa kembali meledak dan naik kembali.

Kita harus berkaca dari negara-negara lain. Di beberapa negara, kasus Covid-19 nyaris terkendali, misalnya Singapura. Sekarang aktivitas masyarakat di negara itu nyaris lumpuh karena meningkatnya kembali kasus Covid-19. Begitu juga di Amerika Serikat terjadi kenaikan kembali kasus Covid-19 setelah sebelumnya nyaris terkendali. Contoh lain adalah Israel, Inggris, yang

tadinya terkendali sekarang kasus Covid-19 meningkat kembali.

Bahkan, di negara asal virus korona ini, yaitu Cina yang bisa dikatakan pandemi Covid-19 sudah terkendali, tetapi sekarang pemerintah kembali melakukan pengetatan dengan mewajibkan protokol kesehatan. Bercermin dari negara-negara itu maka tidak ada negara yang benar-benar bisa mengendalikan Covid-19. Artinya, kasus Covid-19 bisa melandai, tetapi sewaktu-waktu bisa naik kembali. Karena itu, meskipun kita berhasil menurunkan angka Covid-19, kita tetap waspada dan berjaga-jaga dengan menjalankan protokol kesehatan.

Dengan kata lain, pemerintah belum sepenuhnya mengendalikan pandemi Covid-19?

Kalau dari sisi jumlah kasus positif Covid-19 yang sudah turun dan melandai, Indonesia menjadi salah satu negara terbaik di dunia yang bisa mengendalikan pandemi Covid-19. WHO, negara-negara lain, bahkan Presiden Amerika Serikat mengundang Presiden Joko Widodo untuk memberikan masukan terhadap pengendalian pandemi Covid-19. Hal ini merupakan prestasi bagi Indonesia.

Meski demikian, belum ada negara di dunia yang sepenuhnya bisa mengendalikan pandemi Covid-19. Bahkan para epidemiolog menyebutkan bahwa Covid-19 tidak akan pernah hilang dari muka bumi, tetapi dari pandemi akan berubah menjadi endemi. Karena itu, perlu kerja keras dari pemerintah bersama semua pihak dan masyarakat bergandengan tangan untuk tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat.

Termasuk di Indonesia, sekalipun pemerintah berhasil menurunkan jumlah kasus Covid-19, tetapi tidak ada jaminan kasus Covid-19 tidak akan kembali naik dan tidak ada jaminan pemerintah bisa mengendalikan terus-menerus pandemi Covid-19. Karena itu, kita perlu waspada dan perlu kerjasama semua pihak, karena keadaan sekarang masih labil. Dengan demikian, kita tidak boleh melupakan protokol kesehatan. Itu (protokol kesehatan) itu wajib dalam kehidupan keseharian kita.

Masyarakat seolah-olah menganggap kehidupan kembali berjalan normal. Ada euforia di tengah-tengah masyarakat. Bahkan sekolah pun sudah melakukan pembelajaran tatap muka. Bagaimana menurut Bapak?

WHO sudah mengingatkan bahwa Indonesia bisa mengalami gelombang ketiga pandemi Covid-19. Kita berterimakasih karena sudah diingatkan WHO. Yang penting bagi kita adalah jangan euforia berlebih bahwa virus korona sudah tidak ada. Berkaca dari negara lain kita harus berjaga-jaga bahwa pandemi Covid-19 ini belum bisa dikendalikan sepenuhnya.

Silakan pemerintah untuk mengambil kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Ketika pandemi Covid-19 mulai terkendali, PPKM dilonggarkan sesuai dengan levelnya. Tetapi ketika dilonggarkan, masyarakat jangan menganggap seolah-olah Covid-19 sudah tidak ada, kemudian euforia, tidak lagi menjalankan protokol kesehatan. Karena itu, kita semua saling mengingatkan dan mengedukasi, baik oleh tokoh masyarakat, agama, daerah, agar tetap menjalankan protokol kesehatan.

Sedangkan pembelajaran tatap muka memang sudah menjadi kebijakan pemerintah. Meski demikian, pelaksanaan pembelajaran tatap muka harus dengan ke-

waspadaan dan kehati-hatian. Misalnya, dengan *random test*. Jika dari *random test* diindikasikan penyebaran virus korona, maka harus diselesaikan dan dilakukan *tracing* agar tidak terjadi kluster. WHO sudah mengingatkan pembelajaran tatap muka bisa memunculkan kluster baru. Karena itu, protokol kesehatan harus dilaksanakan secara ketat di sekolah.

Apakah Indonesia juga bakal mengalami gelombang ketiga pandemi Covid-19?

Potensi untuk terjadinya gelombang ketiga pandemi Covid-19 di Indonesia tetap ada dan cukup besar. Banyak yang memprediksi pada bulan Desember, saat terjadi liburan akhir tahun, perayaan Natal dan Tahun Baru,



kasus Covid-19 akan melonjak lagi. Kita punya pengalaman, pada saat liburan panjang dan libur bersama, kasus Covid-19 selalu naik. Libur panjang memberi kontribusi signifikan terhadap penambahan kasus baru Covid-19.

Jadi, untuk mengantisipasi gelombang ketiga yang diprediksi pada Desember nanti, kita harus hati-hati. Jangan euforia. Kita harus antisipasi sejak dini. Kita juga harus mempersiapkan logistik seperti alat-alat kesehatan, obat-obatan. Jangan sampai terjadi kelangkaan obat atau kelangkaan oksigen seperti kemarin. Kita minta pemerintah untuk mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan terburuk mengantisipasi gelombang ketiga.

Bagaimana dengan program vaksi-

nasi massal untuk menghadapi pandemi Covid-19? Masih banyak juga warga yang menolak divaksin sekalipun pemerintah menyebutkan wajib vaksin?

Sebenarnya program vaksinasi massal kita sudah bagus, *on the track*. Kita bukan negara produsen, vaksin seluruhnya adalah impor, tetapi kita menduduki nomor empat dari segi jumlah yang divaksin dan nomor enam untuk prosentase penduduk yang sudah divaksin. Ini merupakan sebuah prestasi. Kita tetap dukung target vaksinasi dari pemerintah, yaitu target 80% bisa tercapai pada akhir tahun ini.

Tetapi, kita menyadari masih ada orang yang tidak mau divaksin. Kita melakukan upaya persuasif kepada mereka yang masih menolak vaksin. Di sisi lain, saya mengapresiasi masyarakat karena mereka begitu antusias untuk mendapatkan vaksin.

Apakah nanti bakal tercipta herd immunity?

Dalam rapat dengan Kementerian Kesehatan disampaikan bahwa kemungkinan untuk *herd immunity* tidak akan tercapai. Itu adalah masukan dari epidemiolog UI, UGM, dan lainnya. Sebab efikasi dari vaksin menurun, setelah disuntik vaksin, enam bulan kemudian menurun, satu tahun kemudian menurun. Karena itu, ada wacana tahun depan pemberian suntik booster ketiga. Artinya, kita harus berdamai dan hidup berdampingan dengan Covid-19.

Bagaimana kesiapan masyarakat hidup berdampingan dengan Covid-19?

Siap atau tidak siap memang harus disiapkan karena fakta dan realitasnya seperti sekarang, yaitu Covid-19 akan tetap ada. Bahkan, dari pandangan pakar, akademisi, epidemiolog, bahwa Covid-19 ini tidak akan pernah hilang. Karena itu, siap atau tidak siap, memang harus siap mandiri, yaitu perubahan pola dan perilaku hidup kita. Misalnya, sebelumnya kita tidak memakai masker, mau tidak mau, kita mengubah pola hidup dengan selalu memakai masker.

Pandemi ini dikendalikan tidak sebatas obat, vitamin, vaksin, tetapi yang paling penting adalah perubahan pola hidup dan perilaku. Jadi, perlu edukasi dan sosialisasi tentang perubahan perilaku hidup masyarakat. □

Lagu Persembahan *untuk Bangsa*



Piyu Padi

GRUP BAND PADI pada 2021 ini mengeluarkan single terbaru. Judulnya, 'Memberi Makna Indonesia.' "Judulnya terkesan nasionalisme banget. Lagu ini dibuat untuk memberi semangat dan berbagi energi positif kepada masyarakat di tengah keterpurukan akibat pandemi," ujar **Piyu Padi**, gitaris band PADI usai launching di Jakarta, Jum'at (10/9/2021).

Melalui lagu ini, Piyu mengajak masyarakat Indonesia untuk terus melihat ke depan. "Inilah waktu yang tepat untuk membangun optimisme. Kami mengajak masyarakat melalui apa yang kami bisa, yaitu melalui lagu," kata pria yang terlahir dengan nama Satriyo Yudi Wahono ini.

Di tengah pandemi sekarang ini, Piyu juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk terus berkarya, bergandeng tangan, dan melangkah bersama, jangan sampai terpecah belah. "Itulah inti dari pesan dalam lirik lagu ini," tegasnya. □

DER



Aksi *Bagi Sembako* di Tengah Pandemi

ARTIS, model, dan selebgram, **Hana Hanifah** kepergok sedang melakukan aksi bagi-bagi sembako di wilayah Bogor, Jawa Barat. Hari itu, artis yang kerap berpenampilan seksi dan sering menuai sensasi itu membagikan sekitar 500 paket sembako kepada masyarakat kecil di lingkungan tempat tinggal di wilayah Bogor.

Artis pemeran Nyai Sanca dalam sinetron Jaka Tingkir tahun 2020 ini ternyata memiliki kepedulian kepada masyarakat, terutama kepada para pedagang kecil. "Bukan apa apa ya, aku juga terdampak pandemi, tapi aku lebih terganggu, sebab banyak yang lebih susah dari aku," ungkap artis kelahiran Bogor, 26 tahun silam itu. Dia menunjuk contoh, banyak pedagang yang jualan karena habis modal. Atau jualan tapi gak laku.

Hana berharap, kegiatan yang dilakukannya ini dapat memotivasi teman-temannya agar bisa bersama-sama menyisihkan rezeki untuk disampaikan kepada mereka yang membutuhkan.

"Kalau semua bergerak saya yakin banyak orang akan terbantu di saat sulit ini". □

DER



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Hana Hanifah



Angela H. Tanoesoedibjo

Industri Perfilman Indonesia Harus Bangkit

PERFILMAN Indonesia yang sempat terpuruk karena terdampak pandemi Covid-19 harus bangkit," kata **Angela H. Tanoesoedibjo**, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ketika menjelaskan program Bantuan Pemerintah untuk Promosi Film Indonesia, Jumat (1/10/2021).

Angela menyatakan, program bantuan ini adalah bentuk dukungan pemerintah agar perfilman Indonesia kembali bangkit. Ini merupakan bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Subsektor Film yang terdiri dari tiga skema: promosi, lisensi, produksi.

Periode pendaftaran untuk program promosi film dimulai 1 Oktober 2021 dan berakhir pada 10 Oktober 2021. □

DER



Museum Sasmitaloka Ahmad Yani Saksi Bisu Keberanian Seorang A. Yani

BANGSA Indonesia baru saja memperingati Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober 2021. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila itu ditandai dengan gugurnya 9 Pahlawan Revolusi. Mereka adalah korban penculikan dan pembunuhan yang dilakukan Partai Komunis Indonesia (PKI). Peristiwa penculikan dan pembunuhan sadis terhadap para jenderal dilakukan dalam sebuah pemberontakan didalangi oleh PKI pada 30 September 1965, yang selanjutnya disebut dengan Gerakan 30 September atau G-3—S/PKI.

Kesembilan putera kusuma bangsa yang gugur dalam peristiwa G-30-s/PKI itu adalah: Letjen TNI Ahmad Yani, Mayjen TNI Raden Suprpto, Mayjen TNI Mas Tirtodarmo, Mayjen TNI Siswondo Parman, Brigjen Donald Isaac Panjaitan, Brigjen TNI Sutoyo Siswomiharjo, dan Lettu CZI Pierre Andreas Tendean. Sementara di Yogyakarta terdapat dua korban keganasan PKI, yaitu: Brigjen (anm) Katamsa Darmokusumo, dan Kolonel (anm) Sugiyono Mangunwiyoto.

Salah satu saksi bisu kekejaman PKI pada peristiwa G-30-S/PKI itu rumah kediaman



Letjen TNI Ahmad Yani, yang saat ini diabdikan menjadi Museum Sasmitaloka Ahmad Yani. Di lokasi Museum Sasmitaloka Ahmad Yani yang beralamat di Jalan Lembang Nomor 67, RT 11, RW 7, Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, itulah Letjen TNI Ahmad Yani dieksekusi oleh PKI.

Telah 56 tahun peristiwa penculikan dan pembunuhan terhadap Letjen TNI Ahmad Yani berlalu, gedung tersebut masih terawat dengan baik. Tembok dan gentengnya masih terlihat kokoh. Demikian pula lantai, pintu, serta jendela-jendela terlihat berfungsi dengan baik.

Rimbun pepohonan di sekitar Museum Sasmitaloka membuat suasana terasa teduh.



Meski matahari bersinar, tinggi dan rimbunnya dedaunan di sana mampu melindungi mereka yang berteduh dari teriknya panas di siang bolong. Sementara bunga-bunga kamboja yang berjatuhan mampu memberikan kesegaran dan wewangian layaknya di taman bunga.

Halaman di tempat ini terlihat bersih dan asri. Tidak ada tumpukan sampah apalagi botol-botol bekas minuman. Seluruh tanamannya baik yang tinggi menjulang maupun pendek tertata dengan rapi. Rumput di tempat tersebut juga terlihat subur menghijau. Menenangkan siapapun yang melihatnya.

Meski sudah berumur lebih dari setengah abad, Museum Sasmitaloka terlihat masih



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

kokoh dan maskulin. Ada kesan pemberani, tak takut melawan sakit dan itu membuatnya berbeda dengan bangunan lain di sekitarnya. Ini terjadi, salah satunya karena keberadaan Patung perunggu Ahmad Yani setinggi tiga meter yang berdiri tegap sambil mengenakan seragam Angkatan Darat (AD). Patung tersebut merupakan karya seniman Soenarto Pr yang menggambarkan kegagahan Jenderal (Anumerta) Ahmad Yani. Dan patung itulah yang membuat Sasmitaloka lebih menonjol dari bangunan lain di sekitarnya.

Tujuh Tembakan

Selain sebagai rumah tinggal Ahmad Yani, Museum Sasmitaloka juga menjadi saksi eksekusi PKI atas Letjen TNI Ahmad Yani. Tujuh tembakan yang memuntahkan tujuh peluru dari senapan pasukan Tjakrabirawa langsung mengoyak tubuh Ahmad Yani.

Lokasi tumbangnya Ahmad Yani ditandai dengan sebuah plakat warna kuning bertuliskan: "Di sinilah gugurnya Pahlawan Revolusi Jendral TNI A. Yani pada tanggal 1 Oktober 1965 jam 04.35". Saat penembakan terjadi, Letjen TNI Ahmad Yani sedang mengganti bajunya dengan pakaian dinas.

Dari tujuh peluru yang dilepas pasukan Tjakrabirawa pada 1 Oktober 1965 pukul 04:35 WIB itu lima di antaranya meninggalkan lubang di sebuah pintu. Fakta tersebut menunjukkan betapa kejamnya PKI. Mereka tega membunuh dari jarak sangat dekat sekalipun. Dan, itu membuat nilai historis Museum Sasmitaloka menjadi abadi, tidak mudah dihapus meski oleh peristiwa dan cerita di zaman kekinian.

Yang menarik, bekas kediaman Ahmad Yani itu masih sama seperti saat ditinggalkan penghuninya. Barang-barang pribadi milik

Sang Jenderal masih ada di tempatnya. Karena itu, saat berada di tempat tersebut pengunjung seolah-olah dibawa untuk menembus lorong waktu, berada di masa saat Ahmad Yani masih hidup.

Apalagi kamar tidur, kamar mandi, ruang tamu, dapur, dan bahkan kompor, serta perabotan lainnya yang ada di sana semua adalah milik keluarga Ahmad Yani. Barang-barang tersebut dirawat dan dipertahankan hingga saat ini.

Sejumlah koleksi pribadi milik Ahmad Yani masih tersimpan dengan rapi di sana. Semua itu membuat pengunjung merasa melakukan napak tilas kehidupan Sang Jenderal. Terlebih saat melihat Kamar Ahmad Yani yang tertata rapi. Di kamar itu juga terdapat seragam dan pakaian dinas yang tersimpan dalam lemari kaca.

Peristiwa yang terjadi di Sasmitaloka pada 30 Oktober 1965 itu menunjukkan betapa pemberani para pahlawan, termasuk seorang Letjen TNI Ahmad Yani. Di hadapan puluhan pasukan Tjakrabirawa yang bersenjata lengkap, dan terus membentak serta mendorongnya, A. Yani tetap tenang. Ia memaksa berganti baju dengan pakaian lebih layak untuk memenuhi undangan, seperti yang disampaikan oleh Tjakrabirawa kepadanya. Padahal saat itu para tamu yang tidak diundang itu memaksanya untuk langsung pergi. Tetapi A. Yani bergeming hingga tujuh peluru menembus tubuhnya, membuat badannya terjeremban ke lantai. Sang jenderal gugur sebagai Pahlawan Revolusi. □

MBO





Hj. Illiza Sa'aduddin Djamal, S.E.

Anggota MPR RI Fraksi PPP

Cut Nyak Dhien di Era Demokrasi



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

DI ZAMAN revolusi fisik dahulu, Aceh dikenal memiliki pejuang-pejuang perempuan yang tangguh. Mereka tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga mahir menyiapkan tak-tik peperangan. Terbukti perlawanan pejuang-pejuang perempuan Aceh ini tak mudah dipadamkan. Sebut saja Cut Nyak Dhien dan Cut Mutia, dua nama yang melegenda, dan selalu dikenang sepanjang masa.

Di ranah politik, perempuan Aceh senantiasa berkontribusi memperjuangkan kepentingan masyarakat Serambi Mekah. Salah satu nama perempuan Aceh yang menjadi buah bibir karena kesuksesannya di bidang politik adalah Hj. Illiza Sa'aduddin Djamal, S.E., anggota MPR RI Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (Fraksi PPP).

Terpilih menjadi anggota Legislatif pada Pileg 2019, perempuan kelahiran Banda Aceh, 31 Desember 1973, ini berhasil menghilangkan dahaga masyarakat Aceh terhadap wakil perempuannya di Senayan. Maklum, dalam tiga pelaksanaan pileg sebelumnya, atau dalam lima belas tahun tak ada satupun anggota DPR yang merepresentasikan kaum hawa masyarakat Aceh.

"Awalnya saya hanya ingin mencalonkan diri menjadi anggota DPR Aceh. Tapi, partai menghendaki saya maju di tingkat pusat. Jadi surprise juga pada akhirnya saya berhasil lolos ke Senayan," kata Illiza yang akrab disapa Bunda Illiza, baik oleh kolega maupun konsituennya di dapil Nangroe Aceh Darussalam I, kepada Majelis beberapa waktu lalu.

Keberhasilan Bunda Illiza melenggang ke Senayan bukan karena berkalung nasib baik semata. Keberhasilan itu memang layak

diperoleh, karena Illiza memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan di bidang politik. Di bidang eksekutif, Ia memiliki pengalaman sebagai Wakil Walikota dan Walikota Banda Aceh. Illiza juga sempat berkecimpung di berbagai organisasi politik dan kemasyarakatan. Dan, mempeoleh banyak penghargaan sebagai perempuan berprestasi, baik di daerah maupun tingkat nasional.

Jadi, Illiza memang mengantongi modal sosial yang sangat besar, dan itu memudahkannya ke Senayan. Karena itu, tak heran jika Ia sangat dekat dengan masyarakat Aceh. Dia bisa merasakan dan berempati terhadap kesulitan yang dihadapi masyarakat. Terlebih persoalan pendidikan, yang menjadi tugasnya di Komisi X DPR RI.

Menyangkut nasib dunia pendidikan di masa pandemi Covid-19 misalnya, Illiza begitu prihatin terhadap nasib para peserta didik. Apalagi, jelang tahun kedua pandemi Covid-19, pemerintah tak kunjung mampu mengantisipasi potensi terjadinya *Lost Generation* akibat serangan virus korona. Pasalnya, program-program yang disiapkan hanya bisa dilakukan dengan tatap muka. Sementara sistem belajar *offline*-nya masih dilarang.

Menurut Illiza, selama pandemi Covid-19, hanya 40% peserta didik yang memiliki akses untuk mengikuti proses belajar-mengajar secara daring. Dari jumlah itu sebanyak 41,4% sudah bosan mengikuti sistem belajar online. Lebih mengkhawatirkan, prosentase kebosanan itu lebih besar dirasakan oleh siswa di Pulau Jawa (41.7%) dibanding siswa luar Jawa (39,3 %)," kata Illiza.

Tingginya tingkat kebosanan siswa yang mengikuti sistem belajar daring di Pulau Jawa, kata Illiza, terjadi karena kebijakan penanganan



Covid-19 tak kunjung membuahkan hasil. Sementara di luar pulau Jawa, terutama di pedalaman, masih banyak anak sekolah yang tetap melaksanakan sistem belajar tatap muka. Bahkan, di Pedalaman Aceh, ada juga sekolah yang tidak bernah melakukan pembelajaran jarak jauh. Mereka tetap menjalankan belajar tatap muka, dan tidak pernah libur.

Dalam kesempatan itu, Illiza mengungkapkan pengalamannya ketika beberapa kali melaksanakan Sosialisasi Empat Pilar MPR. Dalam melaksanakan kegiatan itu, ia selalu membawa dan memakai masker. "Dan, itu membuat saya terlihat aneh," cerita Illiza. Tetapi, kepada peserta konstituennya, dia menjelaskan bahwa dia datang dari Jakarta, khawatir membawa virus. "Saya pakai masker agar tidak menular, baru mereka bisa menerima," ungkap alumni Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta ini.

Bahkan, saat beberapa kali melaksanakan reses, kata Wakil Walikota dan Walikota perempuan pertama di Banda Aceh, ini banyak kepala desa meminta agar Dia tidak usah menerangkan program yang hendak disampaikan. Tetapi, lebih baik menjelaskan persoalan manfaat vaksinasi, karena di tempat itu kesaradan untuk menerima vaksin memang rendah. Baru, setelah mendapat penjelasan mengenai vaksin, masyarakatpun sadar untuk pergi ke Puskesmas untuk divaksin.

Meski begitu, kata Illiza, pandemi juga memberikan berkah tersendiri bagi masyarakat. Hadirnya pandemi membuat masyarakat berusaha menyesuaikan diri dengan kebutuhan teknologi. Masyarakat semakin



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

melek dan terbiasa dengan sistem online. Menguasai teknologi komunikasi, dan mempercepat alih teknologi menuju era industri 4.0.

Wanita Pertama

Persinggungan Hj. Illiza Sa'aduddin Djamal dengan dunia politik, bak pepatah mengartakan, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Dalam tubuhnya mengalir darah kepemimpinan, turun dari kakeknya. Sang kakek dari garis ibunya dulu dikenal sebagai kepala daerah. Jabatannya Residence Kota Banda Aceh, Bupati Aceh Besar, Bupati Aceh Timur, dan Aceh Tengah.

Sedangkan bersenggolan dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengikuti jejak ayahnya. Bahkan, tak berlebihan jika Illiza dibilang sebagai anak bilologis dari PPP. Karena ayahnya, Sa'aduddin Djamal, merupakan Ketua PPP di Aceh. Sa'aduddin Djamal juga sempat menjadi anggota MPR, hingga akhir hayatnya. Sementara ibunya, Hamriah, adalah pengurus PPP sekaligus anggota DPR Provinsi Aceh.



Dari ayahnya, dalam diri Illiza mengalir darah ulama-ulama besar Nangroes Aceh Darussalam. Seperti Abu Dapuri, Abu Lampu, dan Abu Niran. Mereka adalah ulama-ulama yang gemar menimba ilmu, bahkan hingga ke Mekah Al Mukarramah. Dan, saat kembali ke Tanah Air, mereka mendirikan pondok pesantren. Termasuk yang saat ini Illiza geluti, yaitu mendirikan dan mengasuh Pesantren Tahfiz Qur'an di Banda Aceh.

Semasa kecil, Illiza yang sangat dekat dengan ayahnya. Ia sering ikut serta di berbagai acara PPP. Bahkan, di kalangan PPP Aceh, sosok Illiza sudah dikenal sangat dekat. Mereka menerima kehadirannya, seperti saat menyambut kedatangan ayahnya selaku petinggi partai.

Karena itu, setelah merampungkan pendidikan Sarjana Ekonomi dan Ilmu Manajemen pada Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen (STIM) Banda Aceh, Illiza tak bisa menolak saat diminta menjadi salah satu pengurus di DPC PPP Banda Aceh. Ia berfikir, dengan menjadi pengurus, berarti menyambung tali silaturahmi orangtuanya.

"Waktu itu saya membantu ibu menyiapkan acara pemilihan pengurus. Saya bawa karpet, bunga, dan mendekor panggung. Setelah itu, saya malah dimasukkan menjadi pengurus DPC PPP Banda Aceh," kata Illiza lagi. Nah, sejak itu, kepercayaan yang didapat Illiza makin besar. Ia diberi mandat memimpin DPC PPP. Tidak hanya sampai di situ, kepercayaan yang diberikan pun semakin besar, masyarakat memilihnya menjadi anggota DPR Aceh. Dan, lima tahun berikutnya Illiza didaulat mencalonkan diri sebagai Walikota, mendampingi Mawardi Nurdin.

"Saya menjalani semua itu dengan niat beribadah kepada Allah. Karena itu, saya merasa ringan, tidak terbebani dan tidak ingin mencari masalah. Berusaha mencari jalan keluar dari permasalahan yang ada. Saya berfikir, semua orang memiliki potensi yang sama, karena itu saya tidak mau meremehkan orang lain," kata Illiza lagi.

Karena itu, saat ia gagal memenangkan kontestasi Pilkada Walikota Banda Aceh 2017, tak menunggu lama, Illiza langsung menyampaikan selamat kepada pasangan terpilih. Ia tak ingin, kontestasi berkepanjangan dan menyebabkan gesekan antarpemilihan.

Di belakang hari, keikhlasan serta kesabarannya menerima kekalahan di Pilkada Walikota berbuah manis. Hanya dua tahun menunggu, Illiza terpilih menjadi anggota Legislatif. Keberhasilan



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

itu memutus kekosongan perempuan Aceh di dunia politik nasional. Dan, menempatkan Illiza sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024.

Al Azhar Kebayoran Baru

Sebagai wanita karier, Illiza tetap mengakui qodratnya sebagai istri dari Amir Ridha, dan ibu bagi M. Luthfi, M. Hakiki, M. Hanafi, dan Ade Nazirah. Setiap ada kesempatan berkumpul bersama keluarga, Illiza berusaha mengurus kepentingan keluarga dengan tangannya sendiri. Seperti memasak maupun menata rumah. Juga mendidik serta mengawasi anak-anaknya belajar.

"Saya tidak merasa ada perubahan. Semua berjalan seperti apa adanya. Bahkan, saya sering makan di dapur, atau merawat tanaman," kata alumni SMA Al-Azhar Kebayoran Baru, Jakarta, ini. □

MBO

Bio Data

Hj. Illiza Sa'aduddin Djamil, S.E.

Tempat/Tgl. Lahir : Banda Aceh, 31 Desember 1973
 Nama Suami : Amir Ridha
 Pendidikan Akhir : Sarjana Ekonomi dan Ilmu Manajemen
 STIM Banda Aceh

Pengalaman Organisasi

2019-2022 : Ketua Umum PB Persatuan Panahan
 Indonesia (Perpani)
 2019-2022 : Ketua Harian FKA ESQ Pusat
 2019 : Alumni IVLP Women and Political (USA)
 2016-2017 : Bendahara Asosiasi Pemerintah Kota
 Seluruh Indonesia (Apeksi)
 2006-2016 : Ketua DPC PPP Banda Aceh

Pengalaman Pekerjaan

2019-sekarang : Anggota DPR RI Fraksi PPP
 2014-2017 : Walikota Banda Aceh
 2007-2014 : Wakil Walikota Banda Aceh
 2004-2006 : Anggota DPR Kota Banda Aceh

Habis Badai Covid-19, Antisipasi Terbitlah Kehidupan Normal Baru

SEJAK badai Covid-19 diakhir tahun 2019 mulai menyerang Propinsi Wuhan RRC, terus dengan cepat menjalar ke seluruh dunia secara masif, termasuk ke Indonesia awal tahun 2020. Untuk pengendalian penularannya pemerintah menerapkan beberapa kebijakan, yaitu menerapkan sosial distancing/lock down yang tidak terlalu ketat, dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang telah mengalami beberapa kali perpanjangan, dengan tetap penerapan SOP Kesehatan /Prokes, pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, dan diikuti dengan makan yang bergizi, istirahat cukup, olah raga, berjemur di sinar matahari, pengaturan jam kerja di kantor maupun di pasar, dan tentunya sebagai bangsa yang religius diikuti dengan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kebijakan tersebut berimplikasi kebijakan Fiskal untuk tanggap Covid, melalui revisi APBN maupun APBD 2020 dan 2021 dengan fokus bagaimana membiayai kegiatan pengendalian Covid-19, yang sekarang ada lagi varian baru, yaitu D, untuk pengadaan APD, Maskers, Sanitizer, Vaccin, alat tes Covid (PCR, Antigen), dan belanja sosial untuk ketahanan pangan rumah tangga masyarakat miskin agar jangan sampai terjadi kelaparan. Disamping juga untuk belanja alat komunikasi daring, baik hard ware maupun soft ware, dan masyarakat sudah mulai terbiasa komunikasi secara *online* dengan menggunakan *zoom meeting*, *google meet*, *microsoft team* dan lainnya.

Setelah lebih dari 1 tahun 6 bulan, dampak serangan wabah ini telah menyerang semua aspek kehidupan, bidang ekonomi adalah pengangguran, kemiskinan, penurunan daya beli, sosial budaya terutama di sektor pendidikan. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja

bersama Badan Anggaran DPR RI menyampaikan bahwa penerimaan negara tahun 2020 mengalami kontraksi sangat dalam, sementara belanja meningkat sangat tinggi saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Realisasi pendapatan negara pada APBN 2020 sebesar Rp 1.647,7 triliun atau 96,9% dari anggaran pendapatan pada APBN TA 2020. "Pendapatan ini turun Rp 312,8 triliun atau 15,9% dibanding kondisi sebelum Covid, yaitu tahun anggaran 2019." Selanjutnya Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi sepanjang 2020 mengalami minus 2,07% secara *year on year*. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, kontraksi ini dipengaruhi oleh pelemahan di berbagai sektor ekonomi karena pandemi Covid-19.

Sudah menjadi sunnatullah, kejadian suatu bencana alam, termasuk Covid-19, selalu menimbulkan keseimbangan baru, ada dampak negatif, baik kerugian materi maupun non materi, ada hikmah tersembunyi yang kita baru tahu setelah kita mengalaminya dan bersabar. Di bidang ekonomi kita bersyukur bahwa sektor pertanian, terutama pangan pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan positif di atas 2 %, ini memberikan sinyal kepada kita untuk ke depan bagaimana penguatan ketahanan pangan kita harus mendapat perhatian, dan alhamdulillah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 66/2021 tentang Badan Pangan Nasional. Diharapkan ke depan lembaga ini mampu membuat kebijakan pangan nasional yang lebih komprehensif, dan antisipatif, terutama bagaimana mewujudkan visi Indonesia sebagai negara pengekspor pangan (Feed the World)

Sebagaimana disampaikan Presiden, pada kabinet Indonesia Maju jilid 2 ini fokusnya adalah peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Penutupan sementara lembaga pendidikan sebagai upaya

Oleh:
Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad
Wakil Ketua MPR RI



menahan penyebaran pandemi Covid-19 berdampak pada jutaan pelajar dan mahasiswa. Gangguan dalam proses belajar langsung antara siswa dan guru dan pembatalan penilaian belajar berdampak pada psikologis anak didik dan menurunnya kualitas keterampilan murid. Beban itu merupakan tanggung jawab semua elemen pendidikan, khususnya negara dalam memfasilitasi kelangsungan sekolah bagi semua stakeholders pendidikan guna melakukan pembelajaran jarak jauh. Bagaimana mestinya Indonesia merencanakan, mempersiapkan, dan mengatasi pemulihan Covid 19 untuk menekan kerugian dunia pendidikan di masa mendatang.

Pandemi Covid-19 telah mengubah dunia pendidikan, mulai dari proses pembelajaran, dimana biasanya dilakukan di dalam kelas dengan tatap muka, namun sejak pandemi berlangsung berubah menjadi belajar daring (dalam jaringan). Guru, siswa, dan orang tua dituntut untuk bisa menghadirkan proses pembelajaran yang efektif dan aktif walaupun dilaksanakan dari rumah masing-masing.

Di tengah pandemi yang terus melaju, dunia Pendidikan harus terus mendapatkan perhatian khusus agar tidak terdampak buruk. Apabila membahas tentang dunia pendidikan, maka akan membahas masa depan suatu bangsa. Melihat dari kacamata umum sekarang ini, pandemi Covid-19 memang banyak menimbulkan ancaman bagi dunia pendidikan. Namun dilihat dari sudut pandang yang berbeda, ancaman dapat diubah menjadi dampak peluang untuk memajukan dunia pendidikan.

Pandemi Covid-19 yang begitu banyak berdampak negatif juga berdampak positif bagi dunia pendidikan di Indonesia. Dampak positif ini dapat memotivasi melalui masa-masa sulit untuk terus mencapai tujuan pendidikan Indonesia yang lebih maju. Dampak

positifnya adalah; a). Memicu Percepatan Transformasi Pendidikan, pemberlakuan sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau pembelajaran daring (online); b). Banyak Muncul Aplikasi Pembelajaran Online; c). Jumlah Kursus Online Gratis; d).Munculnya Kreativitas Tanpa Batas; e). Kolaborasi Orang Tua dan Guru; f). Penerapan Ilmu dalam Keluarga; g). Guru menjadi lebih akrab dan melek teknologi; h). Internet sebagai sumber informasi yang positif; i). Siswa dapat diawasi oleh orang tua secara langsung.

Pada dasarnya setiap anak memiliki potensi yang tidak terbatas. Tetapi ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi apakah mereka pada akhirnya dapat memenuhi potensi tersebut. Para ahli meyakini bahwa peran orang tua dalam kehidupan seorang anak berdampak luas dan dengan pengawasan orang tua anak akan mudah untuk memantau perkembangannya secara langsung. Keterlibatan orang tua sangat penting agar anak berprestasi di sekolah. Beberapa orang tua mungkin berpikir bahwa itu adalah peran guru untuk mengajar, bukan mereka. Namun, kepercayaan seperti itu tidak merugikan orang tua dan anak. Anak-anak tidak mulai dan berhenti belajar hanya selama hari sekolah. Mereka selalu terbiasa belajar, di rumah, dengan teman, dan melalui pengaruh lain. Kementerian Komunikasi dan Informasi diharapkan mampu mengantisipasi pengaruh negatif situs-situs yang tidak mendidik dan dapat memblokir situs yang merusak dunia pendidikan kita.

Itulah beberapa hal positif dari pandemi Covid-19. Tentu masih banyak lagi hal positif yang bisa kita rasakan. Meski demikian, kami tetap berharap pandemi segera berakhir dan pembelajaran tatap muka segera dilakukan lagi. □

Amandemen UUD, Ingat Pesan ‘Jenderal Besar’

Forum di bawah arahan Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno dan Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri menyusun kajian dan naskah akademik terkait amandemen UUD. Hasil kajian itu mengatakan, amandemen yang dilakukan secara tergesa-gesa telah mengubah sistem ketatanegaraan yang menyimpang dari Pembukaan UUD dan Pancasila.

ADA dinamika di kalangan ahli tata negara, politisi, dan masyarakat terkait adanya keinginan mengubah atau mengamandemen kembali UUD NRI Tahun 1945. Dinamika itu muncul ketika MPR Periode 2014-2019 merekomendasikan 7 hal harus dikerjakan atau dituntaskan oleh MPR periode selanjutnya, 2019-2024.

Satu di antara tujuh rekomendasi tersebut adalah Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Masyarakat dan politisi menyebut tidak adanya panduan pembangunan, seperti Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), panduan pembangunan pada masa Orde Baru, membuat pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak sinkron. Tidak hanya itu, pembangunan antarpresiden pun tidak berkesinambungan. Hal demikian dikhawatirkan membuat pembangunan secara keseluruhan menjadi tanpa arah. Panduan pembangunan yang dihela saat ini, berdasarkan visi dan misi kepala daerah dan presiden. Bila masa jabatan mereka berakhir maka berakhirlah arah pembangunan yang dilakukan.

Agar memiliki arah yang jelas hingga 50 tahun ke depan, maka masyarakat dan politisi ingin ada haluan negara yang saat ini disebut PPHN. Di sinilah mulai terjadi perdebatan dan dinamika. Apakah haluan negara itu kelak akan dituangkan dalam UUD atukah cukup dengan pijakan hukum di bawah UUD.

Bila PPHN hendak dituangkan dalam UUD maka perlu diamandemen, *nah* di sini dinamika bertambah kembali sebab ada kekhawatiran amandemen akan melebar ke mana-mana, tidak hanya membahas soal PPHN, namun juga ke masalah-masalah yang sebelumnya tidak dibahas secara terbuka. Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, saat *Diskusi Empat Pilar MPR*, mengatakan, hati-hati bila hendak melakukan amandemen.

Apa yang disampaikan oleh alumni doktor Universitas Indonesia itu jauh-jauh hari sudah diungkapkan oleh *Forum Bersama Purnawirawan TNI-Polri* (FOKO) dan Organisasi Mitra Seperjuangan. Forum ini dengan tegas mengatakan lewat buku yang disusunnya dengan judul *Kaji Ulang Perubahan UUD 1945*. Cakupan yang disampaikan oleh forum yang beranggotakan para ‘jenderal besar’ itu tidak hanya soal

perlu kehati-hatian dalam mengubah konstitusi, namun amandemen yang telah dilakukan juga perlu dikaji ulang.

Buku bersampul merah-putih, dalam pengantar FOKO mengatakan, berusaha keras mengingatkan bahkan mendesak kepada MPR serta masyarakat agar proses amandemen dilakukan secara hati-hati dan waspada. FOKO merasa bahwa peringatan yang disampaikan itu dianggap *berteriak di padang pasir* sehingga bak *anjing menggonggong kafilah tetap berlalu* sehingga amandemen UUD berlangsung mulai dari 1999 hingga 2002.

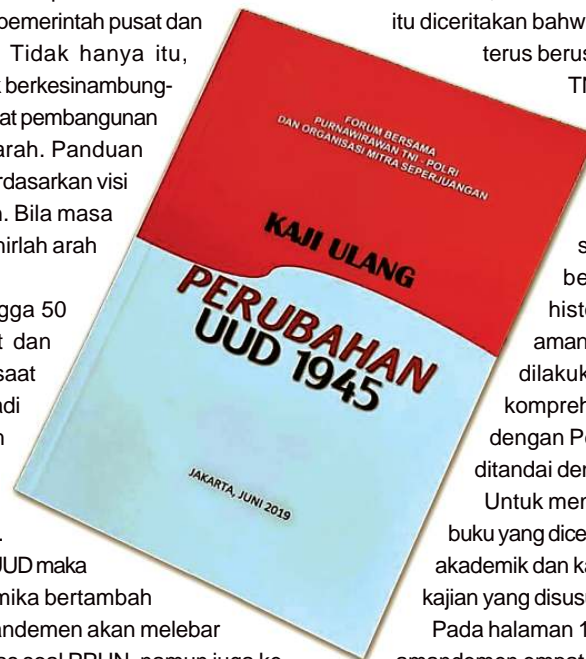
Meski demikian, dalam buku yang memiliki ketebalan 198 halaman itu diceritakan bahwa FOKO tidak mengenal menyerah dan

terus berusaha. Buku yang disusun oleh Jenderal TNI (Purn) Agustadi Sasongko Purnomo, Brigjen TNI (Purn) Badjoeri Widagdo, Letjen TNI (Purn) Toni Hartono, dan rekan-rekannya purnawiran TNI matra laut dan udara, ditambah dari kepolisian serta ahli hukum, mengungkapkan, dari berbagai tinjauan filosofis, ideologis, historis, sosiologis, empiris, dan yuridis, amandemen yang telah dilakukan, empat kali, dilakukan tanpa konsep (*grand design*), tidak komprehensif, tergesa-gesa, dan bertentangan dengan Pembukaan UUD dan Pancasila bahkan ditandai dengan adanya ‘campur tangan asing’.

Untuk mendukung alasan tersebut, FOKO dalam buku yang dicetak pada Juni 2019 memaparkan, naskah akademik dan kajian yang dibuat. Naskah akademik dan kajian yang disusun itu terurai dalam Bab II hingga Bab VI. Pada halaman 16, ada salah satu kesimpulan berbunyi, amandemen empat kali UUD telah membawa dampak yang besar, baik sekarang maupun masa depan, bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil amandemen tidak lagi bersifat menyempurnakan, akan tetapi “telah mengubah sistem ketatanegaraan” yang menyimpang dari Pembukaan UUD dan Pancasila.

Dengan membaca buku ini, kita banyak belajar akibat dari amandemen UUD, sehingga pesan dari para ‘jenderal besar’ dalam buku itu yang mengatakan, agar proses amandemen dilakukan secara hati-hati dan waspada, perlu diingat kuat-kuat. □

AWG





MANIFESTO

Masih Indonesiakah kita
setelah sekian banyak jatuh bangun
setelah sekian banyak tertimpa dan tertempa
setelah sekian banyak terbentur dan terbentuk

Masihkah kita meletakkan harapan di atas kekecewaan
persatuan di atas perselisihan
musyawarah di atas amarah
kejujuran di atas kepentingan

Ataukah ke-Indonesia-an kita telah pudar
dan hanya tinggal slogan dan gambar?

Tidak!

Karena mulai kini nilai-nilai itu kita lahirkan kembali
Kita bunyikan dan kita bumikan
menjadi jiwa dan raga setiap manusia Indonesia

Dari Sabang sampai Merauke
kita akan melihat lebih banyak lagi
senyum ramah dan tegur sapa
gotong royong dan tolong menolong
kesantunan bukan anjuran tapi kebiasaan
kepedulian menjadi dorongan

Dari terbit hingga terbenamnya matahari
kita melihat orang-orang berpeluh tanpa mengeluh
berkeringat karena semangat
kerja keras menjadi ibadah
ketaatan menjadi kesadaran
kejujuran menjadi bagian harga diri dan kehormatan

Wajah mereka adalah wajah Indonesia yang sebenarnya
tangan mereka adalah tangan Indonesia yang sejati
keluhuran budi mereka adalah keluhuran Indonesia yang sesungguhnya

Hari ini kita gemakan, Ini Baru Indonesia!

INI BARU
INDONESIA





MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT

